

# EDUKASI

K E U A N G A N

www.bppk.depkeu.go.id

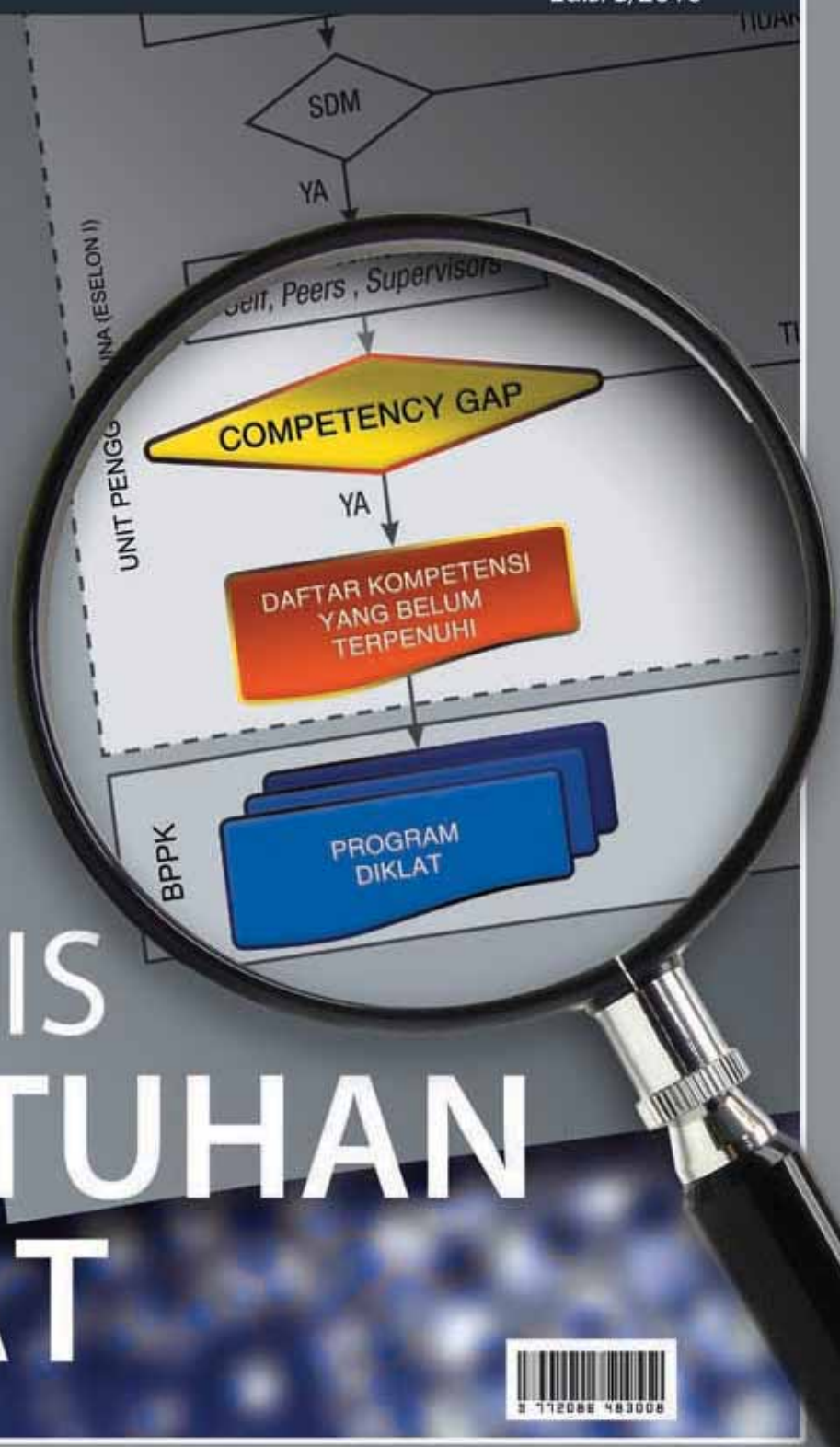
Edisi 3/2010



**RUANG KHUSUS**  
**OLEH OLEH DARI JEPANG**  
**DAN FILIPINA**



**KURSI VIP**  
**MULIA P. NASUTION**  
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN  
**INTELEKTUAL VISIONER**  
**DARI PANYABUNGAN**



# ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT





SELAMAT  
HARI KARTINI



## Daftar Isi

|                      |    |
|----------------------|----|
| Aula Utama           | 3  |
| Ruang Khusus         | 10 |
| Gerai Pusdiklat      | 16 |
| Serambi STAN         | 22 |
| Ruang Punawarman     | 27 |
| Kursi VIP            | 29 |
| Balai-balai          | 35 |
| Dinding Widyaishwara | 38 |
| Ornamen              | 45 |
| Sofa                 | 48 |
| Selasar Alumni       | 51 |
| Zona BPPK            | 52 |
| Jendela              | 53 |
| Karikatur            | 55 |
| Galeri               | 56 |

|          |                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | <b>AULA UTAMA</b><br><b>LANGKAH AWAL MENUJU</b><br><b>PROGRAM DIKLAT YANG AKURAT</b><br><i>Apa dan seberapa penting Analisis Kebutuhan Diklat?</i> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10</b> | <b>RUANG KHUSUS</b><br><i>CATATAN SINGKAT:</i><br><b>SHORT-COURSE E-LEARNING DI JEPANG</b><br>5 Desember 2009 seluruh peserta program non gelar PHRDP III batch II yang berjumlah 25 orang akhirnya diberangkatkan menuju Tokyo untuk mengikuti diklat yg bertajuk "Courseware Development for E-Learning & Classroom Instruction" selama dua minggu, yaitu mulai dari 7 Desember s.d. 19 Desember 2009, di Temple University, Japan Campus (TUJ). |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>29</b> | <b>KURSI VIP</b><br><b>MULIA P. NASUTION</b><br><b>INTELEKTUAL VISIONER DARI PANYABUNGAN</b><br>Berbagai media telah menampilkan berita mengenai kiprah Intelektual bergelar <i>Docteur en Droit</i> asal Mandailing Natal ini. Namun, ini saatnya anda menyimak <i>Up Close and Personal</i> seorang Mulia Panusunan Nasution. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>48</b> | <b>SOFA</b><br><b>BELAJAR DI NEGERI ORANG</b><br>Meski di negeri orang semua terlihat berkilauan, namun hati ini tetap rindu kampung halaman. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Salam Redaksi

"The show must go on", begitu semboyan yang biasa diungkapkan oleh para pelaku dunia *Showbiz*. Nampaknya tak salah kiranya jika itu kami jadikan semboyan dalam penerbitan edisi ketiga ini. Dinamika organisasi yang sedikit banyak turut mempengaruhi agenda tim redaksi, tak menghalangi niat kami untuk berusaha menerbitkan edisi kali ini dengan tepat waktu. Karena seperti kata semboyan diatas, "pertunjukan" harus terus berlangsung. Bagi kami Majalah harus tetap terbit tepat waktu.

Di edisi ketiga ini, kami menentangahkan isu Identifikasi Kebutuhan Diklat pada rubrik Aula Utama. Isu ini perlu diketahui tidak hanya oleh kalangan BPPK sebagai penyedia jasa Pendidikan dan Pelatihan, namun juga bagi para Unit eselon I yang tentunya lebih paham mengenai kebutuhan diklat di unit masing-masing. Peran aktif dan sinergi diantara keduanya diharapkan dapat menghasilkan racikan diklat yang tepat untuk mengisi gap kompetensi yang ada.

Sementara itu kabar dari Jepang dan Filipina akan kami hadirkan untuk anda di Ruang Khusus. Diantara selang waktu penerbitan edisi kali ini, BPPK mengirimkan wakilnya untuk mengikuti "Courseware Development for E-Learning & Classroom Instruction" di Temple University, Japan Campus (TUU) dan Bussines Meeting Global Development Learning Network (GDLN) Network Asia Pacific di Filipina.

Kabar dari unit BPPK juga masih kami hadirkan lewat tulisan di rubrik Gerai Pusdiklat, Serambi STAN, Ruang Sekretariat serta Balai-Balai. Khusus untuk Serambi STAN, kali ini akan mengangkat tema implementasi PP 14 yang akan menjadi *milestone* baru bagi masa depan STAN. Di Kursi VIP, kali ini ditempati oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Mulia P. Nasution. Simak kisah beliau yang akhirnya membuat redaksi menobatkannya sebagai Intelektual Visioner dari Penyabungan. Tak lupa, pemikiran para widyaiswara yang dituangkan dalam artikel juga kami sajikan dirubrik Dinding Widyaiswara.

Bagi anda yang ingin mengetahui pengalaman pegawai yang memperoleh Beasiswa di Luar Negeri, Anda bisa membaca tulisan Rido P. Panjaitan yang akan berbagi pengalamannya belajar di Negeri Ginseng, Korea. Sedangkan jika Anda berminat mengirimkan artikel untuk diterbitkan menjadi jurnal, jangan lupa menengok rubrik BPPK Zone. Tak ketinggalan, rubrik Jendela, karikatur, Alumni dan Galeri masih akan menyapa anda dengan konten khususnya.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah mengirimkan tulisan kepada kami. Meskipun belum semua tulisan dapat kami muat, namun kami tak lupa mengundang kepada para pembaca lain yang ingin mengirimkan tulisan demi memperkaya isi Majalah Edukasi Keuangan ini. Silahkan kirimkan melalui alamat email redaksi [edukasikeuangan@gmail.com](mailto:edukasikeuangan@gmail.com).

Selamat menikmati sajian kami.

## SELAMAT HARI KARTINI KE 131

## Susunan Redaksi



### PELINDUNG

Kepala BPPK

### PENGARAH

Kapusdiklat PSDM

Kapusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan

Kapusdiklat Bea dan Cukai

Kapusdiklat Pajak

Kapusdiklat Keuangan Umum

Kapusdiklat KNP

Direktur STAN

### PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris BPPK

### PEMIMPIN REDAKSI

Vissia Dewi Haptari

### Wakil PEMIMPIN

### REDAKSI

Soffan Marsus

### REDAKTUR

Ismoyo Sejati

Agus Sunarya Sulaeman

Ganti Lis Ariyadi

Iqbal Soenardi

Muh Nur khamid

Ahmad Rus'an

Akhmad Priharjanto

Denny Handoyo S.

Wawan Ismawandi

### PENYUNTING/EDITOR

Agung Nugroho

Iwan Khrisnawan

Setyawan Dwi Antoro

Shera Betania

Pilar Wirotama

### DESAIN GRAFIS DAN

### FOTOGRAFER

Anggiat Silalahi

Riko Febrialdo

Eros Lassa Mursalin

### Alamat Redaksi

Jl. Purnawarman 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110  
Telp: +62 21 7394666, 7244873 Fax: +62 21 7261775  
<http://www.bppk-depkeu.go.id>

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf arial 11 spasi 1,5 maksimal 5 hal. Artikel dapat dikirim ke [edukasikeuangan@gmail.com](mailto:edukasikeuangan@gmail.com). Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.



OLEH:  
**HENI KARTIKAWATI  
DAN NOVA MARDIANTI**

## ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT :

# LANGKAH AWAL MENUJU PROGRAM DIKLAT YANG AKURAT

Bagi BPPK yang *core-business*nya adalah menyediakan diklat, maka ketepatan program diklat dengan kebutuhan *stakeholders*-nya merupakan hal yang esensial. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya diklat yang kurang sesuai dengan kebutuhan akan menyebabkan diklat tersebut kurang diminati, menjadi formalitas atau bahkan ditinggalkan.

Kredibilitas BPPK pun sedikit banyak tergantung pada program diklat yang disediakan. Tentunya, ketika program diklat sesuai dengan harapan *stakeholders*-nya maka kredibilitas BPPK akan meningkat. Sebaliknya, apabila ternyata diklat yang disediakan kurang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*-nya maka kredibilitas BPPK akan menurun.

Kredibilitas BPPK yang meningkat selanjutnya akan menjadikan BPPK sebagai lembaga pendidikan dan pelati-

han yang mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan *stakeholders*-nya dan menjadikannya dipercaya untuk menyediakan diklat berkualitas. Secara otomatis, hal ini membuat *stakeholders*-nya tidak berpaling dengan mencari alternatif-alternatif lain, karena BPPK dapat menjadi tempat diklat terbaik bagi mereka.

Memang bagi lembaga diklat, suatu idealisme klasik, bahwa diklat harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*. Maka dari itu, ketepatan program diklat yang diselenggarakan BPPK dengan kebutuhan *stakeholders*-nya menjadi perhatian utama dan terus menerus, mengingat perkembangan dan dinamika yang terjadi pada *stakeholders*.

Langkah awal yang digunakan untuk mengarahkan agar diklat sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* adalah dengan apa yang dikenal sebagai Analisis Kebu-

tuhan Diklat (AKD). Melalui AKD, akan diperoleh suatu formulasi program diklat yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*. Hal ini akan berimplikasi positif terhadap seluruh kegiatan diklat yang dilaksanakan, termasuk di dalamnya kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diklat karena AKD merupakan langkah awal menuju program diklat yang akurat, sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*.

## APA DAN SEBERAPA PENTING ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT?

Menjadi pusat unggulan pendidikan dan pelatihan keuangan negara untuk menghasilkan SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas tentu bukan hal yang mudah. Dengan tugas yang diembannya tersebut, sudah menjadi tuntutan bagi BPPK untuk terus me-

nyempurnakan program-program diklat yang diselenggarakannya. Terlebih dengan “Pelayanan Prima” sebagai salah satu dari tujuh produk unggulan BPPK. Penyelenggaraan program diklat yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* merupakan salah satu dari wujud pelayanan prima BPPK.

Berbicara mengenai kesesuaian program diklat dengan kebutuhan *stakeholders*, mau tidak mau akan berkaitan erat dengan diagnosa, identifikasi hingga pada analisis kebutuhan diklat. Tidak dapat dipungkiri bahwa desain diklat tanpa proses pendahuluan seperti diagnosa, identifikasi hingga pada analisis kebutuhan *stakeholders* hampir tidak mungkin mencapai hasil dengan tingkat akurasi yang memuaskan.

Berdasarkan beberapa studi literatur, rangkaian proses pendahuluan tersebut

(diagnosa, identifikasi hingga pada analisis kebutuhan *stakeholders*) dapat dipadukan dalam satu rangkaian proses “Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)”. AKD merupakan langkah utama dan pertama untuk melakukan diagnosa kebutuhan unit pengguna. Proses ini merupakan tonggak awal bagi penyusunan rancang bangun suatu program diklat secara akurat sehingga dapat mewujudkan diklat yang tepat sasaran, tepat substansi, dan tepat strategi untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Cukup banyak definisi mengenai AKD. Berdasarkan referensi yang ada, BPPK merumuskan pengertian AKD sebagai berikut:

“Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) merupakan rangkaian proses yang sistematis dalam menganalisis kesenjangan/perbedaan antara sasaran dan

keadaan nyata atau diskrepansi antara kinerja standar (yang diharapkan) dan kinerja nyata (yang dimiliki), dimana diklat merupakan salah satu upaya mengatasi gap tersebut”

Bayangkan suatu kondisi dimana terjadi penurunan produktivitas pegawai, tanpa didasari AKD, pegawai tersebut diikutsertakan dalam suatu diklat. Adapun setelah mengikuti diklat tersebut, produktivitas pegawai yang bersangkutan tidak mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan penurunan produktivitas pegawai tersebut bukan dikarenakan kurangnya kompetensi tapi justru beban kerja yang berlebihan.

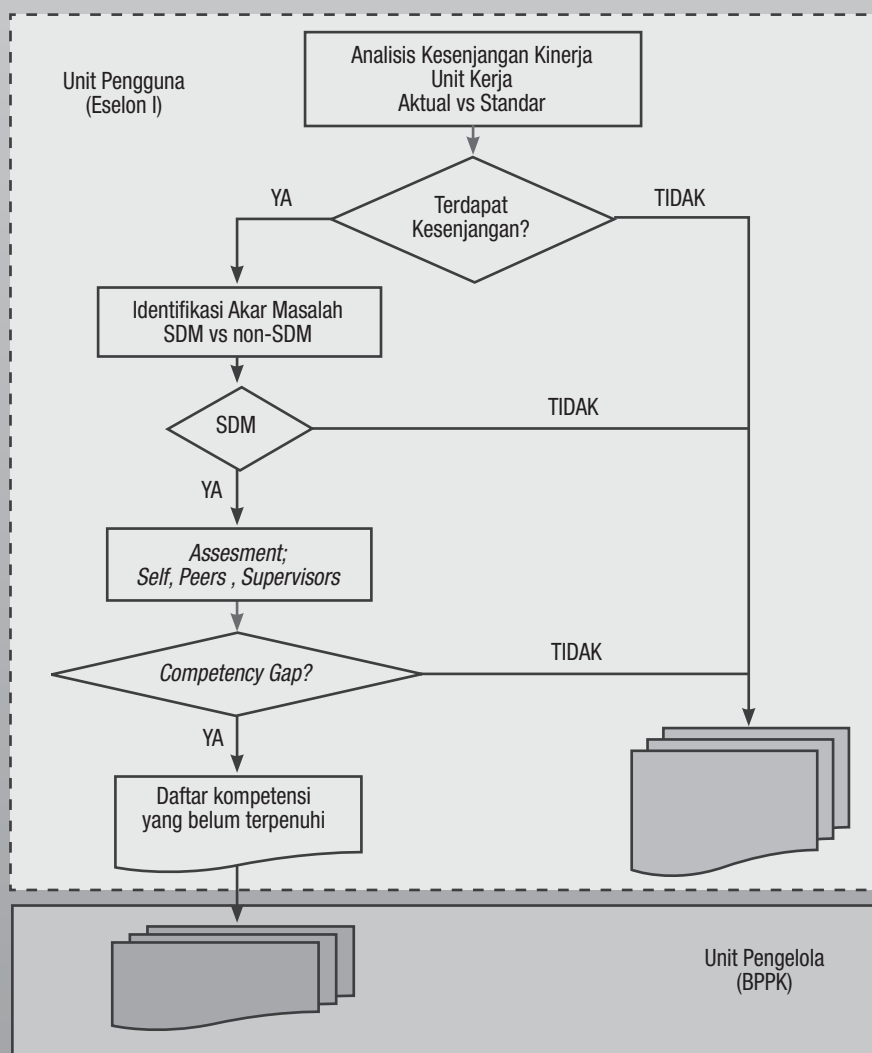
Kasus lainnya adalah ketika didesain suatu program diklat, ternyata diklat tersebut tidak mampu memenuhi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh unit pengguna. Dampak selanjutnya dapat berujung pada keengganan unit pengguna untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan atau mencari penyelenggara diklat lain karena ketidakmampuan BPPK untuk mendesain diklat yang memenuhi kebutuhan kompetensi-kompetensi unit pengguna. Beranjak dari hal-hal diatas, tidak dapat dipungkiri urgensi dari proses AKD.

## BAGAIMANA PROSES ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT?

Merujuk pada definisi yang menjadi rumusan BPPK, analisis kebutuhan diklat tidak serta merta berujung pada diklat sebagai solusi pemecahan masalah. Analisis kebutuhan diklat akan berujung pada solusi-solusi untuk mengatasi kesenjangan kinerja, di mana diklat hanya salah satu dari solusi yang ada.

Secara sederhana, analisis kebutuhan diklat yang berujung pada diklat (yang menjadi tanggung jawab BPPK) merupakan suatu untai proses untuk menjawab pertanyaan berikut :

1. Apakah terjadi kesenjangan antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja aktual yang dimiliki?
2. Jika terjadi, faktor apakah yang menjadi sumber penyebab kesenjangan? SDM atau Non-SDM?
3. Jika faktor SDM, aspek manakah yang perlu dibenahi? Kompetensi atau non-kompetensi?
4. Jika kompetensi, jenis kompetensi



apa sajakah yang perlu ditingkatkan?  
5. Dengan daftar kompetensi yang dibutuhkan, program diklat seperti apa yang perlu dirumuskan?

Idealnya, AKD diawali dengan analisis kesenjangan kinerja unit kerja, yaitu dengan menyandingkan capaian kinerja aktual dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang berpotensi memunculkan kesenjangan antara kinerja aktual dan standar kinerja, antara lain:

- a. Pegawai baru; baik karena proses rekrutmen, mutasi ataupun promosi;
- b. Standar kinerja baru; berimplikasi pada prosedur kerja baru maupun penambahan tanggung jawab;
- c. Terjadinya penurunan kinerja.

Analisis terhadap standar kinerja yang diharapkan dapat menggunakan beragam referensi, diantaranya: uraian jabatan, model kompetensi, sasaran/tujuan organisasi, standar kinerja dan analisis pekerjaan. Referensi apapun dapat digunakan sepanjang referensi tersebut otentik, legal, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, analisis terhadap kinerja aktual dapat menggunakan beragam metode, seperti: observasi, kuesioner, *focus group discussion*, catatan dan laporan, sampel kerja, wawancara, dan tes. Sama halnya dengan referensi, metode apapun yang digunakan harus dapat merepresentasikan populasi dan kondisi yang sebenarnya. Berbagai teorema penarikan sampel, penyusunan daftar pertanyaan, penyusunan alat analisis dan lainnya perlu diperhatikan dengan cermat dan seksama.

Hasil akhir dari analisis kesenjangan kinerja adalah suatu kesimpulan bahwa terjadi atau tidak terjadi kesenjangan kinerja dalam organisasi saat ini. Penarikan kesimpulan akan terjadinya kesenjangan kinerja membawa kita pada langkah berikutnya, yaitu mencari akar permasalahan (SDM atau Non-SDM) dengan:

1. Menentukan permasalahan
2. Mencari faktor-faktor utama yang berpengaruh atau berakibat pada persoalan
3. Mencari dan merinci lebih jauh fak-

tor-faktor yang berpengaruh pada faktor utama

Hasil identifikasi akar permasalahan dengan simpulan SDM sebagai akar masalah menjadi dasar untuk melakukan *assessment* terhadap SDM yang bersangkutan dengan tujuan mengetahui letak aspek permasalahan SDM, kompetensi atau non-kompetensi.

Ketika kesenjangan kinerja berakar dari aspek kompetensi SDM, disinilah BPPK menjadi motor penggerak untuk mengisi kesenjangan kompetensi tersebut. Menjadi suatu tantangan besar bagi BPPK untuk memanfaatkan data-data kebutuhan kompetensi unit pengguna untuk merancang program diklat secara akurat, mengemasnya menjadi program yang *attractive* namun komprehensif.

#### SIAPA YANG MELAKUKAN ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT?

Merujuk pada kompleksitas struktur organisasi Kementerian Keuangan yang identik dengan *holdings company*, unit pengguna (sebagai *stakeholders*) dapat dikatakan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam akan kebutuhan unitnya dibandingkan BPPK (sebagai unit pengelola). Bertitik tolak pada hal tersebut, idealnya, masing-masing unit (termasuk BPPK sendiri) melakukan analisis kebutuhan diklat untuk unitnya. Tujuannya, agar setiap unit senantiasa menyadari kesenjangan yang ada serta merumuskan solusi-solusi yang efektif untuk mengatasinya.

Jika suatu unit diibaratkan sebagai mesin kendaraan, maka pemilik kendaraan tersebut perlu melakukan pengecekan berkala untuk menjaga kekuatan dan akselerasi mesin kendaraan tersebut. Dengan pengecekan berkala tersebut dapat diketahui masalah-masalah yang terjadi (jika terdapat masalah) atau minyak pelumas yang perlu ditambahkan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kekuatan dan kecepatan mesin kendaraan tersebut. Pemilik kendaraan tersebutlah yang paling mengetahui dan memahami kondisi dan stamina dari kendaraan yang dimilikinya sehingga beliau dapat dikatakan yang paling kompeten untuk melakukan pengecekan berkala. Pengecekan berkala mungkin dapat dilakukan

dengan bantuan pihak ketiga tapi dengan tidak lepas dari kemauan, informasi dan koordinasi dengan pemilik kendaraan.

Analisis kebutuhan diklat dapat dianggap sebagai suatu proses pengecekan berkala untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kapasitas, produktivitas dan kinerja dari suatu unit. Untuk itu, pihak yang dianggap kompeten untuk melakukannya adalah masing-masing unit itu sendiri karena masing-masing unit yang mengetahui dan memahami kondisi yang terjadi pada unitnya. Layaknya pemilik kendaraan tadi, masing-masing unit tersebut juga dapat meminta bantuan dari pihak ketiga (termasuk BPPK), namun dengan mengedepankan *willingness*, komitmen, informasi dan koordinasi dari unit yang bersangkutan.

#### APA YANG DIHARAPKAN DARI ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT?

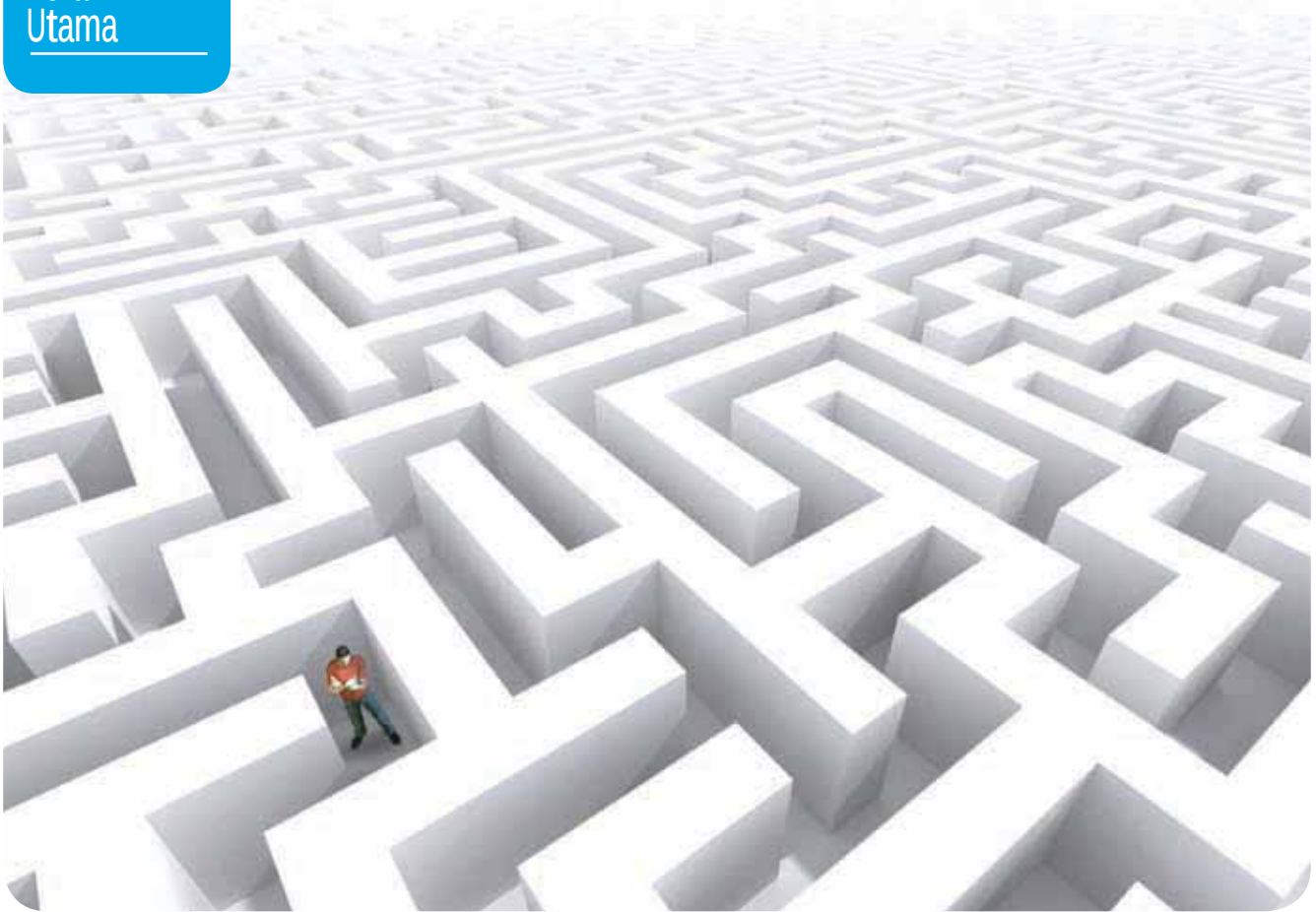
Idealnya, hasil yang diharapkan dari analisis kebutuhan diklat adalah identifikasi akar permasalahan kesenjangan kinerja. Dalam konteks BPPK selaku unit pengelola diklat, hasil yang diharapkan dari analisis kebutuhan diklat ini adalah daftar kompetensi yang dibutuhkan *stakeholders* dan BPPK sendiri untuk merancang program-program diklat yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*.

Tidak berarti bahwa, dalam perancangan diklat, BPPK hanya memanfaatkan daftar kompetensi yang diberikan *stakeholders*. Idealnya, BPPK dapat turut aktif berkoordinasi dengan *stakeholders* ketika *stakeholders* melakukan analisis kebutuhan diklat, lebih tepatnya dapat dikatakan pendampingan terhadap *stakeholders*. Tujuannya agar BPPK memahami persis akan kebutuhan kompetensi *stakeholders* sehingga dapat merancang diklat yang akurat dan sesuai kebutuhan *stakeholders*.

Harmonisasi program diklat dengan kebutuhan unit pengguna menuntut peran aktif kedua belah pihak, *stakeholders* selaku pihak yang memahami kebutuhannya dan BPPK selaku pihak pengelola yang mendesain diklat. *Willingness*, kerjasama, dan koordinasi kedua belah pihak mutlak diperlukan.■

---

\*) Penulis adalah Kabag. OTL dan Pelaksana Bag. OTL



ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT :

# “PROBLEMATIKA, PEMECAHAN DAN TANTANGAN”

OLEH:  
**HENI KARTIKAWATI  
DAN NOVA MARDIANTI**

**K**ebutuhan akan SDM berkualitas merupakan kebutuhan mutlak bagi Kementerian Keuangan. Kompleksitas organisasi Kementerian Keuangan menyebabkan adanya diversifikasi organisasi yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang bermuara pada tercapainya tujuan Kementerian Keuangan.

Bagi Kementerian Keuangan, kehadiran unit Eselon I (BPPK), yang khusus menangani pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan SDM yang kompeten, profesional, dan berintegritas merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disadari oleh kenyataan bahwa kualitas SDM Kementerian Keuangan harus selalu dijaga, ditingkatkan, dan dikembangkan melalui lembaga yang khusus memiliki konsentrasi dan kompetensi khusus untuk itu.

Unit-unit teknis (Eselon I) Kementerian Keuangan dapat “mengeluh” kepada BPPK terkait dengan Kualitas SDM mereka, dan BPPK kemudian akan merespon keluhan mereka tersebut dengan menyediakan program-program pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa program pendidikan dan pelatihan pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas bagi Kementerian Keuangan.

Sesungguhnya yang paling mengetahui secara pasti kondisi masing-masing SDM dari unit-unit teknis adalah unit-unit teknis itu sendiri, sementara BPPK berperan sebagai penyedia pendidikan dan pelatihan keuangan yang dibutuhkan oleh mereka. Oleh karena itu seyogyanya masing-masing unit teknis di Kementerian Keuangan dapat melakukan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) untuk memenuhi kesenjangan kompetensi SDM di kalangan mereka.

Akan tetapi, saat ini, BPPK yang secara aktif berperan dalam mencari tahu sesungguhnya apa yang dibutuhkan oleh mereka. Demikian ini didasari kenyataan bahwa tanpa pengetahuan tentang apa yang dibutuhkan oleh mereka, maka mustahil akan diperoleh suatu program diklat yang akurat. Apabila dikaitkan dengan pelayanan prima BPPK, hal ini wajar dilakukan mengingat program diklat yang sesuai dengan kebutuhan unit pengguna adalah merupakan hal yang terpenting bagi BPPK.

Selanjutnya adalah masalah persepsi terhadap AKD itu sendiri, karena faktanya dalam mencari tahu kebutuhan unit pengguna di tubuh BPPK sendiri terdapat persoalan standarisasi. Artinya selama ini AKD dilaksanakan dengan caranya masing-masing dan parsial sesuai dengan kompetensi dan berbasiskan unit pengguna masing-masing. Hal ini terjadi karena masing-masing unit dalam BPPK (Pusdiklat) memiliki karakteristik khusus, sehingga melakukan AKD dengan cara yang berbeda pula. Akan tetapi, AKD tetaplah harus distandarisasi, disinkronisasi, dan diharmonisasi. Sehingga di antara unit BPPK akan dapat saling bertukar informasi mengenai kebutuhan diklat di masing-masing unit pengguna. Kondisi demikian akan semakin menjadikan AKD efektif dan efisien.

## ANTARA KONSEP DAN REALITA

Dalam tataran konseptual, subjek yang melakukan analisis kebutuhan diklat adalah masing-masing unit teknis Kementerian Keuangan, karena merekalah yang paling memahami kondisi SDM unitnya masing-masing. AKD yang dilakukan oleh unit teknis tersebut kemudian menjadi pijakan awal bagi BPPK untuk mendesain diklat agar sesuai dengan kebutuhan unit pengguna. Tentunya, dengan demikian program diklat yang diselenggarakan oleh BPPK akan akurat.

Pada realitanya, BPPK secara aktif melakukan analisis kebutuhan diklat para stakeholders-nya dengan beragam metode. Beberapa unit teknis BPPK (Baca: Pusdiklat) ada yang mengajukan *kuisisioner*, *survey* atau *tools* sejenisnya untuk mengidentifikasi jenis-jenis kompetensi yang dibutuhkan unit pengguna. Sementara, beberapa unit teknis lainnya melakukan analisis kebutuhan diklat dengan menawarkan menu diklat-diklat yang dimiliki kepada para *stakeholders*-nya.

Hal ini tentu agak berbeda dari konsep analisis kebutuhan diklat. Idealnya, analisis kebutuhan diklat berupaya mengidentifikasi kesenjangan kinerja, mencari akar permasalahan dan merumuskan solusi-solusi yang efektif. Solusi-solusi tersebut belum tentu berwujud diklat, karena diklat hanyalah salah satu dari solusi atas hasil analisis kebutuhan diklat yang dilakukan jika kesenjangan berakar dari kurangnya kompetensi SDM.

## DI BALIK PERAN AKTIF BPPK

Peran aktif BPPK dalam melakukan analisis kebutuhan diklat bukanlah hal yang tidak berdasar. Pertama, didasari bahwa diklat harus sesuai dengan kebutuhan stakeholders-nya, sehingga peran aktif BPPK merupakan upaya untuk meminimalisir ketidaksesuaian antara program diklat yang dirancang dengan kebutuhan

unit pengguna. Kedua, karena masih minimnya kooperasi dan antusiasme dari para *stakeholders*. Permasalahan kedua merupakan permasalahan utama, mengingat yang seharusnya melakukan AKD adalah unit teknis terkait. Sedangkan permasalahan pertama, merupakan persoalan tuntutan bagi BPPK sendiri untuk menyelenggarakan diklat yang berkualitas.

Peran aktif  
BPPK dalam  
melakukan  
analisis  
kebutuhan  
diklat  
bukanlah hal  
yang tidak  
berdasar.

Fenomena ini dapat dipandang dari dua sisi : (i) kurangnya kooperasi dan antusiasme dari *stakeholders* dapat dikarenakan rutinitas *stakeholders* akan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari, sehingga relatif kurang mengedepankan *capacity buiding* SDM-nya. (ii) fenomena tersebut dapat terjadi karena diklat-diklat yang diselenggarakan BPPK kurang mengakomodir kebutuhan *stakeholders* yang berimplikasi negatif pada citra BPPK.

Latar belakang apapun dibalik fenomena tersebut, BPPK dituntut untuk terus menyempurnakan program-program diklat yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders. Untuk itulah BPPK kemudian berlaku aktif melakukan analisis kebutuhan diklat kepada para stakeholders-nya. Beragam cara, metode hingga pada pertemuan harmonisasi program diklat dengan stakeholders terus dikembangkan.

Suatu hal yang dilematis ketika setiap stakeholders diminta untuk melakukan AKD pada unitnya masing-masing, meskipun dengan pembinaan dari BPPK.

#### SUATU RENCANA MENJAWAB TANTANGAN

Realita yang ada menunjukkan bahwa suatu kebutuhan bagi BPPK untuk menstandarisasi proses analisis kebutuhan diklat. Standarisasi seyogyanya dilakukan dengan melakukan penyamaan persepsi akan AKD terlebih dahulu sebelum beranjak pada tahapan selanjutnya.

BPPK sebagai *center of excellence*, dengan diklat sebagai *output* utamanya, dituntut untuk dapat menjadi yang terdepan dalam pengembangan AKD. Dimulai dari penyamaan persepsi dan tujuan AKD di kalangan internal, standarisasi rangkaian proses AKD, hingga pada penyusunan rekomendasi hasil AKD. Inisiasi dapat dilakukan dengan menyelenggarakan AKD bagi BPPK sendiri, kemudian terus beranjak hingga menjadi *best practices* bagi para stakeholders-nya.

Memang bukan hal yang mudah untuk menumbuhkan kesadaran dan willingness para stakeholders untuk melakukan AKD di unitnya. Terlebih, untuk melakukan itu, belum ada landasan hukum yang memberikan arahan bagi stakeholders untuk melaksanakan AKD.

Suatu hal yang dilematis ketika setiap stakeholders diminta untuk melakukan AKD pada unitnya masing-masing, meskipun dengan pembinaan dari BPPK. Hal ini terkait dengan tingkat kooperasi dan antusiasme stakeholders saat ini. Implikasi negatifnya diduga adalah kurangnya keinginan para stakeholders untuk mengikutsertakan SDM-nya dalam diklat BPPK.

Namun, hal ini tidak serta merta mengindikasikan bahwa proses AKD yang diimplementasikan BPPK, dalam artian peran aktif BPPK, harus dilakukan terus menerus. Ke depan, AKD perlu disosialisasikan bahkan diberikan payung hukum agar seluruh pihak mengerti akan urgensinya, bukan untuk kelancaran pelaksanaan diklat BPPK tapi untuk memelihara dan meningkatkan kinerja di unitnya masing-masing.

Pengimplementasian proses AKD seperti yang dilakukan oleh unit-unit teknis BPPK selama ini merupakan suatu solusi temporer untuk meminimalisir diskrepansi antara program diklat yang dirancang

dengan kebutuhan stakeholders. Akan tetapi, hal ini bukanlah Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) tapi lebih tepat dinamakan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD). Namun demikian, standarisasi acuan untuk melakukan proses tersebut tetap diperlukan. Berapa banyak sumber daya yang terbuang ketika satu per satu unit teknis BPPK melakukan IKD kepada stakeholders yang sama? Dapatkah proses tersebut diharmonisasi sehingga koordinasi dengan stakeholders dapat dilakukan oleh unit-unit teknis BPPK secara bersamaan dan simultan?

Sebagai unit yang bertanggung jawab akan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara pada Kementerian Keuangan (khususnya) dan Kementerian-Lembaga lain (umumnya), BPPK memiliki empat pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, yaitu : (i) menyempurnakan proses IKD agar lebih efektif dan efisien sebagai solusi antara dan temporer menuju perbaikan ke depan; (ii) melegalisasi dan mensosialisasi konsep AKD yang melibatkan seluruh stakeholders serta menumbuhkan kesadaran stakeholders akan urgensi AKD dan willingness untuk melakukan AKD bagi perbaikan unit-nya masing-masing; (iii) Menjadi *best practices* akan pelaksanaan AKD dan melakukan pembinaan kepada para stakeholders; dan (iv) Memanfaatkan hasil IKD dan AKD untuk mendesain program-program diklat yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders.

**Internalisasi, legalisasi, sosialisasi dan implementasi konsep analisis kebutuhan diklat akan melibatkan perubahan secara mendasar, dimana hal tersebut memang bukan hal yang mudah, namun bukan pula hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Mampukah BPPK menjawab tantangan guna perbaikan ke depan? ■**

\*) Penulis adalah Kabag. OTL dan Pelaksana Bag. OTL



# Instrumen AKD di Pusdiklat Pajak

OLEH:  
**WAWAN ISMAWANDI**

Secara umum, dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia pada suatu organisasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD). Melalui kegiatan AKD tersebut dapat ditentukan apakah pengembangan SDM tersebut dapat dilakukan melalui diklat atau non diklat.

Sebuah organisasi besar seperti Direktorat Jenderal Pajak, juga melakukan hal yang sama, yaitu melakukan kegiatan analisis kebutuhan diklat dalam rangka menentukan pendekatan pengembangan sumber daya manusia dan meningkatkan kinerja para pegawainya.

Pusdiklat Pajak sebagai lembaga pendidikan yang bertanggung jawab melakukan pengembangan SDM di bidang pajak, melihat kegiatan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal melakukan analisis kebutuhan diklat tersebut sebagai suatu hal yang bersifat simbiosis mutualisme. Maksudnya, sebagian besar diklat-diklat yang nantinya akan diselenggarakan oleh Pusdiklat Pajak dimana penggunanya adalah Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan akan sesuai dengan kebutuhan DJP, karena program diklat disusun atas dasar analisis kebutuhan diklat. Sehingga, Pusdiklat Pajak harus ikut serta dalam kegiatan analisis kebutuhan diklat tersebut.

## Analisis vs Identifikasi

Kegiatan analisis kebutuhan diklat biasanya dilakukan pada semester kedua setiap tahun. Kegiatan analisis tersebut dapat ditujukan untuk penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan pada tahun berikutnya. Direktorat KITSDA Ditjen Pajak

melalui Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai mempunyai tanggung jawab melakukan analisis kebutuhan diklat. Informasi dari berbagai Kanwil dikumpulkan dan dilakukan analisis perlu tidaknya dilakukan diklat untuk peningkatan kapasitas pegawai. Hasil yang diperoleh, biasanya berupa list atau daftar jenis diklat-diklat yang diperlukan untuk tahun-tahun berikutnya, bisa puluhan sampai ratusan jenis diklat.

Pusdiklat Pajak, melalui Subbid Program dan Teknologi Informasi, biasanya juga melakukan hal serupa semacam analisis kebutuhan diklat. Namun bedanya, Pusdiklat Pajak tidak melakukan rangkaian analisis terhadap standar kompetensi pegawai dan *performance* pegawai DJP, tapi melakukan pemilihan dan penentuan jenis diklat yang akan dilaksanakan di Pusdiklat Pajak, berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan atau diskrepansi kompetensi dari Ditjen Pajak. Jadi kegiatan di Pusdiklat Pajak yang terkait dengan program diklat, lebih tepatnya dikatakan sebagai mengidentifikasi kebutuhan diklat bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Tidak hanya itu saja, Pusdiklat Pajak juga mempunyai program-program diklat yang “pasti” dibutuhkan setiap tahunnya oleh DJP. Diklat-diklat tersebut misalnya

diklat bagi pegawai baru yang berasal dari program diploma STAN, yang memang setiap tahun pasti ada lulusannya, diklat jurusita pajak, diklat operator *console*, dan diklat *account representative*. Untuk jenis diklat tersebut, Pusdiklat Pajak selalu mengagendakan kedalam kalender diklat setiap tahunnya.

Dalam menyusun program dan kalender diklat, Pusdiklat Pajak menyusun terlebih dahulu draft program diklat, dimana didalamnya sudah tercantum diklat-diklat “tetap” seperti tersebut di atas, dan dimasukkan juga diklat-diklat hasil identifikasi kebutuhan diklat yang dilakukan bersama-sama dengan Ditjen Pajak melalui beberapa kali rapat koordinasi. Umumnya, diklat-diklat “tetap” tersebut selama ini tidak pernah diganti jenis diklatnya, hanya desain diklat dan kurikulum saja yang terus menyesuaikan dengan kebutuhan terkini. Sehingga “menu” yang ditawarkan oleh Pusdiklat Pajak tidak banyak berubah untuk menu “tetap” tersebut. Untuk diklat-diklat lainnya, hal tersebut dapat terjadi perubahan, karena dalam tahun berjalan, terkadang ada kebijakan-kebijakan baru yang harus segera disesuaikan.

Kegiatan identifikasi kebutuhan diklat di Pusdiklat Pajak juga dapat diartikan sebagai memilah jenis diklat, dan jumlah peserta yang dapat dilakukan oleh Pusdiklat Pajak karena terkait dengan kapasitas asrama, kelas, dan anggaran yang disediakan. Karena dengan anggaran yang ada, tidak semua jenis diklat hasil analisis kebutuhan diklat yang dilakukan oleh DJP dapat dilakukan oleh Pusdiklat Pajak. Sehingga Pusdiklat Pajak harus melakukan identifikasi kebutuhan yang prioritas, kesesuaian dengan kompetensi tenaga pengajar, kapasitas kelas dan asrama. Karena hal tersebut, untuk beberapa jenis diklat, Pusdiklat Pajak juga melibatkan Balai Diklat Keuangan di daerah untuk melaksanakan diklat-diklat pajak yang memang dibutuhkan sesuai hasil AKD di Ditjen Pajak.

Jadi... analisis kebutuhan diklat dilakukan oleh Ditjen Pajak, Pusdiklat Pajak melakukan identifikasi jenis diklat yang dapat dilakukan sehingga sinergi keduanya akan menghasilkan diklat yang efektif... semoga....

\*) Penulis adalah Kasubbid. Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran - Pusdiklat Pajak



# CATATAN SINGKAT: *SHORT-COURSE E-LEARNING* DI JEPANG

OLEH: IQBAL SOENARDI DAN WAWAN ISMAWANDI

Satu hari setelah acara pembekalan yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM-BPPK), Bapak Tony Rooswiyanto, yang turut dihadiri oleh Mr. N. Morimoto dan Mr. Y. Kitamura (konsultan PHRDP III), serta seluruh pejabat dan pelaksana Bidang Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana PPSDM, pada hari Sabtu, 5 Desember 2009 seluruh peserta program non gelar PHRDP III *batch* II yang berjumlah 25 orang akhirnya diberangkatkan menuju Tokyo untuk mengikuti diklat yg bertajuk “*Courseware Development for E-Learning & Classroom Instruction*” selama dua minggu, yaitu mulai dari 7 Desember s.d. 19 Desember 2009, di Temple University, Japan Campus (TUJ).

Sekedar informasi, pada tahun 2008 lalu, PPSDM-BPPK juga telah mengirimkan 30 orang peserta untuk mengikuti program non-gelar sejenis dengan tema *Good Governance* ke Nagoya University, Nagoya. Hingga akhir 2009, PPSDM-BPPK telah mengirimkan dua *batch* dari enam *batch* yang direncanakan dalam rangka *Professional Human Resource Development Project-Phase III (PHRDP III)*. Rencananya, pada 2010, PPSDM-BPPK

akan mengirimkan setidaknya dua *batch* lagi dengan tema diklat yang berbeda.

Rombongan akhirnya sampai di Narita, Tokyo pada tanggal 6 Desember pagi dan dijemput oleh Mr. H. Shozawa dari AsiaSEED selaku konsultan PHRDP III di Tokyo, yang kemudian mengantarkan rombongan menuju penginapan di wilayah Azabu Juban serta memberikan sejumlah penjelasan penting mengenai lingkungan sekitar penginapan dan kampus. Berita baiknya, seperti yang telah disampaikan oleh Mr. Morimoto pada acara pembekalan, kampus TUJ ternyata benar-benar hanya berjarak kurang lebih 5 - 10 menit berjalan kaki dari penginapan, sehingga rombongan tidak perlu berdesak-desakan dengan para pengalju (*commuter*) di *subway*, serta di antaranya terdapat satu gerai *laundry* dan sejumlah kombini (*convenient store*) yang sangat besar peranannya bagi kebutuhan logistik peserta. Mengingat saat itu cuaca cukup cerah meskipun relatif dingin, Mr. Shozawa kemudian mengajak seluruh peserta, yang umumnya baru pertama kali ke Jepang, untuk merasakan pengalaman menggunakan Tokyo Metro Subway menuju Akihabara (yang kemudian menjadi lokasi favorit hampir seluruh

peserta) untuk makan siang.

Pada tanggal 7 Desember, tepat pukul 09.00 pagi *training* dimulai dengan sambutan dari Mr. Jeffrey Y. Kanemoto, selaku Direktur *Corporate Education* TUJ, yang telah bekerja sama secara intensif dengan PPSDM-BPPK sejak beberapa waktu sebelumnya dalam rangka mematangkan kurikulum *training*. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan penghargaan atas kepercayaan Departemen Keuangan c.q. BPPK yang telah memilih TUJ sebagai *host* program non-gelar 2009 ini, serta memberikan sejumlah *overview* mengenai lingkungan kampus serta aktivitas yang akan dilaksanakan oleh peserta *training*, baik di dalam maupun di luar kampus. Sebagai bagian dari fasilitas belajar yang dijanjikan, para peserta juga diberikan hak untuk mengakses fasilitas *wi-fi* milik TUJ yang memiliki kecepatan koneksi yang sangat memuaskan! Pada saat makan siang (*welcome party*), Dean TUJ, Mr. Stonarch, yang turut hadir beserta sejumlah pengajar dan staff TUJ, memberikan sambutan dan ucapan selamat datang pada seluruh peserta, serta secara resmi membuka diklat yang bertemakan *e-learning* ini. Dari pihak peserta, Bapak Eko

Sulityo selaku Ketua Rombongan turut memberikan sambutannya dan menyerahkan cinderamata dari rombongan kepada Dean Stonarch.

Pada minggu pertama diklat, rombongan diberikan sejumlah materi berupa teori dan praktik (*workshop*) seputar teknologi *e-learning*, *Learning Management System* (LMS/LCMS), infrastruktur, dan instructional design dengan instruktur yang umumnya berasal dari TUJ.

Pada kelas Teknologi *E-Learning*, peserta diperkenalkan dengan sejumlah hal penting terkait perkembangan teknologi *e-learning* dari masa ke masa, termasuk *e-mobile* yang merupakan salah satu wujud teknologi di masa depan, yang memanfaatkan *handphone* sebagai sarana belajar/*training*, meskipun saat ini belum *feasible* untuk dilaksanakan secara massal mengingat fasilitas ini masih relatif mahal, setidaknya untuk satu s.d. tiga tahun ke depan. Satu catatan penting, bahwa pada Perang Dunia II, pihak militer Amerika telah memanfaatkan *e-learning* untuk melatih dan menyempurnakan teknik menembak para prajurit Amerika di lapangan. Dengan kata lain, *e-learning* tidak saja dapat dimanfaatkan sebatas untuk materi yang bersifat manajerial, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk materi-materi yang bersifat teknis, seperti sebagian besar jenis diklat yang diselenggarakan BPPK selama ini.

Pada kelas LMS/LCMS peserta diperkenalkan pada sejumlah teknologi yang tersedia di pasar, baik yang *open source* maupun yang *branded* dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Dapat disimpulkan bahwa pilihan untuk mengembangkan sendiri sejumlah fitur LMS/LCMS sebagaimana yang dilaksanakan BPPK selama ini merupakan salah satu pilihan yang cukup bijak, setidaknya aplikasi yang bersifat *custom/tailor-made* ini relatif lebih aman dibanding *open source* sekaligus lebih murah dibandingkan aplikasi *branded*, namun membutuhkan dukungan SDM yang cukup, baik dari sisi kompetensi maupun dari sisi kuantitas.

Materi infrastruktur merupakan salah satu materi yang ditunggu oleh para peserta. "Kecepatan koneksi internet disini berapa ya? kalau dengan kecepatan seperti ini, apapun bisa dilakukan dengan internet...", begitu kira-kira komentar dan

pertanyaan yang ada di benak beberapa peserta pada saat sudah merasakan koneksi internet yang mampu meluncur mulus tanpa gangguan. Sehingga materi infrastruktur merupakan salah satu materi yang ditunggu untuk menjawab rasa penasaran para peserta. Pada kelas infrastruktur kelas ini, selain diinformasikan mengenai tingkat stabilitas dan kecepatan koneksi disana, peserta juga diperkenalkan dengan sejumlah konsep dan teknologi antara lain virtualisasi, *streaming*, *cloud computing*, *teleconferencing*, dan *help desk*. Sebagian besar dari konsep dan teknologi yang dipelajari pada kelas ini pada prinsipnya telah mulai digunakan dan dimanfaatkan oleh BPPK dalam penyelenggaraan diklat berbasis *e-learning*. Namun, mengingat konsep dan teknologi ini relatif sangat baru, khususnya bagi peserta yang berasal dari BPPK, kelas infrastruktur ini dianggap sangat besar manfaatnya. Selain itu informasi mengenai koneksi internet disana, sedikit banyak telah membuka wacana para peserta, bahwa koneksi internet yang baik, dapat menunjang kegiatan *e-learning*.

mengembangkan modul diklat, baik yang bersifat klasikal maupun elektronik sehingga modul-modul yang dihasilkan dapat lebih menarik, efektif, dan efisien sebagai media penyampaian ilmu dan keterampilan bagi para penggunanya.

Dinginnya suhu di kota Tokyo tidak menyurutkan semangat para peserta untuk menghabiskan minggu pertamanya di kota tersebut. Selain mengeksplorasi materi yang telah disampaikan, para peserta juga tidak mau ketinggalan mengeksplorasi suasana seluruh kota Tokyo pada hari Sabtu dan minggu tersebut.

Pada Minggu kedua, para peserta mendapatkan kesempatan untuk menggunakan aplikasi *Final Cut Pro* (FCP) dalam membuat *advertorial*. FCP merupakan aplikasi berbasis Mac yang digunakan BPPK dalam mengembangkan modul-modul elektroniknya termasuk sejumlah video *advertorial* yang saat ini ada. Meskipun, sayangnya, bahan baku (*script*, *video*, *still photo*, dan *music*) untuk pembuatan *advertorial* telah disediakan oleh pihak TUJ, namun hal tersebut tidak mengurangi semangat peserta dalam berkreasi dan berimajinasi.



Pada kesempatan lain, melalui materi *Instructional Design* (kelas *Instructional Design*), para peserta para prinsipnya diajak untuk mempelajari kembali sejumlah konsep mengenai *learning*, *adult learning*, dan pemanfaatan ADDIE *Instructional Model* (*Analyze*, *Design*, *Develop*, *Implement*, dan *Evaluate*) dalam

Dalam *workshop* FCP ini peserta dibagi atas beberapa kelompok dan tiap kelompok masing-masing terdiri atas dua orang dengan kewajiban menghasilkan satu video *advertorial* berdasarkan bahan-bahan yang tersedia. Tidak hanya itu, meski demikian para peserta diperkenankan menambahkan video, foto, atau



musik koleksi pribadi sesuai selera, dan imajinasi dan kreatifitas masing-masing.

*Workshop FCP* ini berlangsung selama dua hari penuh, dimulai dengan sejumlah penjelasan mengenai cara pengoperasian komputer Mac dan sejumlah fasilitas yang dimiliki FCP. Cukup menarik, mengingat antusiasme peserta yang cukup tinggi serta keberanian peserta dalam bereksperimen dengan aplikasi yang relatif baru bagi mereka dan fakta ini sangat mengesankan, termasuk bagi instruktur *workshop* Ms. Hiroko Sumikura.

Hasil yang diperoleh selama dua hari tersebut kemudian dipresentasikan pada hari ketiga oleh tiap kelompok yang kemudian mendapatkan *review* dari instruktur dan asistennya serta dari sesama peserta. Sekali lagi, dengan bahan baku seadanya dan dalam waktu yang sangat singkat, hasilnya sangat mengesankan!! *Bravo!! "Wow... it's great, amazing...."*, beberapa kali kalimat tersebut terucap dari Ms. Hiroko Sumikura dengan bahasa inggrisnya yang khas jepang, menanggapi hasil pekerjaan para peserta. Pada kesempatan yang sama (dan juga pada beberapa kesempatan sebelumnya), wakil dari tim *e-learning* BPPK juga berkesempatan untuk menanyakan sejumlah video *advertorial* yang dibawa dari Jakarta pada sejumlah instruktur TUJ.

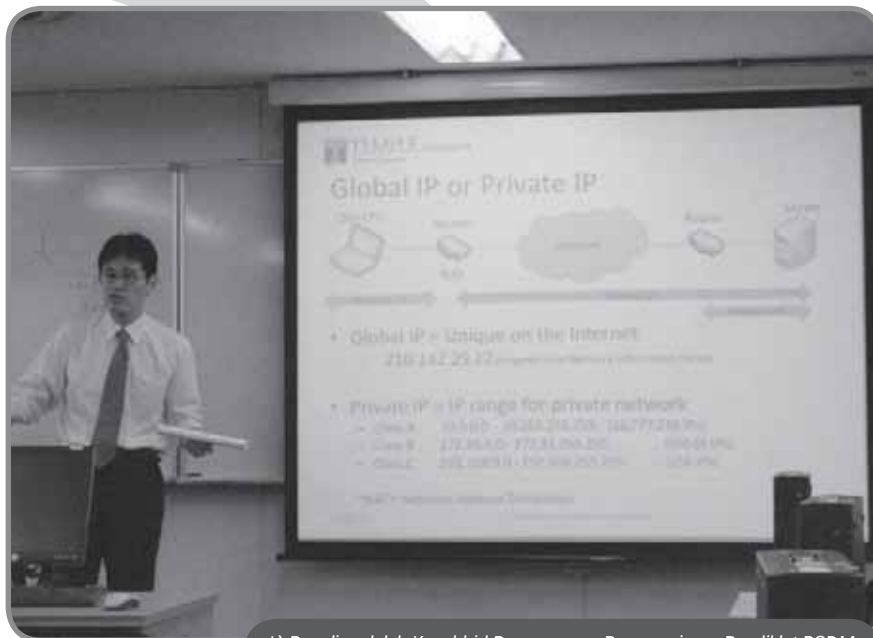
*Training* pada hari itu diakhiri dengan makan siang bersama dan dilanjutkan dengan pembagian sertifikat *Training* yang diserahkan secara langsung oleh Dean Stonarch kepada seluruh peserta, sebelum kemudian dilanjutkan dengan *study-tour* ke sejumlah lokasi seperti Studio Park, NHK dan Odaiba City pada hari berikutnya.

Dari pengalaman yang didapatkan selama *training*, secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sisi teknis dan SDM, BPPK khususnya sudah *on-track* dalam pengembangan dan pemanfaatan *e-learning* dalam penyelenggaraan diklat, baik diklat yang bersifat manajerial maupun teknis. Sejumlah produk *e-learning* yang dihasilkan BPPK secara kualitas sejauh ini tidak kalah jika dibandingkan dengan produk sejenis yang diproduksi oleh pihak asing yang dipresentasikan pada kami pada saat *training*.

Dengan komitmen dan kebijakan jajaran pimpinan dan pola pengembangan SDM internal yang tepat dan terencana, kami yakin BPPK tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk menjadi *player* utama/*leader* di bidang *e-learning*, tidak saja di Departemen Keuangan namun juga di lingkungan diklat aparatur pemerintah pada umumnya.

Semangat dan dukungan dari rekan-rekan yang berasal dari unit-unit teknis, seperti DJP, DJBC, Perbendaharaan, dan Kekayaan Negara yang turut menjadi peserta pada *training* ini untuk bersama-sama mengembangkan *e-learning* di lingkungan Departemen Keuangan cukup membesarkan hati. Semoga semangat rekan-rekan semua mendapat sambutan dari jajaran pimpinan Departemen.

Terima kasih



\*) Penulis adalah Kasubbid Perencanaan Pascasarjana- Pusdiklat PSDM

\*\*) Kasubbid Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran – Pusdiklat pajak

Kabar dari

# “Business Meeting Global Development Learning Network (GDLN) Asia Pacific 2010”




**GDLN**  
ASIA PACIFIC  
Exchanging ideas, know-how and experience

OLEH: ILHAN LASAHIDO \*)

Perhelatan *Business Meeting Global Development Learning Network* (GDLN) kembali digelar dan kali ini mengambil tempat di Makati City, Filipina. Inilah *Business meeting* pertama yang diikuti BPPK semenjak resmi menjadi anggota GDLN. Sebagai anggota GDLN yang berasal dari Instansi pemerintah, kehadiran BPPK memperoleh apresiasi positif dari anggota lain.

21 februari 2010, Penulis dan rekan penulis, Iqbal Soenardi bertolak dari bandara Soekarno Hatta menuju Filipina. Misi yang kami emban tidaklah mudah. Sebagai wakil BPPK yang merupakan anggota baru GDLN, tentunya kami harus mampu membangun citra positif BPPK serta mencari peluang kerjasama yang akan saling menguntungkan dengan anggota jaringan GDLN yang lain.

## Sekilas tentang GDLN.

*Global Development Learning Network* atau GDLN adalah jejaring *knowledge* dan *learning experts* yang difasilitasi oleh sejumlah pusat pelatihan atau *Distance Learning Center* (DLC) dari seluruh dunia. Jejaring ini memanfaatkan *state of art technology* (*Video conference*) sebagai media untuk berinteraksi dalam hal *knowledge sharing*, *dissemination of good practices*, *training*, *brainstorming*, *dialogue* dan *virtual*

*conferencing*. Tak hanya itu, jejaring ini juga didukung fasilitas *event management and logistics* (GEM) yang memadai dengan memberikan akses langsung pada *local*, *regional*, dan *international development centers* di seluruh dunia. Secara umum, jejaring yang didirikan dan dikembangkan oleh *World Bank* ini merupakan representasi dari 3 fungsi, yaitu *physical network* (*Video conferencing facilities*), *people network*, dan *knowledge network*.

GDLN memfasilitasi *video conference* dengan beragam materi, mulai dari *global crisis*, *climate change*, hingga pada perkembangan politik. Selain itu, GDLN juga menghubungkan BPPK dengan institusi-institusi di luar negeri karena GDLN telah terhubung dengan Negara-negara di kawasan Eropa, Amerika utara, Amerika Latin dan Laut kариbia, Asia Selatan, Asia Timur dan Asia Pasifik, Sub Sahara Afrika serta Timur Tengah dan Afrika Utara.

### Video Conference (Vicon) di BPPK

Keterlibatan BPPK dalam jejaring yang memanfaatkan media *Video conference* (Vicon) ini bukanlah tanpa pertimbangan. Dengan sumber daya yang ada saat ini, terdapat keadaan bahwa BPPK sebagai *learning center* Kementerian Keuangan perlu untuk memenuhi dan kebutuhan SDM Kementerian Keuangan yang demikian pesat. Menyadari bahwa penggunaan satu metode diklat saja tidak mampu mengimbangi kebutuhan SDM tersebut, BPPK mengembangkan metode pembelajaran Vicon untuk melengkapi metode diklat tatap muka dan *e-learning* yang telah ada sebelumnya. Diharapkan dengan adanya metode Vicon ini target

BPPK bisa dikatakan selangkah lebih maju dibandingkan anggota lainnya, karena sejak tahun 2008 BPPK sudah mulai mengembangkan penggunaan teknologi multimedia

lam Inherent antara lain sebagai peserta *Stadium Generale* Universitas Indonesia dengan pembicara Prof. Emil Salim. Selain itu BPPK melalui unit STAN juga menyelenggarakan *Stadium Generale* yang menghadirkan Johny Jermias, Ph.D, CMA sebagai pembicara. Beliau merupakan alumni STAN yang kini menjadi Profesor Akuntansi di Simon Fraser University, Vancouver, Canada. *Stadium Generale* ini diikuti pula oleh 7 Universitas di Indonesia melalui media Vicon.

### Anggota Baru, Selangkah Lebih Maju

Perhelatan *Business Meeting* GDLN AP diselenggarakan pada tanggal 22 Februari di *Asian Institute of Management development Resource Center (AIM DevSource)* Makati City, Philippines. Pertemuan yang berlangsung selama 5 hari tersebut, memiliki beberapa agenda utama diantaranya diskusi panel di hari pertama dengan tema "*Transparency and Social Accountability in The asian Contact*" yang dipimpin oleh Prof. Juan Miguel Luz, Associate Dean-AIM Center. Masih di hari pertama, BPPK secara resmi diperkenalkan sebagai anggota baru GDLN-AP. Meskipun *core business* BPPK berbeda dengan anggota lain yang mayoritas Universitas atau LSM, namun apresiasi yang diberikan sangat positif. Hal ini terbukti dengan banyaknya anggota yang mendukung usulan BPPK untuk diadakannya *Professional Management Program Capacity Building Workshop for Distance Learning Centres*. Dengan adanya program ini diharapkan setiap pengelola DLC akan semakin memahami bagaimana mengelolasebuah DLC mulai dari aspek manajemen, pembiayaan, pemasaran program serta hal-hal teknis seperti mengoperasikan dan memelihara peralatan serta *troubleshooting* teknis. Sebagai anggota baru, tentunya BPPK perlu mengetahui hal ini dan ternyata anggota lain pun ingin turut serta dalam program ini.

Di hari kedua, Mr. Philp Karp selaku *Regional GDLN Coordinator, East Asia & pacific, World Bank* memimpin pembahasan mengenai "*Beyond Video Conferencing: Multimedia and GDLN*". Beberapa pembicara turut dihadirkan, diantaranya adalah perwakilan dari

Sesi Video Conference



diklat BPPK untuk seluruh Kementerian Keuangan dapat tercapai secara maksimal. Sementara ini BPPK memiliki 4 alat Vicon yang berada di ruang kelas eksekutif Sekretariat BPPK, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Anggaran dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Ketiga metode yang digunakan BPPK saat ini (tatap muka, *e-learning*, Vicon) bersifat saling melengkapi dan tidak dapat saling menggantikan. Hal ini dikarenakan masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan utama dari fasilitas Vicon adalah kemampuannya untuk dapat dilaksanakan sampai dengan 80 lokasi secara *real time* dengan komunikasi dua arah bagi lokasi-lokasi tertentu yang disepakati.

Dari segi manajemen dan tenaga pengajar, fasilitas Vicon merupakan wahana untuk *capacity building* SDM BPPK sekaligus juga alternatif pemecahan masalah bagi keterbatasan tenaga pengajar. Dari segi bahan ajar, fasilitas Vicon memungkinkan penyampaian bahan ajar aktual. Dari segi fasilitas, Vicon merupakan wahana untuk menghubungkan BPPK dengan instansi dalam dan luar negeri.

Selain tergabung dengan GDLN di tingkat global, BPPK juga terintegrasi dengan jaringan Indonesia *Higher Education Network* (Inherent) yang dapat menghubungkan BPPK dengan 300 PTN dan PTS yang mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia. Beberapa kegiatan yang telah diikuti oleh BPPK da-

Tokyo-DLC, Lucy King dan Bob McDonald. Dari pembahasan tersebut diketahui bahwa GDLN-AP mulai menjajaki pengembangan teknologi multimedia (*e-Learning*) sebagai salah satu fitur layanan yang diberikan, serta penggunaan aplikasi Moodle untuk media interaksi via internet. Teknologi multimedia lebih murah dan lebih mudah diakses, baik oleh *resources persons* maupun peserta tanpa membutuhkan peralatan dan ruangan khusus seperti halnya *Video conference*. Materi dapat disampaikan melalui *Learning Management System* (LMS) dan/ atau dimasukkan dalam DVD/CD untuk didistribusikan kepada seluruh peserta. Sebagian anggota GDLN yang sudah mulai mengembangkan teknologi multimedia ini adalah Tokyo-DLC dan GDLN Australia.

Sebenarnya BPPK bisa dikatakan selangkah lebih maju dibandingkan anggota lainnya, karena sejak tahun 2008 BPPK sudah mulai mengembangkan penggunaan teknologi multimedia dengan media DVD dan LMS pada Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat V (UPKP V) dan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) tahun 2009 lalu.

### Mengail di Business Meeting

Sesuai dengan namanya, "*Business Meeting*", tentunya dalam pertemuan tersebut juga disediakan waktu untuk dilakukan transaksi bisnis antar anggota. Di hari ketiga dan keempat, setiap anggota bertindak selaku tenaga *marketing* yang mempromosikan dan menawarkan program-program Vicon unggulan mereka dengan harapan anggota lain tertarik lalu menjalin kerjasama. Tentunya, karena BPPK masih baru dalam hal ini, belum banyak program yang dapat ditawarkan.

Namun kami tidak kembali dengan tangan hampa. program milik *Tokyo Development Learning Center* (TDLC) menarik minat kami. Program yang dimaksud adalah *Program Rapid Design of e-learning Programs* dimana tentunya sesuai dengan arah pengembangan multimedia yang sedang dilakukan oleh BPPK. Program ini dilaksanakan menggunakan dua metode yaitu metode Vicon selama satu hari dan *online*

*learning* selama 30 hari. Saat artikel ini ditulis, 10 orang pegawai BPPK sedang mengikuti program yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dalam mendesain proses pembelajaran *e-learning* tersebut. Pertemuan hari keempat ditutup dengan tur mengunjungi Fort Santiago dan Plaza San Luis. Sedangkan di hari terakhir Business Meeting dibahas mengenai GDLN *Business Model and funding* serta GDLN *Business Meeting and Funding*.



Salah satu sesi di Business Meeting GDLN-AP

### Behind the scene

Perhelatan selama 5 hari tersebut menyisakan kenangan tersendiri bagi penulis. Efisiensi dan Efektifitas panitia penyelenggara dalam mengorganisir kegiatan yang melibatkan 30 orang berasal dari berbagai negara dirasakan sangat maksimal. Panitia inti yang melayani seluruh anggota hanya berjumlah 3 orang. Tiga orang tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Orang pertama bertindak sebagai *Liaison officer* (LO) yang bertanggungjawab untuk mengatur kebutuhan akomodasi para peserta sejak di Negara asal hingga tiba di Filipina. LO ini juga bertugas mengatur kebutuhan peserta selama mengikuti acara, mulai dari kebutuhan ATK hingga konsumsi. Orang kedua bertugas mempersiapkan kebutuhan infrastruktur serta dukungan teknis selama acara berlangsung. Beberapa hal yang dikerjakannya adalah mempersiapkan peralatan serta jaringan yang digunakan untuk Vicon

sekali menjadi operator Vicon. Sedangkan orang ketiga adalah koordinator yang bertanggung jawab dan mengkoordinasikan kedua orang lainnya. Sungguh efektif dan efisien.

### Video conference (Vicon)

#### Hanyalah Alat

*Video conference* (Vicon) pada prinsipnya adalah alat yang dalam pemanfaatannya membutuhkan biaya dan investasi yang relatif tidak murah.

Mengenai hal ini, rekan penulis, Iqbal Soenardi berpendapat, "Sebagaimana juga teknologi terkait lainnya, besar kecilnya manfaat yang bisa dipetik dari penggunaan teknologi ini amat sangat tergantung pada aspek manusianya". Dibentuknya asosiasi seperti GDLN di tingkat global dan Inherent di tingkat nasional merupakan salah satu bentuk dari upaya memanfaatkan fasilitas ini seluas-luasnya karena teknologi ini tidak dapat digunakan hanya oleh satu user saja tanpa ada user lain di seberang sana untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Pengembangan terencana yang dituangkan dalam *blueprint* lengkap dengan kemasan program yang berkualitas, serta ditambah dengan SDM yang berkompetensi akan menjadi kunci sukses dari penggunaan Vicon di masa depan.

\*) Penulis adalah: Kepala Bidang Renbang  
Pusdiklat Keuangan Umum



PUSDIKLAT KNPK TURUT SERTA MENJADI LOKOMOTIF PENGGERAK  
REFORMASI SDM PEMERINTAH DAERAH:

## ‘PEDULI’ ADALAH BAGIAN DARI REFORMASI

oleh: SUMINI, Ak.

Gerbong-gerbong reformasi telah bergerak. Arah baru menuju Indonesia adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat tak lagi bisa dibendung. Dari rangkaian gerbong reformasi yang telah diluncurkan, “Mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dengan dilandasi oleh tata kelola yang baik (*good governance*) untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi” merupakan gerbong utama dari reformasi.

Tak dipungkiri lagi, gerbong ini akan menjadi penggerak bagi gerbong-gerbong lain sehingga reformasi total untuk menuju Indonesia baru akan terwujud. Lantas, pertanyaannya adalah “apakah gerbong ini mampu melaju?” Atau justru oleng, terseok-seok dan bahkan berhenti sehingga reformasi hanya sebatas teriakan dan harapan yang tak kunjung mampu diwujudkan. Lantas siapa yang harus menjawab? Karena reformasi bukan hanya tugas presiden, bukan hanya tugas gubernur, bukan hanya tugas bupati/walikota, bukan hanya tugas para menteri, bukan hanya tugas para pejabat, bukan hanya tugas pegawai pemerintah tetapi tugas kita seluruh rakyat Indonesia, maka tak ayal lagi, reformasi harus dimulai dari

manusianya; dimulai dari mengubah pola pikir agar gerbong reformasi terus ada yang menggerakkan.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan, salah satu fokus yang sangat penting dan kritis adalah reformasi di bidang pengelolaan keuangan. Perbaikan transparansi dan akuntabilitas keuangan merupakan bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka pemerintah (baik pusat maupun daerah) akan mendapat kepercayaan dan dukungan dari publik, sehingga pemerintah akan bekerja lebih serius dan disiplin. Transparansi dan akun-

tabilitas keuangan diwujudkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang terdiri dari tahapan-tahapan mulai dari (1) perencanaan dan penganggaran, (2) pelaksanaan anggaran, (3) akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran, (4) pengawasan internal, dan (5) pemeriksaan auditor eksternal yang *independen*. Reformasi pengelolaan keuangan ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kebutuhan untuk memperbaiki regulasi, pengawasan pengelolaan keuangan, dan terbatasnya sumber-sumber pendanaan. Bentuk reformasi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah adalah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, berkaitan dengan reformasi pengelolaan keuangan daerah, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang meliputi prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Kemudian diterbitkan pula Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai turunan dari PP Nomor 58 Tahun 2005 yang mengatur mulai dari penjelasan prinsip, fungsi keuangan daerah, kekuasaan keuangan daerah, penyusunan anggaran, perubahan anggaran, penatausahaan keuangan daerah, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 kemudian direvisi oleh Departemen Dalam Negeri (sekarang Kementerian Dalam Negeri) dengan menerbitkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Perubahan manajemen keuangan negara/daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah meliputi pula adanya bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah berupa laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Laporan tersebut harus melalui proses akuntansi, disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan dan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir dan sebelumnya diaudit oleh BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal yang independen dan profesional. Laporan keuangan pemerintah digunakan sebagai alat per-

tanggungjawaban kepada publik. Dengan laporan keuangan tersebut, DPRD dan masyarakat dapat memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintah, memberi dasar untuk mengamati perkembangannya dari waktu ke waktu atas pencapaian target, dan membandingkannya dengan kinerja pemerintah daerah lain. Laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat memberikan informasi yang berguna untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk mengetahui pengaruh investasi dan alokasi sumber dana terhadap pencapaian tujuan operasional. Selain itu, laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk memprediksi aliran kas, saldo anggaran (surplus/defisit), dan kebutuhan sumber pendanaan pemerintah daerah dan SKPD. Laporan keuangan hendaknya memberikan

dan awal 2009, ditemukan bahwa masih sulit bagi aparaturnya di daerah menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Keadaan ini antara lain digambarkan sebagai berikut:

1. Kebanyakan daerah belum sepenuhnya siap dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional sesuai pasal 32 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjadi acuan dalam menyusun dan menyajikan laporan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggung-



jawaban informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, politik, dan sosial. Sebagai wujud transparansi keuangan, pemerintah daerah harus menyajikan informasi pengelolaan keuangan untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada semua *stakeholders* demi menciptakan *well-informed society* dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Aidinil Zetra, SIP, MA, di sepuluh SKPD di delapan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada Tahun 2008

jawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi.

2. Pemahaman staf terhadap teknologi informasi yang masih kurang. Untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada mesti didukung oleh teknologi informasi yang memadai.
3. Pemahaman sebagian besar Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD terhadap mekanisme pengelo-

laan keuangan yang baru sangat kurang. Misalnya, Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib bertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selain itu Bendahara penerimaan pada SKPD wajib bertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Namun kenyataannya banyak Bendahara Penerimaan pada SKPD yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut disebabkan antara lain Pengguna Anggaran belum tanda tangan, Pimpinan kegiatan atau Pimpinan SKPD beranggapan urusan pertanggungjawaban hanyalah tanggungjawab bendahara saja.

Berangkat dari kondisi ini, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK), turut berperan sebagai salah satu lokomotif penggerak reformasi di bidang sumber daya manusia untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia pemerintah daerah dengan menyusun dua program diklat yaitu Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Daerah (PPAKD) dan Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

#### **Materi PPAKD**

PPAKD disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk penyusunan modul yang akan dituangkan dalam bentuk *e-learning*. Materi-materi PPAKD dituangkan dalam sepuluh mata pelajaran, yang pada tahap awal disusun dalam bentuk modul untuk selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk *e-learning*. Mata pelajaran (MP) dan deskripsinya adalah sebagai berikut:

#### **1. MP Paket Perundang-undangan Keuangan Daerah**

Mata pelajaran ini menjelaskan dan membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah mulai dari Undang-undang No. 17 Tahun 2003, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 sampai dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya antara lain: PP 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 tahun 2006 yang telah direvisi dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007.

#### **2. MP Perencanaan dan Penganggaran**

Mata pelajaran ini menjelaskan dan membahas perkembangan dasar hukum perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, esensi perencanaan dan penganggaran daerah, penyusunan dan penetapan APBD serta struktur APBD.

#### **3. MP Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah**

Mata pelajaran ini menjelaskan dan membahas dasar hukum sistem dan prosedur penerimaan daerah, ruang lingkup sistem dan prosedur penerimaan daerah, dan beberapa pengertian terkait sistem dan prosedur, macam/jenis penerimaan daerah, sistem dan prosedur penerimaan kas daerah langsung ke Kas Daerah, sistem dan prosedur penerimaan pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan, sistem dan prosedur penerimaan pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu, sistem dan prosedur penerimaan pendapatan daerah melalui bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos, dan sistem dan prosedur pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran.

#### **4. MP Sistem dan Prosedur Belanja Daerah**

Mata pelajaran ini menjelaskan dan membahas pejabat pengelola keuangan daerah dalam mekanisme belanja daerah, mekanisme belanja daerah dengan Uang Persediaan, mekanisme belanja dengan pembayaran langsung (LS), aspek

perpajakan dalam belanja daerah, dan mekanisme penerbitan SP2D.

#### **5. MP Sistem dan Prosedur Akuntansi PPKD**

Mata pelajaran ini menjelaskan dan membahas sistem dan prosedur akuntansi PPKD, prosedur akuntansi pendapatan dan penerimaan pembiayaan di PPKD, prosedur akuntansi belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan di PPKD, prosedur akuntansi non-kas di PPKD, dan prosedur akuntansi konsolidator.

#### **6. MP Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPD**

Mata pelajaran ini menjelaskan dan membahas sistem akuntansi SKPD, prosedur akuntansi pendapatan di SKPD, prosedur akuntansi belanja di SKPD, dan prosedur akuntansi non-kas di SKPD.

#### **7. MP Akuntansi Keuangan Daerah**

Mata pelajaran ini menjelaskan dan membahas akuntansi dan laporan keuangan pemerintahan, laporan keuangan pemerintah daerah, persamaan akuntansi dan rekening buku besar, siklus akuntansi, akuntansi SKPD, akuntansi PPKD, dan penyusunan laporan keuangan gabungan.

#### **8. MP Standar Akuntansi Pemerintahan**

Mata pelajaran ini menjelaskan dan membahas prinsip-prinsip penyajian laporan keuangan pemerintah, prinsip-prinsip Laporan Realisasi Anggaran, prinsip-prinsip Laporan Arus Kas, prinsip-prinsip Catatan atas Laporan Keuangan, prinsip-prinsip Akuntansi Persediaan, prinsip-prinsip Akuntansi Investasi, prinsip-prinsip Akuntansi Aktiva Tetap, prinsip-prinsip Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, prinsip-prinsip Akuntansi Kewajiban, prinsip-prinsip Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Peristiwa Luar Biasa, dan prinsip-prinsip Laporan Keuangan Konsolidasian.

#### **9. MP Analisa Laporan Keuangan**

Mata pelajaran ini menjelaskan dan membahas alasan perlunya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, jenis laporan keuangan daerah

dan kandungan informasi di dalamnya, maksud dan informasi dalam laporan keuangan daerah, hubungan informasi antar laporan keuangan, kelompok pengguna laporan keuangan dan kebutuhan informasi masing-masing pengguna, karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah, asumsi dasar pelaporan keuangan daerah, prinsip dasar pelaporan keuangan daerah, penerapan teknik analisis vertikal dan horizontal atas laporan keuangan, dan penerapan teknik analisis rasio keuangan yang komprehensif.

#### **10. MP Penatausahaan Barang Milik Daerah**

Mata pelajaran ini menjelaskan dan membahas dasar hukum dan pengertian penatausahaan BMD, tujuan penatausahaan BMD, penggolongan BMD, kodifikasi BMD, jenis-jenis Kartu Inventaris Barang (KIB) dan cara pengisiannya, cara pengisian Kartu Inventaris Ruangan (KIR), pelaksanaan sensus barang, serta pengisian Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris.

#### **Materi DTSS Pengelolaan Barang Milik Daerah**

DTSS Pengelolaan BMD merupakan program diklat yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi SDM pengelola Barang Milik Daerah. Materi-materi dalam program diklat ini dituangkan dalam sembilan mata pelajaran dengan judul dan deskripsi sebagai berikut:

##### **1. MP Pokok-Pokok Pengelolaan BMD**

Mata pelajaran ini menjelaskan dan membahas pengertian dan dasar hukum pengelolaan BMD, landasan pengelolaan BMD, pejabat pengelola BMD, dan siklus pengelolaan BMD.

##### **2. MP Perencanaan, Penganggaran, Pembiayaan, Pengadaan, Penerimaan, dan Penyaluran BMD**

Mata pelajaran ini menjelaskan dan membahas pengertian dan dasar hukum, pihak yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran BMD, kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran BMD, kegiatan yang membutuhkan pembi-

ayaan, proses pembiayaan BMD, pihak yang terlibat dalam pengadaan BMD, tatacara pengadaan BMD, pihak yang terlibat dalam penerimaan BMD, tatacara penerimaan BMD, pihak yang terlibat dalam penyimpanan BMD, pelaksanaan penyimpanan BMD serta fungsi, kegiatan, dan dokumen penyaluran BMD.

##### **3. MP Penatausahaan BMD**

Mata pelajaran ini menjelaskan dan membahas dasar hukum dan pengertian penatausahaan BMD, tujuan penatausahaan BMD, penggolongan BMD, kodifikasi BMD, jenis-jenis Kartu Inventaris Barang (KIB) dan cara pengisiannya, cara pengisian Kartu Inventaris Ruangan (KIR), pelaksanaan sensus barang serta pengisian Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris.

##### **4. MP Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan BMD**

Mata pelajaran ini menjelaskan dan membahas dasar hukum, pengertian dan permasalahan penggunaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMD, pengurusan dokumen kepemilikan, penetapan status penggunaan, ruang lingkup pengamanan BMD, aparat pelaksana pengamanan, tujuan pemeliharaan BMD, sasaran pemeliharaan BMD, dan pelaksanaan pemeliharaan BMD.

##### **5. MP Pemanfaatan BMD**

Mata pelajaran ini menjelaskan dan membahas dasar hukum dan kebijakan pemanfaatan BMD, pengertian dan tujuan pemanfaatan BMD, bentuk-bentuk pemanfaatan BMD, dan kebijakan dan prosedur pemanfaatan BMD.

##### **6. MP Pemindahtanganan BMD**

Mata pelajaran ini menjelaskan dan membahas dasar hukum dan kebijakan pemindahtanganan BMD, pengertian dan tujuan pemindahtanganan BMD, bentuk-bentuk pemindahtanganan BMD, dan kebijakan dan prosedur pemindahtanganan BMD.

##### **7. MP Penilaian BMD**

Mata pelajaran ini menjelaskan dan membahas konsep dasar dan pengertian penilaian BMD, analisis

HBU yang meliputi pengertian HBU, kriteria HBU dan penerapan HBU, prinsip-prinsip penilaian, proses penilaian dengan metode pendekatan data pasar, metode pendekatan biaya, dan metode pendekatan pendapatan.

##### **8. MP Penghapusan BMD**

Mata pelajaran ini menjelaskan dan membahas dasar hukum dan pengertian penghapusan BMD, tujuan penghapusan BMD, siapa yang memiliki wewenang melakukan penghapusan BMD, dasar pertimbangan/alasan penghapusan BMD, tatacara pembentukan panitia penghapusan BMD, kondisi barang yang dihapuskan dan tindak lanjut penghapusan BMD, tatacara pengajuan usul penghapusan BMD, dan proses penghapusan BMD.

##### **9. MP Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD serta Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**

Mata pelajaran ini menjelaskan dan membahas pengertian dan dasar hukum pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMD, pejabat pelaksana pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMD, mekanisme pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMD, pembentukan majelis pertimbangan TGR, proses TGR, dan pelaporan TGR.

Penyusunan kedua program di atas telah sampai pada tahap pelaksanaan seminar modul dan sedang menunggu hasil revisi modul yang telah diseminarkan. Seluruh kegiatan penyusunan modul untuk kedua program tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada pertengahan 2010, sehingga nantinya dapat diproses lebih lanjut dalam bentuk *e-learning* BPPK. Besar harapan, program ini sebagai bentuk kepedulian akan peningkatan kualitas SDM yang akan menggerakkan reformasi karena reformasi tidak hanya tugas pihak-pihak tertentu tetapi tugas kita semua, sehingga reformasi merupakan langkah nyata dan tidak hanya sebatas teriakan dan harapan yang tak kunjung mampu diwujudkan.

\*) Penulis adalah: Widyaiswara Pusdiklat KNPk



# TUTORIAL ONLINE

OLEH: HARIS NUR BAMBANG DAN SONY HARTONO

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa *e-Learning* merupakan salah satu dari 7 produk unggulan BPPK. *e-Learning* merupakan sistem pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi elektronik dimana peserta diklat tidak perlu mengikuti sistem pembelajaran secara klasikal. Keunggulan *e-Learning* yaitu dapat mempersingkat waktu pembelajaran dan menghemat biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu program diklat. Salah satu metode yang digunakan dalam menerapkan *e-Learning* adalah *tutorial online*.

Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), selaku unit eselon II di bawah naungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), turut mendukung program 7 produk unggulan BPPK, terutama sistem *e-Learning*. Pusdiklat PSDM sebelumnya telah menerapkan sistem *e-Learning* dalam salah satu program diklatnya, yaitu Diklat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tk. V. Namun, penerapan ini belum 100% dilaksanakan. Pada tahap awal, yaitu pada tahun 2009, Pusdiklat PSDM mengganti bahan ajar yang berupa modul menjadi CD *e-Learning* yang dibagikan kepada seluruh peserta diklat UPKP Tk. V dan membagikan mo-

dul berupa *e-Book* yang diletakkan di *Learning Management System* (LMS) di *website* BPPK, dan tetap mengadakan tutorial klasikal. Untuk UPKP Tk. II, IV, dan VI, Pusdiklat PSDM hanya membagikan modul kepada peserta diklat tanpa mengadakan tutorial klasikal.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-009/PP/2009 tentang Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan, Pusdiklat PSDM diharuskan menerapkan sistem *e-Learning* pada seluruh program Diklat UPKP dan metode yang digunakan adalah Tutorial *Online*. Dalam pelaksanaannya, mulai tahun 2010 ini Pusdiklat PSDM mengganti

seluruh bahan ajar yang berupa modul menjadi CD *e-Learning* untuk jenjang Diklat UPKP Tk. V dan VI, dengan tetap meletakkan modul berupa *e-Book* di LMS untuk semua jenjang Diklat UPKP.

## Tahapan-tahapan menuju Tutorial Online

Pusdiklat PSDM pada tahun 2010 ini akan memulai untuk melaksanakan *tutorial online* sebagai pengganti dari metode klasikal Diklat UPKP. Pelaksanaan *tutorial online* direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 12 April sampai dengan 7 Mei 2010. Kaitannya dalam persiapan *tutorial online* yang akan datang, berikut tahapan-tahapan yang

telah dilakukan oleh Pusdiklat PSDM:

### 1. Tahap Perencanaan

Dalam tahap ini Pusdiklat PSDM bekerjasama dengan Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sekretariat BPPK merencanakan model yang cocok bagi implementasi *tutorial online*. Pembelajaran ke Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan juga telah dilakukan untuk mempelajari pengalaman mengenai perencanaan hingga pelaksanaan Diklat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) yang terlebih dahulu meng-

### 3. Tahap persiapan

Dalam persiapan menjelang *tutorial online* ini, Pusdiklat PSDM bekerjasama dengan Bagian TIK mengadakan pelatihan bagi para pelaksana yang akan menjadi administrator pelaksanaan *tutorial online*. Dalam tahap ini, konten yang akan digunakan dalam tutorial online juga di-upload ke halaman LMS. Desain LMS untuk *tutorial online* UPKP juga sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga diharapkan peserta akan mudah dalam mengakses LMS.

Fasilitas-Fasilitas dalam *Tutorial Online*

#### 1. Video Streaming

Peserta bisa mengakses video *streaming* yang menampilkan video tutorial dari para widyaiswara maupun film pendek mengenai simulasi pembelajaran yang mudah dipahami oleh peserta.

latihan sebelum menjalani ujian.

Ke depan, fasilitas kuis ini akan dikembangkan menjadi sarana penugasan *online* pra ujian. Namun sementara ini fasilitas kuis ini hanya diperuntukkan untuk latihan-latihan soal.

Dalam *tutorial online* UPKP 2010 ini, Pusdiklat PSDM memberikan pilihan bagi peserta untuk mengikuti *tutorial online* atau tidak, dikarenakan jumlah peserta yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia memungkinkan masih ada peserta yang belum mempunyai akses internet yang cukup bagus. Oleh karena itu bagi Peserta yang berminat mengikuti *tutorial online* diharuskan konfirmasi keikutsertaan dengan mengirimkan *email* konfirmasi ke Pusdiklat PSDM.



gunakan metode *tutorial online*. Dalam perencanaan ini Pusdiklat PSDM memutuskan untuk menggunakan portal LMS, yang disediakan oleh Bagian TIK, yang berbasis aplikasi Moodle untuk model *tutorial online*-nya.

### 2. Tahap Sosialisasi

Dalam tahapan ini Pusdiklat PSDM telah menyelenggarakan Seminar *tutorial online* UPKP bagi para pengajar. Dalam seminar ini disosialisasikan rencana penerapan *tutorial online* UPKP kepada para Pengajar yang rencananya menjadi narasumber di *tutorial online*. Pada kesempatan tersebut Para pengajar dilatih untuk mengakses halaman LMS untuk UPKP. Fitur-fitur yang ada dalam LMS juga merupakan materi yang diajarkan penggunaannya dalam seminar tersebut. Dalam tahap ini juga akan dilakukan sosialisasi kepada peserta diklat, dimana saat ini Pusdiklat PSDM sedang membuat Pedoman Umum mengenai Penyelenggaraan *tutorial online* terutama panduan dalam pelaksanaan *tutorial online* bagi peserta.

#### 2. E-book

Peserta dapat mengunduh e-Book semua mata pelajaran diklat yang berupa file PDF.

#### 3. Chat

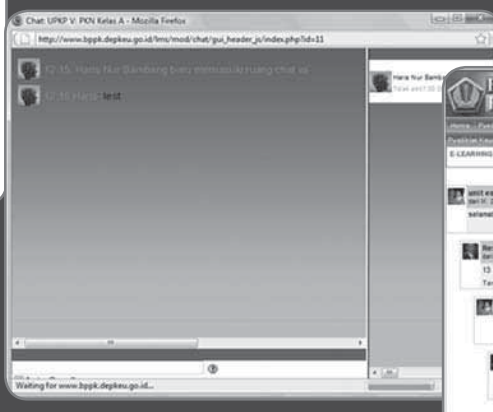
Fasilitas ini memungkinkan peserta berdiskusi secara *online* dengan widyaiswara pada jadwal yang telah ditentukan.

#### 4. Forum

Fasilitas ini memungkinkan peserta untuk mengirimkan pertanyaan secara *offline* dan berdiskusi dengan widyaiswara maupun peserta lain secara *offline*.

#### 5. Kuis

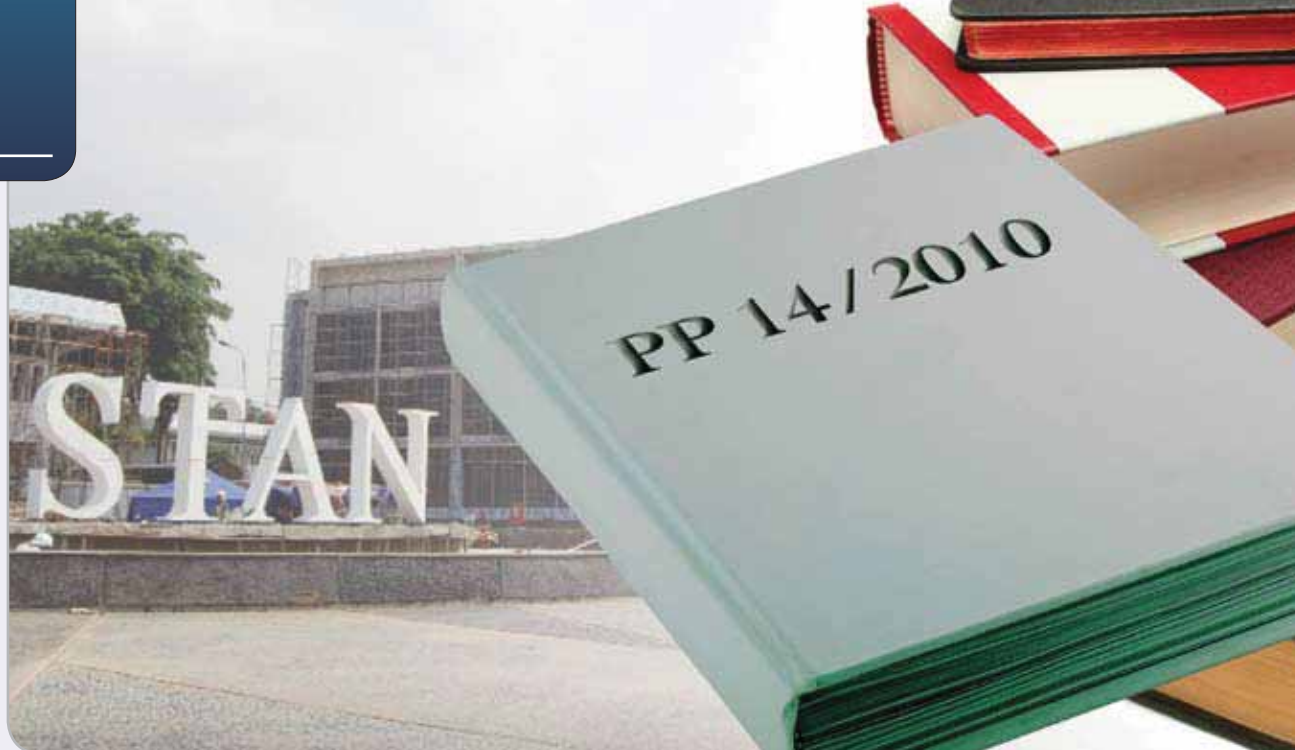
Peserta bisa menjawab kuis-kuis yang ada dalam LMS sebagai



Beberapa fasilitas yang terdapat di dalam *Tutorial Online*

Guna memperlancar pelaksanaan *tutorial online* nantinya dan agar nanti saat peserta berdiskusi dengan widyaiswara terlibat aktif, maka Pusdiklat PSDM mewajibkan semua peserta UPKP baik yang ikut *tutorial* maupun yang tidak untuk mengerjakan tugas Pra Ujian yang harus dikirimkan jawabannya melalui *email* sebelum hari pelaksanaan *tutorial online*. Sehingga diharapkan nantinya waktu *tutorial online* yang terbatas akan lebih efektif guna pembelajaran peserta.

\*) Penulis adalah: Pelaksana Pusdiklat PSDM



\*(Pada saat penulisan belum ada keputusan penolakan terhadap UU 9/2009 tentang BHP oleh Mahkamah Konstitusi)

# PP 14/2010 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

OLEH: KUSMANADJI\*)

Sejak dindangkannya UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), terjadi kegundahan, jika bukan kegaduhan, di kalangan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK). Ini terutama karena pada Pasal 29 disebutkan tentang Pendidikan kedinasan yang dalam penjelasannya didefinisikan sebagai pendidikan profesi setelah S1/D-IV, padahal PTK yang keberadaannya sudah berpuluh tahun umumnya menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi (Program Diploma) atau pendidikan tinggi akademik (Program Strata). Pro dan kontra dapat dikatakan mencapai puncak pada tahun 2008-2009 ketika Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Kedinasan (RPP PK) sesuai amanat UU 20/2003 diluncurkan dan dibahas.

Dalam beberapa kesempatan Mendiknas menyampaikan rencana penghapusan PTK. Nafas penghapusan PTK makin dirasakan oleh kalangan PTK ketika RPP PK diluncurkan. Menanggapi RPP ini, dalam berbagai kesempatan APTKI melakukan dialog dan menyampaikan saran/usulan kepada Kemendiknas agar PTK dipertahankan. Di bawah koordinasi Menko Kesra, pembahasan tentang RPP PK selama 2009 diwarnai penolakan dari kalangan PTK. Hingga tahun 2009 berakhir dan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I selesai ma-

sa baktinya, RPP belum terselesaikan. Akhirnya, RPP tersebut disahkan menjadi PP pada Januari 2010 sebagai salah satu capaian program 100 hari KIB II. Dengan diundangkannya PP 14/2010 ini maka pro kontra mau tak mau harus berakhir, dan kini fokus lebih diarahkan pada bagaimana mengimplementasikan PP tersebut. Hal ini telah dimulai dengan rapat koordinasi pada 28 Februari 2010 di Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemendiknas) yang dihadiri oleh Dirjen Dikti/Wamendiknas Fasli Jalal. Dengan perkataan lain, terbitnya

PP 14/2010 berarti bahwa saat ini perjalanan telah sampai pada titik yang tidak mungkin lagi untuk mundur (*point of no return*).

Berlakunya PP 14/2010 mengundang beberapa pertanyaan dan atau keingintahuan sejumlah pihak yang masih berharap akan keberadaan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), khususnya para mahasiswa dan alumni STAN serta pihak-pihak yang berharap memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan gratis sekaligus memperoleh pekerjaan. Tulisan ini mencoba memahami PP 14/

2010 dan implikasinya pada STAN.

#### **Pendidikan Kedinasan Amanat PP 14/2010**

Terbitnya PP 14/2010 memperjelas bahwa pendidikan kedinasan (PK) yang dituju adalah PTK, tidak termasuk pendidikan dan pelatihan pegawai negeri. Sebagai amanat UU 20/2001, pengertian PK dalam PP ini sama seperti yang dijelaskan dalam UU 20/2003. Pendidikan Kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri. Dalam hal ini, yang dimaksud pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana (S-1 atau D-IV) yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Secara ringkas pengertian dan karakteristik PK menurut PP 14/2010 meliputi yang berikut ini.

1. Pendidikan profesi, program pendidikan setelah S-1/D-IV;
2. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Pegawai Negeri/Calon Pegawai Negeri Kementerian;
3. Jalur pendidikan formal (perguruan tinggi) atau nonformal (kursus, diklat & sejenisnya);
4. Beban studi 36 – 40 SKS;
5. Peserta didik hanya PN/CPN Kementerian sendiri dan Kementerian/LPNK lain;
6. Pendidik terdiri atas dosen dan instruktur/widyaiswara;
7. Kurikulum disusun dengan melibatkan asosiasi profesi, mengacu pada standar isi dan berlaku secara nasional;
8. Sertifikat pendidikan berupa sertifikat kompetensi;
9. Akreditasi oleh BAN-PT (jalur formal), oleh BAN-PPNF (jalur non-formal);
10. Evaluasi oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan Mendiknas;
11. Pendanaan dari APBN dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Tampaknya, sebagai pendidikan profesi, PK sama dengan pendidikan profesi seperti PPAK (Pendidikan Profesi Akuntan). PPAK adalah pendidikan setelah S-1 Akuntansi untuk memperoleh gelar profesi akuntan. Program ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memenuhi syarat, dengan beban studi sekitar 36 SKS yang ditempuh dalam 2 semester, dan memberikan sertifikat (bukan ijazah) kompetensi bagi lulusannya agar dapat menggunakan gelar profesi akuntan. Dalam hal PK, maka penyelenggaranya adalah PK Kementerian tertentu untuk menghasilkan SDM dengan profesi tertentu yang dibutuhkan oleh kementerian yang bersangkutan (penyelenggara) dan kementerian lain.

Sebagaimana diketahui, PTK yang selama ini ada menyelenggarakan program pendidikan tinggi vokasi (diploma) atau PT akademik (Strata) dengan peserta didik yang berasal dari lulusan SLTA dari umum dan/atau yang telah menjadi Pegawai Negeri. Dengan demikian PTK tersebut tidak sama dengan PK sebagaimana dimaksud dalam PP 14/2010. Dalam kaitan ini PP 14/2010 (Pasal 24 ayat 1) menyediakan alternatif penyesuaian, yang dikelompokkan ke dalam dua kategori mengacu kepada peserta didik PTK: (1) Pegawai Negeri dan Calon Pegawai Negeri, (2) bukan Pegawai Negeri/Calon Pegawai Negeri. Bagi PTK kategori pertama (peserta didik adalah Pegawai Negeri/Calon Pegawai Negeri) tersedia 4 alternatif (Pasal 24, ayat 1 huruf a), yaitu bahwa satuan pendidikan kedinasan yang bersangkutan:

1. Dijadikan pendidikan dan pelatihan pegawai yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memenuhi kebutuhan akan keterampilan pegawai;
2. Dipertahankan tetap menjadi pendidikan kedinasan yang memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan profesi, spesialis, dan keahlian khusus lainnya;

3. Dialihstatuskan menjadi badan hukum pendidikan, yang kementerian/LPNK yang bersangkutan sebagai pendiri memiliki representasi dalam organ representasi pemangku kepentingan, untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan menengah, pendidikan tinggi vokasi, dan pendidikan tinggi akademik;
4. Dialihstatuskan menjadi badan hukum pendidikan, yang kementerian/LPNK yang bersangkutan sebagai pendiri memiliki representasi dalam organ representasi pemangku kepentingan, untuk memenuhi sekaligus semua kebutuhan sebagaimana dimaksud pada alternatif 1, 2, dan 3.

**Kementerian  
Keuangan  
adalah pendiri  
dan Menteri  
Keuangan  
akan menjadi  
anggota  
Majelis Wali  
Amanat**

Sementara itu, bagi PTK kategori kedua (peserta didik adalah bukan Pegawai Negeri/bukan Calon Pegawai Negeri) tersedia tiga alternatif (Pasal 24 ayat 1 huruf b), yaitu bahwa satuan pendidikan kedinasan yang bersangkutan:

1. Dialihstatuskan menjadi badan hukum pendidikan, yang kementerian/LPNK yang bersangkutan sebagai pendiri memiliki representasi dalam organ representasi pemangku kepentingan, untuk memenuhi kebutuhan sektoral yang berkelanjutan dan memerlukan

pengawasan dan penjaminan mutu yang ketat dari kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan;

2. Diintegrasikan dengan perguruan tinggi negeri tertentu dan setelah integrasi diadakan kerja sama dengan kementerian khusus untuk memenuhi kebutuhan sektoral yang bersifat temporer dan memerlukan pengawasan dan penjaminan mutu yang ketat dari kementerian/LPNK yang bersangkutan;

Dalam 17 tahun, dari 1990 hingga 2007, ada sejumlah inisiatif perubahan/penyempurnaan kelembagaan STAN, namun semua upaya ini kandas

3. Diintegrasikan dengan perguruan tinggi negeri tertentu atau diserahkan kepada pemerintah daerah jika kebutuhan akan pengawasan dan penjaminan mutu yang ketat dari kementerian/LPNK yang bersangkutan rendah.

Selanjutnya ayat 2 Pasal 24 ini menegaskan bahwa penyesuaian harus selesai paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Jadi,

alternatif mana pun yang diambil, pada Januari 2015 semua PTK harus sudah selesai menyesuaikan diri. Jika demikian, bagaimanakah STAN yang merupakan PTK Kementerian Keuangan? Haruskah STAN menyesuaikan diri?

#### Kilas Balik Perjalanan Penyesuaian Kelembagaan STAN 1990 - 2007

Harus diakui kecuali lokasi kampus, bergabungnya program diploma non-akuntansi, dan status saat ini sebagai satuan kerja yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, STAN praktis tidak mengalami perubahan signifikan sejak berdirinya pada 1975. Saat ini organisasi STAN masih sama persis seperti ketika berdiri di tahun 1975, padahal sudah demikian banyak perubahan yang terjadi. Sebenarnya, Badan Diklat Keuangan (BPLK, kini BPPK) dan STAN sendiri sudah menyadari perlunya perubahan kelembagaan STAN. Dalam 17 tahun, dari 1990 hingga 2007, ada sejumlah inisiatif perubahan/penyempurnaan kelembagaan STAN, namun semua upaya ini kandas.

Pada tahun 1990 diajukan usulan penyempurnaan STAN menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan (STIKA). Pada 1995 upaya serupa dilakukan dengan mengemas STAN ke dalam Politeknik Keuangan Negara (Polikeuna), yang setelah ditelaah oleh Badan Pembinaan Politeknik disarankan agar seluruh program pendidikan di BPPK diintegrasikan ke dalam sebuah sekolah tinggi. Upaya-upaya selanjutnya berlangsung dalam kurun 2001 hingga 2007. Misalnya, pada 2001 Menteri Keuangan mengajukan usulan pelembagaan STAN dan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan menjadi Sekolah Tinggi Keuangan (STK). Atas usulan ini, Menteri PAN meminta rekomendasi ke Menteri Diknas yang direspons oleh Mendiknas dengan memberikan tiga alternatif: (1) integrasi ke Universitas Indonesia, (2) diswastakan, dan (3) dijadikan perguruan tinggi dengan status Badan Hukum Milik Negara. Sejak diundangkannya UU 20/2003 tentang Sisdiknas yang kemudian diikuti dengan kontroversi terkait dengan eksistensi PTK, upaya pengukuhan kelembagaan STAN terus dilakukan, hingga pada 2007 Menteri

Keuangan menyampaikan kepada Presiden usulan pengukuhan sekaligus perubahan STAN menjadi Sekolah Tinggi Keuangan Negara (STKN). Pada kesempatan yang terakhir ini usulan tersebut dibahas di Sekretariat Kabinet dan Dirjen Pendidikan Tinggi menyetujui pengukuhan STAN menjadi STKN dalam bentuk Badan Hukum Pendidikan (BHP), hanya sayangnya ketika itu UU tentang BHP belum diundangkan dan masih menghadapi protes dan penolakan.

Dengan terbitnya PP 14/2010, sejauh yang dapat dipahami dari Pasal 24, masih terbuka kemungkinan bagi keberlangsungan STAN, meskipun harus ditransformasikan ke dalam wujud dan status yang baru dan berbeda. Harapannya, bentuk dan status yang baru tersebut tidak saja tetap memiliki khasannya, tetapi juga membuka peluang bagi STAN untuk makin berkembang dan maju.

#### Alternatif Penyesuaian bagi STAN

Untuk program reguler, yaitu Program Diploma I dan III, mahasiswa (peserta didik) STAN berasal dari lulusan SLTA (*fresh graduates*), namun jumlah mahasiswa baru yang diterima adalah sesuai dengan kebutuhan Kementerian Keuangan. Jadi, ketika diterima para mahasiswa belum menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) namun setelah lulus nanti akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Keuangan (dan Kementerian/LPNK lain). Dengan karakteristik peserta didik yang seperti ini, menurut Dirjen Dikti/Wamendiknas Fasli Jalal dalam rapat koordinasi 28 Februari 2010, STAN termasuk satuan pendidikan kedinasan kategori pertama, yang dapat menyesuaikan diri berdasarkan alternatif pada Pasal 24 ayat 1 huruf a. Dengan demikian, bagi STAN tersedia empat alternatif penyesuaian:

1. Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat);
2. menjadi pendidikan kedinasan sesuai dengan PP 14/2010;
3. beralih status menjadi BHP pendidikan tinggi vokasi (dan atau akademik); atau
4. beralih status menjadi BHP yang mencakup sekaligus alternatif 1, 2, dan 3.

Apabila fungsi dan karakteristik STAN saat ini dipertahankan atau dilanjutkan, maka yang paling dekat adalah alternatif 3 atau alternatif 4, yakni beralih status menjadi BHP. Sebagai PTK di lingkungan Kementerian Keuangan, STAN menyelenggarakan program pendidikan vokasi (D-I, D-III, D-IV) untuk memenuhi kebutuhan pegawai jenjang menengah. Mahasiswa (peserta didik) berasal dari lulusan SLTA untuk D-I dan D-III, dan lulusan D-III (dengan pengalaman kerja dua tahun) untuk D-IV. Dengan karakteristik seperti ini, pusdiklat bukanlah lembaga yang tidak tepat mengingat di BPPK sudah ada 6 pusdiklat. Alternatif 2 tentu saja bukan pilihan yang sesuai untuk melanjutkan fungsi STAN karena peserta didiknya adalah pegawai negeri/calon pegawai negeri setelah S-1 atau D-IV.

Dengan beralih status menjadi BHP (alternatif 3), STAN dapat tetap menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi. Bahkan jika dibutuhkan, STAN dapat dikembangkan untuk menyelenggarakan juga program akademik, S-1, misalnya. Alternatif 4 pada dasarnya sama dengan alternatif 3, namun cakupannya lebih lengkap karena STAN juga menyelenggarakan program diklat dan pendidikan kedinasan (profesi). Tentu saja, secara kelembagaan, karena tunduk pada UU 9/2009 tentang BHP, STAN menjadi lembaga yang otonom, terpisah dari BPPK/Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan adalah pendiri dan Menteri Keuangan akan menjadi anggota Majelis Wali Amanat. Dengan perkataan lain, STAN tetap dimiliki oleh Kementerian Keuangan, dan

meskipun berbentuk BHP, pendidikan di STAN diharapkan tetap gratis (bea siswa dari Kementerian Keuangan) dan lulusannya akan diangkat menjadi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan (dan kementerian/LPNK lain yang memesan). Dengan mempertimbangkan ketentuan pada UU 9/2009 tentang BHP, secara ringkas bentuk baru STAN kurang lebih akan tampak seperti pada tabel di bawah ini.

Dalam rapat kerja BPPK yang diselenggarakan pada 3 – 5 Maret 2010, komisi yang membahas PP 14/2010 juga sepakat merekomendasikan alternatif 3 atau 4. Pilihan yang sama juga disarankan oleh Dewan Pengawas BLU STAN dalam rapat Dewan Pengawas BLU STAN tanggal 9 Maret 2010.

\*) Penulis adalah: Direktur - STAN

| STAN SEBAGAI BHP YANG DIMILIKI KEMENTERIAN KEUANGAN RI |                                               |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karakteristik                                          |                                               | Keterangan                                                                                                                                  |
| 1.                                                     | Tujuan                                        | • Memenuhi kebutuhan akan pendidikan menengah, pendidikan tinggi vokasi (Program Diploma), dan pendidikan tinggi akademik (Program Strata). |
| 2.                                                     | Peserta didik                                 | • PNS/CPNS (dan dapat juga dari umum).                                                                                                      |
| 3.                                                     | Posisi Kementerian Keuangan                   | • Pendiri dan memiliki representasi dalam organ representasi pemangku kepentingan.                                                          |
| 4.                                                     | Persyaratan pendirian                         | • Harus memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam UU No.9 thn 2009 tentang BHP.                                                          |
| 5.                                                     | Status (Hubungan dengan Kementerian Keuangan) | • Badan Hukum, independen/otonom dari Kementerian Keuangan (pendiri); Menteri Keuangan adalah anggota Majelis Wali Amanat.                  |
| 6.                                                     | Dasar pendirian                               | • Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Pendidikan Kedinasan menjadi BHP.                                                                  |
| 7.                                                     | Pendanaan                                     | • APBN (Hibah) dan Pendapatan Operasional.                                                                                                  |
| 8.                                                     | Satus dana APBN yang dialokasikan             | • Hibah.                                                                                                                                    |
| 9.                                                     | Status pendapatan operasional                 | • Bukan PNBK.                                                                                                                               |
| 10.                                                    | Pungutan biaya pendidikan                     | • Peserta Didik dapat dipungut biaya, paling banyak 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional.                                                 |
| 11.                                                    | Biaya investasi, beasiswa, dan                |                                                                                                                                             |
| 12.                                                    | bantuan biaya pendidikan                      | • Seluruhnya ditanggung Pemerintah (Kementerian Keuangan) bersama-sama dengan BHP.                                                          |
| 13.                                                    | Biaya operasional                             | • Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung paling sedikit 1/2 (seperdua) biaya operasional.                                           |
| 14.                                                    | Status BLU                                    | • Tidak dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU                                                                                      |
|                                                        | • (status BLU dicabut).                       |                                                                                                                                             |
| 15.                                                    | Kekayaan                                      | • Kekayaan negara yang dipisahkan                                                                                                           |
| 16.                                                    | Peraturan operasional                         | • Anggaran Dasar (Peraturan Pemerintah) dan Anggaran Rumah Tangga.                                                                          |
| 17.                                                    | Investasi                                     | • Dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio dan dapat mendirikan badan usaha berbadan hukum (Perseroan Terbatas).                   |
| 18.                                                    | Audit laporan keuangan                        | • Kantor Akuntan Publik.                                                                                                                    |
| 19.                                                    | SDM                                           | • PNS (dipekerjakan pada BHP); Non-PNS (pegawai BHP).                                                                                       |



# Peresmian Gedung Baru STAN oleh Menteri Keuangan

OLEH: KUWAT SLAMET\*)

Guratan tanda tangan menghiasi prasasti peresmian gedung baru kampus STAN. Prasasti bertanggal 25 Januari 2010 tersebut mengukirkan pula nama si pemilik tanda tangan: Sri Mulyani Indrawati.

Ya, di tengah-tengah kesibukan mengurus peliknya kebijakan fiskal negara ini dan ruwetnya berhadapan dengan anggota Pansus kasus *bail-out* Bank Century, Menteri Keuangan menyempatkan diri untuk hadir di kampus STAN pada tanggal tersebut untuk meresmikan gedung-gedung baru yang kini tengah berdiri kokoh. Semula perhelatan acara tersebut direncanakan pada tanggal 18 Januari 2010. Namun kesibukan Pembantu Presiden di bidang keuangan negara ini menyebabkan acara peresmian tertunda satu minggu dari yang direncanakan semula.

Pagi hari saat acara peresmian, cuaca di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, terbilang tidak terlalu cerah. Maklum, curah hujan di bulan Januari memang masih tinggi. Namun panitia peresmian tetap berkeyakinan seraya berharap acara dapat berlangsung lancar sesuai dengan agenda yang telah disiapkan. Proses penyiapan pun terbilang tidak mudah mengingat acara peresmian dilakukan di luar ruang (*outdoor*) padahal cuaca sulit diprediksi. Oleh karena itu, selain

menyiapkan berbagai ornamen yang diperlukan pada acara luar ruang, panitia menyiapkan pula rancangan *Plan B* sebagai antisipasi atas cuaca yang tidak bersahabat yaitu dengan menyingkirkan *lobby* gedung J sebagai alternatif tempat pelaksanaan acara peresmian yang bersifat *indoor*.

Untuk memberi impresi langsung atas perubahan yang telah terjadi di lingkungan STAN, panitia menetapkan area sekitar bundaran kolam air mancur (*plaza*) yang tepat berada di tengah-tengah dua bangunan kembar (gedung I dan gedung J) sebagai tempat perhelatan peresmian gedung baru. Area ini dipandang memiliki *view* yang representatif. Lagipula, keberadaan dua buah gedung kembar dengan plaza air mancur (yang di tengahnya terpancang huruf S-T-A-N) telah menjadi ikon baru (*landmark*) kampus STAN. Oleh karenanya, kursi para undangan dirancang menghadap ke arah gedung P dan gedung kembar. Panggung peresmian pun didekati tanpa atap agar pandangan para undangan untuk menikmati *view* ikon baru kampus STAN tidak terhalang.

Jarum jam belum tepat menunjuk pada angka delapan saat raungan sirine dari motor *forward rider* yang mengiringi mobil dinas Menteri Keuangan memasuki area kampus. Seketika aroma kebanggaan menyemburat pada diri panitia, pegawai, dan mahasiswa saat orang nomor satu di Kementerian Keuangan ini benar-benar hadir di kampus tercinta. "Sebuah bentuk kepedulian tak ternilai dari sang Bunda kepada kampus ini", gumam salah seorang pegawai kepada panitia.

Karangan bunga sebagai ucapan terima kasih disampaikan oleh perwakilan mahasiswa dan juga perwakilan pegawai sesaat setelah Bu Ani keluar dari mobil dinas. Di saat yang sama, Mars STAN yang dinyanyikan oleh paduan suara mahasiswa bergema mengiringi kehadiran beliau. Selain melibatkan mahasiswa dalam acara peresmian ini, panitia pun mendaulat salah seorang alumni STAN yaitu Edwin "Trio Libels" Manangsang sebagai *master of ceremony*.

\*) Penulis adalah: Kepala Sekretariat STAN

# green & clean

OLEH: ISMOYO SEJATI\*)

Dunia sedang memaksimalkan produktifitasnya, saat itulah alam semesta berkenalan dengan pestisida, insektisida, pupuk kimia termasuk hormon buatan. Untuk beberapa jenak, rekayasa kimiawi itu memberi jeda pada mimpi buruk krisis pangan yang dikhawatirkan penghuni planet biru ini. Dan mimpi buruk krisis pangan sepertinya benar-benar akan berakhir ketika masyarakat agraris menemukan istilah ekstensifikasi pertanian.

**K**onversi hutan menjadi lahan pertanian tak pernah disadari sebagai *deforestasi* hingga akhirnya penghuni bumi merasa gerah dengan iklim global yang merangkak naik.

Cuaca ekstrim dan kepunahan beberapa spesies satwa bukanlah fenomena dadakan melainkan suatu akibat dari proses destruksi lingkungan yang panjang. Pada interval itu, muncul bisikan-bisikan yang menggugah kesadaran akan sistem hidup. Setidaknya itulah yang terjadi pada 1962 ketika burung-burung piaraan di Pennsylvania mati akibat penyemprotan DDT untuk membunuh nyamuk. Momentum itu menginspirasi Rachel Carson untuk menuturkan keprihatinan akan munculnya suatu musim semi yang bisu, yang tanpa kicau burung atau kepak sayap serangga, lalu ia menuliskan "*Silent Spring*".

Kerinduan kepada masa lalu bumi yang hijau dan segar kini telah menjadi

hasrat kolektif warga dunia. Dimulai secara global dengan pencanangan Hari Bumi pada 22 April 1970, gerakan pelestarian alam terus berperang di semua lini dengan perusakan alam yang berdalih menyuplai kebutuhan pangan manusia dan ternak. Saat ini upaya para *environmentalis* menggelorakan Revolusi Hijau telah sampai di tempat-tempat yang diyakini sebagai tempat dimana orang tak sempat memedulikan hijau dan segarnya lingkungan: di kantor-kantor.

*Green and Clean Office* kini menjadi tren kesadaran masyarakat urban pada lingkungan. Di BPPK, perlombaan *Green and Clean Office* (GCO) adalah kepedulian BPPK pada lingkungan pendidikan yang hijau dan bersih. Penilaian GCO, bersama dengan penilaian pengelolaan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi, dimaksudkan untuk menstimulus kinerja unit-unit BPPK.

Penilaian pengelolaan keuangan dilakukan pada tiga aspek yaitu: Penyerapan Anggaran Belanja Barang, Penyerapan Anggaran Belanja Modal dan penghematan langganan daya dan jasa. Sedangkan penilaian atas penggunaan teknologi informasi dilakukan terhadap tampilan web masing-masing pusdiklat/balai diklat. Disini penilaian dilakukan pada tatakelola tampilan berita dan gambar, juga atas pengunggahan modul-modul pada web pusdiklat.

Unsur kepedulian lingkungan merupakan aspek yang paling banyak dinilai dalam gelaran yang telah digulirkan dua kali di BPPK ini. GCO meliputi unsur lingkungan luar kantor yaitu kebersihan lingkungan, rasio luas taman terhadap luas kantor, ketersediaan sarana pengelolaan sampah dan pengaturan resapan air. Sedangkan lingkungan dalam kantor mencakup kebersihan ruang kerja, penataan ruang kerja dan

kerapihan sarana pendukung.

BPPK telah dua tahun terakhir ini menggelar penilaian pengelolaan keuangan, GCO dan pemanfaatan TIK yang dicetuskan melalui Surat Edaran Kepala Badan Nomor SE-014/PP/2008 tentang Penilaian Pengelolaan Keuangan, *Green and Clean Office*, dan Pemanfaatan TIK terhadap seluruh unit kerja di lingkungan BPPK. Surat Edaran tersebut tidak secara eksplisit menyatakan periode penilaian. Hal ini, menurut salah satu anggota tim penilai, menyebabkan banyak unit kerja yang tidak melakukan persiapan khusus. "Penilaian menjadi lebih natural" komentarnya yang enggan disebut nama ini.

Secara umum ide penilaian GCO mendapat apresiasi dari para pegawai. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperjelas dalam penilaian, khususnya menyangkut penilaian lingkungan kantor yang tidak berdiri sendiri atau menjadi bagian dari Gedung Keuangan negara.

Menurut Harmonis Siregar, SH. MKN. Kepala Subbagian Umum Balai Diklat Keuangan Medan, penilaian GCO membuat unitnya giat berbenah. Namun karena gedung BDK Medan masih berada di lingkungan GKN II Medan, pihaknya hanya bisa melakukan hal-hal di dalam kantor. "Berada di lingkungan GKN membuat kami tidak memiliki halaman tersendiri. Yang bisa

---

Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk berpartisipasi menjaga bumi agar tetap nyaman ditinggali.

---

kami lakukan untuk GCO ini setidaknya hanya menambah pot bunga dan kebersihan ruangan kantor saja. Demikian juga toilet dan gudang, ada beberapa kerusakan yang telah kami usulkan perbaikannya kepada GKN Medan" demikian menurut Harmonis.

Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk berpartisipasi menjaga bumi agar tetap nyaman ditinggali. Ditengah kesibukan birokrasi, penilaian *Green and Clean Office* adalah hal kecil yang bila dilakukan dalam skala global akan memberi kontribusi signifikan pada keberlangsungan planet ini. GCO BPPK boleh jadi hanya kemeriahan kecil pada 8 unit eselon II dan 11 Balai Diklat Keuangan semata. Namun kita optimis, seandainya hal ini diketahui oleh Rachel Carson, ia akan tersenyum di dalam pusaranya yang sunyi.

---

\*) Penulis adalah: Kasubbag. Umum  
Kepegawaian – Sekretariat BPPK

Penilaian Pengelolaan Keuangan, *Green and Clean Office*, dan Pemanfaatan TIK terhadap seluruh unit kerja di lingkungan BPPK.

Dalam kunjungan ke salah satu pusdiklat, ia selaku penilai mengobservasi secara detil seluruh area penilaian GCO termasuk gudang, toilet, pekarangan dan selokan. "Tidak adanya persiapan khusus menghadapi penilaian ini membuat kami terkadang menemukan tumpukan puing dan selokan yang kotor. Bahkan secara umum semua unit belum mampu menyediakan biopori. Padahal aspek itu termasuk poin utama penilaian lingkungan luar kantor."



Mulia P. Nasution :

# Intelektual Visioner dari Panyabungan

OLEH: PILAR WIROTAMA

A portrait of Mulia Panusunan Nasution, a middle-aged man with glasses and a mustache, wearing a patterned batik shirt. He is seated at a wooden table with a white mug in front of him. The background is a dark wooden wall with some greenery on the left.

Sosoknya kerap terlihat mendampingi Ibu Menteri Keuangan di berbagai perhelatan. Kiprah beliau di Kementerian Keuangan tidak perlu diragukan lagi. Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003 yang menjadi tonggak reformasi keuangan negara merupakan hasil rumusan tim yang dipimpinnya. Berbagai media telah menampilkan berita mengenai kiprah Intelektual bergelar *Docteur en Droit* asal Mandailing Natal ini. Namun, ini saatnya anda menyimak *Up Close and Personal* seorang Mulia Panusunan Nasution.

**Mulia  
Panusunan  
Nasution**

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

“Yang utama adalah harus menjadi **berguna**, bukan hanya bagi keluarga tapi juga **bagi** sekeliling dan kalau bisa lebih besar lagi yaitu untuk **masyarakat** akan lebih baik”.

Tak lama setelah mengirimkan surat permohonan wawancara, telepon kami berdering dan di ujung telepon terdengar suara mengabarkan bahwa Pak Sekjen bersedia untuk diwawancarai. Namun, meskipun hari dan jam telah ditentukan, kami tetap diminta bersiap jika ternyata ada perubahan mendadak. Dan benar saja, wawancara yang sedianya dilakukan pada 4 Maret jam 4 sore tiba-tiba dimajukan menjadi jam 3, padahal jam di kantor kami menunjukkan pukul 2 siang. Untungnya kami dapat tiba tepat waktu.

Setibanya di kantor beliau, kami diminta untuk menunggu sejenak. Tak lama kemudian kami diantar menuju ruang rapat tepat disebelah ruang kerja Pak Mulia. Mengenakan batik berwarna biru, sore itu Pak Mulia tampak santai dan ramah menerima kami. Beliau bercerita kalau beliau baru saja pulang dari mendampingi Ibu Menteri di rapat paripurna DPR dalam rangka penyelesaian Rancangan Undang-undang Pertanggungjawaban APBN, "Alhamdulillah tadi sudah disetujui menjadi Undang-undang Pertanggungjawaban APBN tahun 2008. Itu akan menjadi Undang-undang pertama untuk Kementerian Keuangan di pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid Dua". Setelah berbincang seputar maksud kedatangan kami, mantan Dirjen Perbendaharaan periode 2004-2006 ini mempersilakan kami untuk memulai wawancara.

#### Berawal dari Madina

Panyabungan, sebuah kota kecil di kabupaten pemekaran Mandailing Natal yang juga dikenal dengan sebutan Madina, menjadi saksi kehidupan Mulia P. Nasution dimasa kecil. Terletak diantara kota Padang dan Medan, di kota inilah Mulia muda mengenyam pendidikan dari Sekolah Dasar hingga SMA. Sebagai anggota keluarga wiraswasta yang memiliki tanah pertanian dan toko kelontong, Mulia muda kerap menghabiskan waktunya dengan menjaga toko orang tuanya sepulang sekolah. Mandailing Natal bukan kabupaten biasa, tercatat beberapa tokoh juga berasal dari kota ini. Sebut saja Alm. AH. Nasution, Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, dan tentunya Mulia P. Nasution sendiri.

#### IIK By Accident

Selepas SMA, Mulia muda sebenarnya ingin melanjutkan pendidikan dengan mengambil jurusan kedokteran. Namun anak keempat dari sembilan bersaudara ini menyadari bahwa keinginannya hanya akan membebani kedua orangtuanya yang saat itu harus membiayai kuliah ketiga orang kakaknya yang berkuliah di Medan. Setelah sempat bekerja beberapa bulan di suatu perusahaan swasta di Medan, Mulia muda pun pamit untuk merantau ke tempat pamannya di Jakarta, berharap ia dapat melanjutkan pendidikannya disana atau mungkin langsung bekerja.

Satu tahun berlalu tanpa kepastian sejak Mulia muda menyelesaikan SMA-nya karena ia sendiri masih bimbang memilih jurusan untuk kuliah. Namun tak berarti ia menyia-nyiaikan hari-harinya, ia tetap tekun belajar dan bersiap diri.

Tawaran untuk bekerja di Kupang tiba-tiba datang dari pamannya yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai. Tak muluk-muluk, pamannya hanya berjanji akan mengusahakan agar ia dapat bekerja di suatu perusahaan disana. Bersama pamannya, Mulia muda berangkat ke Kupang. Seminggu berselang, di Koran Suara Pembaharuan kala itu terpampang pengumuman seleksi saringan masuk Institut Ilmu Keuangan (IIK). "Kamu tertarik tidak?" tanya pamannya kepada Mulia muda. Melihat karir pamannya yang tampak mapan, ia pun mulai tertarik. Namun ada sesuatu yang menggagangnya, yaitu tes tersebut diselenggarakan di Jakarta, artinya ia harus kembali ke Jakarta. "Bagaimana kalau nanti tesnya tidak berhasil?" tanya Mulia muda, "Ya balik lagi saja kesini" jawab pamannya ringan. Tanpa tahu sedikitpun mengenai IIK, ia kembali ke Jakarta demi mengikuti seleksi di Stadion Senayan. Tes tertulis, fisik dan psikotes pun diikutinya. Saat tes wawancara ia memilih Bea Cukai sebagai bidang jurusannya. "Saat itu yang saya tahu hanya Bea Cukai" kenang Pak Mulia. Namun takdir berkata lain, ia diterima di jurusan Kebendaharaan Umum. Jadi apa yang membuatnya ingin melanjutkan pendidikan ke IIK?, beliau menjawab, "by accident (tidak sengaja-red) kali ya" jawabnya sambil berkelakar. Namun ketekunan beliau selama setahun sebelumnya tentunya menjadi bekal yang penting saat menghadapi "ketidak-sengajaan" itu.

Namun hal tersebut tidak lantas membuatnya terkucilkan, terbukti dengan terpilihnya ia menjadi Ketua kelas saat kuliah dulu. Sejak itu, Mulia muda mulai terlibat aktif dalam berbagai kegiatan di kampus baik itu kegiatan akademis, seni dan olah raga.

Pak Mulia sangat menyukai musik, hal itu pula yang mendorongnya untuk turut dalam Group musik saat di IIK. "Nama grupnya Otorisator" kenang beliau. Nama Otorisator diambil dari nama di



Foto Bapak Mulia P. Nasution muda, tahun 1971

**Sebagai anggota keluarga wiraswasta yang memiliki tanah pertanian dan toko kelontong, Mulia muda pun kerap menghabiskan waktunya dengan menjaga toko orang tuanya sepulang sekolah.**



Pak Mulia (Baris atas, ketiga dari kiri) bersama teman-teman pada acara perpisahan alumni IIK KU. Tahun 1981 di Cisarua, Bogor

sistem Perbendaharaan. Group musik ini sempat tampil pada acara wisuda di Balai Sidang Jakarta. Pak Mulia mengisahkan bahwa saat tampil di Balai Sidang Jakarta mereka mempersiapkan kostum dengan serius layaknya artis-artis profesional. "Kita pakai celana putih dan jas" tutur beliau bangga. Adapun beberapa anggota lain yang dulu turut bergabung adalah Alm. Pak Achmad Rochjadi (mantan Dirjen Anggaran) dan Pak Sudjaswikno yang kini sudah pensiun dari DJPU. Mereka sering memainkan tembang-tembang milik The Beatles lengkap dengan meniru gaya berpakaian dan gaya rambut The Beatles kala itu. "Kita potong rambut di poni", cerita Pak Mulia mengenang masa SMA-nya.

Meskipun dunia keuangan sangat berbeda dibandingkan dengan dunia kedokteran yang menjadi cita-citanya, Pak Mulia tidak mengalami kendala yang berarti. "Enjoy aja" ujarnya singkat. Beliau tak lupa menyampaikan harapannya terhadap STAN yang dulu bernama IIK, "Seharusnya (STAN-red) itu menjadi *center of excellent* untuk pendidikan atau pembentukan (para-red) profesional di bidang keuangan. Kalau menurut saya tidak hanya di sektor publik tapi juga bisa untuk perbankan, asuransi dan pasar modal". Beliau juga berharap agar setiap alumni STAN, selain memiliki sikap profesional juga tetap menjaga integritas sehingga tidak mencederai reputasi STAN.

### Tuntutlah Ilmu hingga ke... Paris

Saat menyusun skripsinya pada tahun 1980, pria kelahiran 27 Agustus 1951 ini memilih bidang IT (*Information Technology*) sebagai tema skripsinya. "Saya melihat dan memperkirakan bahwa kedepan IT itu akan semakin berperan dalam mendukung pelaksanaan fungsi manajemen keuangan di pemerintahan" ucapinya. Kebetulan pembimbing beliau kala itu, Alm. Pak Kosasih, Direktur Tata Usaha Anggaran yang juga membawahi pengolahan data di Ditjen Anggaran tertarik dengan bidang yang dipilih Pak Mulia.

Setelah lulus, Pak Mulia ditempatkan di Subdit Pengumpulan Data di Bandung, berbeda dengan teman-temannya yang ditempatkan di Kantor Perbendaharaan Negara dan Kantor Kas Negara. Subdit Pengumpulan Data merupakan *IT Center* Ditjen Anggaran kala itu. Dengan bangga beliau menceritakan, "*IT Center* di Ditjen Anggaran itu boleh dibilang perintis (IT-red) di Departemen Keuangan."

Pak Mulia adalah orang yang sangat mementingkan pendidikan. Keinginannya untuk melanjutkan pendidikan, terutama di luar negeri membuatnya terus mencari informasi mengenai beasiswa. Padahal saat itu, melanjutkan sekolah terutama ke luar negeri merupakan hal yang tidak populer. "(melanjutkan sekolah-red) dianggap kurang menarik, sudah selesai sekolah (IIK-red), sudah bekerja dan ada kesempatan mendapat

jabatan kok malah belajar lagi", tutur beliau menceritakan pendapat orang lain kala itu tentang keinginannya melanjutkan sekolah.

Keberuntungan menghampiri dirinya saat Perancis menawarkan beasiswa bagi pegawai Departemen Keuangan. Meskipun beasiswa yang ditawarkan adalah beasiswa *non degree* dimana tidak ada jaminan untuk memperoleh gelar S2 sepulang dari sana, beliau pun tidak lantas mengacuhkannya.

Setelah lulus seleksi, beliau berangkat ke Perancis dan menempuh program *non degree* di Institut International d'Administration Publique (IIAP) dengan mengambil jurusan Manajemen Anggaran dan Keuangan. Di bulan ketiganya di Perancis, Universitas Paris II membuka kesempatan seleksi beasiswa S2. Beliau pun lalu mendaftar untuk mengikuti seleksi tersebut dan memilih Administrasi Publik sebagai jurusannya dengan fokus IT. Bukannya tanpa alasan beliau memilih jurusan itu, "Pada saat awal Orde Baru, masalah kita terutama yang sangat mendesak yaitu 'perut'. Pak Harto kemudian menekankan pada pembangunan Ekonomi. Dengan semakin banyak dana pemerintah yang dikelola, manajemen menjadi penting. Manajemen adalah bagian dari administrasi" beliau menjelaskan.

Menyadari pengetahuannya mengenai bidang administrasi publik masih minim, Pak Mulia lantas mulai melahap bu-

ku-buku mengenai administrasi publik, dan keberuntungan menghampirinya sekali lagi. “Kalau dipikir-pikir banyak keberuntungan. Kebetulan pada saat itu saya membaca buku hubungan antara politik dan birokrasi, ternyata pertanyaan yang ditanyakan (saat seleksi-red) tentang itu juga”, kenang Pak Mulia.

Kuliah *non degree* di IIAP dan S2 di Universitas Paris II dijalannya dengan tekun hingga beliau bisa menyelesaikannya dengan baik.

Tak puas dengan hanya memperoleh gelar S2, Pak Mulia pun kembali mengajukan proposal untuk melanjutkan pendidikan S3. Pada saat hendak memilih tema untuk proposalnya beliau teringat pada perkataan dosennya saat di IIK dulu, “Keuangan Negara itu gado-gado. Saat di tingkat satu dulu, Alm Pak Gunadi bilang, apakah Keuangan Negara itu ilmu atau bukan? Ada pendapat yang mengatakan Keuangan Negara itu bukan ilmu, tapi merupakan kumpulan dari ilmu-ilmu yang sudah ada yaitu Manajemen,

ICW (*Indische Comptabiliteitswet*), maka akhirnya beliau pun mengajukan proposal dengan judul “Bingkai Hukum Keuangan Negara di Indonesia” yang secara khusus mengkaji peran dan prinsip-prinsip dari suatu Undang-undang organik atau Undang-undang Pokok. Tak berlebihan kiranya jika menyebut Pak Mulia sebagai Visioner sejati, mengingat kemampuan imajinasi dan wawasannya untuk membaca kondisi serta peluang-peluang yang ada di masa depan dalam setiap langkah dan keputusannya.

Meskipun proposalnya disetujui, pemerintah Perancis ternyata tidak menyediakan dana untuk melanjutkan pendidikan S3, namun mereka berjanji untuk mengajukannya ke perusahaan Total CFP. Selama menunggu keputusan dari Total CFP beliau pun harus memutar otak untuk membiayai kehidupannya di sana. Selain memanfaatkan tabungan yang beliau miliki di Indonesia, Pak Mulia pun sempat mengajar bahasa Indonesia bagi sebuah keluarga yang akan

kelak menjadi istri beliau. “Seperti biasa, kalau ada pejabat (Indonesia-red) datang memberikan ceramah, semua mahasiswa (asal Indonesia-red) dikumpulkan lalu berkenalan” cerita Pak Mulia. Pada waktu berkenalan, Pak Mulia sedang berkuliah di Universitas Paris II sedangkan Ibu Tetty hampir menamatkan program S2-nya. Setelah tamat S2 Ibu Tetty kemudian kembali ke Indonesia. Komunikasi jarak jauh sempat dijalani oleh Pak Mulia dan Bu Tetty. Di masa menunggu pengumuman beasiswa dari Total CFP, Pak Mulia memutuskan kembali ke Indonesia untuk menikah dengan Ibu Tetty. Tak disangka, disaat yang bersamaan Total CFP menyetujui permohonan beasiswa Pak Mulia. “Itu seperti hadiah pernikahan” kata Pak Mulia. Setelah menikah, Pak Mulia dan Bu Tetty pun kembali ke Perancis. Pak Mulia berhasil menamatkan pendidikan S3-nya dengan predikat *Tres Honorable*, gelar setara *cum laude* atau sangat terhormat.

Bersama Ibu Tetty Siti Afiah menghadiri resepsi acara wisuda lulusan ILERI, Tahun 1985 di Perancis



Foto: Istimewa

## “Itu seperti hadiah pernikahan”

Ekonomi dan Ilmu Hukum”. Pak Mulia lantas berpendapat, bahwa untuk menguasai ilmu Keuangan Negara beliau harus mendalami ketiga bidang tersebut. Ilmu Ekonomi sudah diperolehnya saat di IIK, begitu pula dengan Ilmu Manajemen telah ditimbanya saat mengambil S2, sehingga hanya Ilmu Hukum yang belum beliau kuasai. Ditambah dengan adanya wacana dan keinginan Indonesia untuk mempunyai Undang-undang pengganti

ditugaskan ke Indonesia untuk menjadi konsultan Polri. Beliau bahkan diperbolehkan tinggal di rumah keluarga itu, secara gratis tentunya.

### From Paris With Love

Tak hanya kesempatan memperoleh ilmu saja yang beliau peroleh di Paris, namun juga kesempatan untuk berkenalan dengan mahasisiwi Indonesia bernama Tetty Siti Afiah Siregar yang

### Tentang Undang-Undang Pengganti ICW

Sekembalinya ke tanah air, Pak Mulia sempat bertugas di Bagian Pengembangan serta menjadi Kepala Kantor Wilayah di Bali sebelum akhirnya dipromosikan menjadi Direktur Pembinaan Anggaran di Jakarta. Pada tahun 2000, wacana penyusunan Undang-Undang pengganti ICW kembali mengemuka dan Pak Mulia ditugaskan menjadi Ketua Tim Pengkaji Undang-Undang Pengganti ICW yang kemudian berlanjut menjadi Tim Penyusun.

Berbekal apa yang telah dituangkan dalam disertasinya dilengkapi dengan pengalamannya di dunia kerja, Pak Mulia bersama tim kemudian bekerja sama dengan BPK untuk menyusun Paket Undang-undang yang awalnya hanya terdiri dari 2 rancangan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, namun kemudian dilengkapi dengan satu rancangan Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara yang sebelumnya disusun oleh BPK. Dibutuhkan waktu sekitar 3 tahun sampai akhirnya Undang-Undang Keuangan Negara disahkan pada tahun 2003. Sebuah

proses yang penuh gejolak namun dirasakan sebagai hal wajar menurut Pak Mulia, "Namanya juga merubah sesuatu yang telah dijalani puluhan tahun", ucapnya. Pak Mulia kemudian mengisahkan penyebab Undang-Undang Keuangan Negara tidak pernah diajukan ke DPR pada masa presiden Soeharto adalah karena pemerintah pada waktu itu tidak menginginkan ada ketentuan yang dapat membatasi ruang geraknya sendiri. Bisa dikatakan pada masa itu suasana demokratisasi belum terbentuk. Pak Mulia menambahkan bahwa reformasi 1998 juga menjadi trigger bagi disusunnya Undang-Undang pengganti ICW. Dimana dengan adanya reformasi maka diperlukan pengaturan kembali pengelolaan keuangan Negara di alam baru demokratis secara efisien dan efektif dengan menganut asas-asas *good governance*.

#### Keluarga dan Nilai-nilai Mulia

Di tengah kesibukannya sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, ayah dari Rayhan Armand Nasution dan Mutiara Dania Nasution ini berusaha untuk dapat selalu meluangkan waktu bersama keluarga, "Kita usahakan kalau *weekend* kita sama-sama, biasanya nonton bioskop dilanjutkan makan bersama". Kedua anak Pak Mulia lahir di Prancis saat beliau menempuh pen-

**"**  
Kita usahakan  
kalau bisa  
*weekend*  
kita sama-  
sama, biasanya  
nonton bioskop  
dilanjutkan  
makan bersama  
**"**

Foto: Istimewa



Berlibur bersama keluarga,  
tahun 2010 di Jepang

didikan S3. Meskipun kedua anaknya mengambil kuliah jurusan ekonomi dan perbankan, Pak Mulia tidak memaksakan kedua anaknya untuk mengikuti jejaknya sebagai pegawai negeri. Sementara itu Ibu Tetty kini menjadi ibu rumah tangga dan aktif di berbagai kegiatan sosial. Dalam hati kecilnya, Pak Mulia merasa memiliki kontribusi atas tidak berkembangnya karir sang istri. Dahulu disaat Ibu sedang merintis karir, Pak Mulia dipindahtugaskan ke Bali yang membuat Ibu Tetty akhirnya berhenti

bekerja. Mengenai hal ini Pak Mulia kemudian berpesan bagi para wanita, "berkeluargalah, tapi karir perlu dipikirkan juga". Pak Mulia menjelaskan bahwa hal itu dilakukan bukan untuk mengadu karir satu sama lain, melainkan sebagai bentuk aktualisasi diri dari seorang wanita.

Disinggung mengenai nilai-nilai yang selalu beliau pegang dalam menjalani kehidupan dan karir, Pak Mulia menjawab, "Yang utama adalah harus menjadi berguna, bukan hanya bagi keluarga tapi juga bagi sekeliling dan kalau bisa lebih



Sebagai Dirjen Perbendaharaan menandatangani perjanjian moratorium pinjaman luar negeri dengan pejabat Kementerian Keuangan Perancis dalam rangka pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh & Nias tahun 2005 di Perancis

**Reformasi  
1998 juga  
menjadi  
trigger bagi  
disusunnya  
Undang-  
undang  
pengganti  
ICW.**



“ Kita harus selalu melihat ke depan untuk melihat tantangan-tantangan dan peluang-peluang yang bisa diraih dalam hidup dengan potensi dan kondisi kita. ”

besar lagi yaitu untuk masyarakat akan lebih baik”. Ia kemudian menambahkan, bahwa kita harus selalu melihat ke depan untuk melihat tantangan-tantangan dan peluang-peluang yang bisa diraih dalam hidup dengan potensi dan kondisi kita. Namun hal yang tersulit menurut beliau adalah pada akhirnya kita harus bisa merasa puas dengan apa yang telah kita usahakan. Karena takdir itu ada dan seberapapun kita berusaha hasilnya harus kita terima sehingga tidak menjadi penyakit. Pak Mulia juga percaya bahwa selalu ada rahasia di balik setiap peristiwa. Ia mencontohkan, dulu sebenarnya ia sangat ingin melanjutkan pendidikan ke Amerika. Namun setelah direnungkan jikalau ia mendapat kesempatan ke Amerika kala itu, ia tidak dapat belajar *public finance* seperti yang diperolehnya di Prancis dan tentunya tidak akan bertemu dengan Ibu Tetty.

#### Tantangan Kedepan di Mata Mulia

Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan telah memasuki tahun keempat. Mengenai hal ini Pak Mulia berpendapat, “Yang belum selesai adalah menyusun sistem penilaian kinerja individual. Karena jika ini tidak dimiliki maka remunerasi ini akan bisa

menimbulkan moral hazard”. Lebih lanjut Pak Mulia menjelaskan bahwa pada hakikatnya Remunerasi atau Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) itu terdiri atas dua unsur, tunjangan pokok dan tunjangan tambahan. Tunjangan pokok berdasarkan *grade*, yaitu harga jabatan dari sisi input, *output* dan *throughput*. Sementara tunjangan tambahan seyogyanya berbasis kinerja. Kalau seseorang berprestasi baik maka ia bisa mendapat lebih dari 100% dan sebaliknya jika seseorang tidak berprestasi maka akan dikurangi. Hal ini berbeda dengan kondisi saat ini dimana pengurangan tunjangan tambahan hanya berdasarkan faktor kehadiran seseorang di kantor, bukan berdasarkan kinerjanya. “Itu baru bisa dilakukan jika setiap pegawai punya *record* yang dibuat berdasarkan sistem penilaian kinerja, ini yang masih menjadi tantangan kita” paparnya lebih lanjut. Masih terkait Reformasi birokrasi, sebagai Sekjen dari Kementerian yang sudah menerapkan Reformasi birokrasi, beliau menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan disetiap unit terkait reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik. Terutama peningkatan kinerja setiap unit

sebagai konsekuensi remunerasi yang telah diberikan harus dapat ditunjukkan, dipertahankan dan ditingkatkan.

Tantangan lain yang harus diantisipasi oleh Kementerian Keuangan menurutnya adalah menyiapkan dan menjaga agar regenerasi kepemimpinan tidak terputus, mengingat para pejabat yang menduduki posisi strategis saat ini akan memasuki masa pensiun. Ke depannya perekrutan pegawai yang berasal dari Sarjana juga perlu dilakukan secara rutin setiap 2 tahun sekali. Selain untuk memenuhi kebutuhan formasi, perekrutan melalui jalur sarjana juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atas disiplin ilmu yang tidak dapat dipenuhi melalui STAN, sehingga akan saling melengkapi.

#### Kembali Ke Madina

Melihat perjalanan karirnya yang terbilang sukses, tentunya menarik untuk mengetahui apa yang ingin dicapainya di masa depan. Saat ditanya tentang hal ini, beliau menjawab dengan mantap, “Kembali ke kampung”. Mungkin sekilas tampak seperti mundur ke belakang, namun beliau memberikan pandangannya, “Ketika kita sebagai profesional merasa sudah mentok (maksimal-red) dalam peran atau kontribusi yang kita berikan, (maka-red) ingin melakukan sesuatu untuk kampung halaman”. Memang kontribusi bisa dilakukan dimana saja, namun ia merasa ada keterikatan emosional dan ia melihat bahwa kondisi kampung halamannya dapat lebih maju dari kondisi saat ini. Selain itu, tinggal terlalu lama di kota besar membuat beliau rindu dengan kehidupan alam pegunungan yang menurutnya lebih memberikan kedamaian.

Jika suatu saat ternyata Pak Mulia memang kembali ke kampung halaman, tentunya tempat tersebut menjadi tempat yang paling beruntung karena menjadi labuhan pengabdian dari intelektual *visioner* seperti Mulia Panusunan Nasution. ■

*Penulis adalah Pelaksana Bagian TIK*



# Kiprah **DELAPAN BULAN** Di BDK Denpasar

OLEH: **UNGGUL KUSALAWAN R**

Tepat tanggal 5 Juni 2009, suatu masa depan dan tantangan baru telah ditetapkan. KMK Nomor 532/KM.1/UP.11/2009 mengharuskan diri untuk menempuh tugas baru menjadi Kepala Balai Diklat Keuangan Denpasar, setelah sebelumnya selama 1 tahun 10 bulan 6 hari mengampu jabatan Kepala BDK IV Malang. Turut serta bersama penulis ditetapkan juga para pejabat eselon IV di lingkungan BDK Denpasar, untuk mengawali kiprah dan mengawal pelaksanaan tugas pengembangan SDM di wilayah Bali, NTT, dan NTB.

**S**hock *paradigm*? jujur, perasaan itu sempat muncul karena adanya peralihan suasana yang cukup ekstrem dari kantor lama yang sudah eksis ke kantor baru yang sumber dayanya masih serba minimalis. Masih teretak jelas dalam benak penulis, tulisan mas Kuwat Slamet di *intranet* BPPK sekitar bulan April 2009 dengan tajuk "Apa Kabar Balai Diklat Keuangan Baru?" yang secara runtut dan lugas mengungkapkan suka duka yang dialami yang bersangkutan saat membuka kan-

tor baru di BDK Manado. Boleh dikatakan, Kuwat Slamet adalah seorang futuris yang handal. Walaupun tidak se-horor 'nasib' yang bersangkutan saat *mbabat alas*, namun beberapa hal yang diungkap dan diulasnya dialami juga oleh penulis.

Dengan menempati ruangan bekas Karikpa yang berlokasi di lantai III - GKN I, Jl. Dr. Kusumaatmadja, Nomor 19, Renon Denpasar, pada tanggal 14 Juli 2009 penulis bersama para pejabat eselon IV telah memulai aktivitas kerja di

BDK Denpasar. Aktivitas awal yang dilakukan adalah melakukan pembersihan, pembenahan dan pembagian ruangan serta memenuhi kecukupan minimal kantor dengan melibatkan pihak rumah tangga GKN I. Sebagai ilustrasi perlu penulis sampaikan, bahwa ruangan tersebut selama kurang lebih 2 tahun sudah tidak ditempati lagi. Pembaca tentu dapat membayangkan betapa terpesonanya kami menghadapi suasana "riuh rendah" yang ada, ditambah lagi dengan masih bertumpuknya berkas/



dokumen milik Karikpa Denpasar di beberapa ruangan. Mengingat bahwa tenaga kebersihan belum tersedia, maka seluruh pegawai secara *all out* turut terlibat langsung dalam pembenahan ruangan mulai dari menyusun *lay out* ruang kerja, memilih – menata meja/kursi kerja, membersihkan ruangan dan memenuhi kebutuhan ATK minimal. Namun di sisi lain kami bersyukur bahwa masih terdapat barang inventaris kantor milik Karikpa yang cukup layak untuk digunakan dalam mendukung operasionalisasi kantor (antara lain: meja kerja, kursi, lemari, sofa, dll), yang beberapa di antaranya masih difungsikan sampai dengan saat ini. Aktivitas kantor secara normal baru bisa dilakukan setelah memasuki minggu ke-2, seiring dengan datangnya *dropping* sarana dan kebutuhan kantor dari pusat antara lain: mobil, komputer, laptop, ATK, dll.

Dengan segala keterbatasan yang ada, pada minggu kedua berhasil didiskusikan dan dirumuskan program kerja BDK Denpasar yang akan mewarnai dan menjadi spirit BDK Denpasar dalam melaksanakan tugas fungsinya. Program tersebut kami beri nama KEA program yang mencakup: Konsolidasi, Eksistensi, Aksi. Nama KEA, terinspirasi dari sejenis burung cerdas bernama latin *nestor notabilis* yang hidup di wilayah selatan

Selandia Baru. Burung ini disebut cerdas, karena mampu menirukan sekaligus memahami dengan cepat kata-kata yang diajarkan kepadanya. *Spirit* inilah yang ingin ditangkap dan diterapkan di BDK Denpasar, yakni tidak sekedar membuat peserta diklat mampu menghafal namun lebih dari itu mampu menyerap dan memahami materi yang diberikan.

Konsolidasi mencakup aktivitas koordinasi internal dan vertikal, pemenuhan kecukupan sumber daya (sarana, prasarana, SDM), penciptaan kenyamanan kantor, dan pembenahan ruangan untuk kelas. Eksistensi dituangkan dalam format sosialisasi, pelaksanaan kegiatan seminar/*workshop* untuk mengenalkan keberadaan BDK, koordinasi eksternal, pelaksanaan TNA ke unit di lingkungan wilayah kerja, dan melibatkan diri dalam kegiatan GKN. Sedangkan program Aksi akan dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat, pelaksanaan seminar/*workshop*, kerja sama diklat, dan penjangkauan diklat ke wilayah yang masih jarang tersentuh kegiatan diklat.

Memasuki bulan ke-2 keberadaan BDK Denpasar, program eksistensi mulai diaplikasikan dengan merencanakan pelaksanaan diklat yang terdiri dari: Prodipl BC, Diklat Pengelolaan BMN, dan Diklat Bendahara Pengeluaran. Mengingat belum tersedianya fasilitas asrama, maka

diklat dan seminar tersebut (kecuali prodip I BC) diselenggarakan secara eksternal melalui pengguliran dana dari Pusdiklat teknis terkait. Suatu kenyataan yang dihadapi, ternyata cukup susah untuk mencari lokasi hotel yang bersedia menyelenggarakan diklat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000/orang. Perlu diketahui bahwa tarif hotel di daerah Denpasar cukup tinggi (terutama yang memiliki kemudahan akses transportasi), rata-rata berkisar antara Rp 350.000 – Rp 500.000. Namun demikian setelah melalui proses pelelangan umum yang fair dan obyektif, diperoleh juga hotel yang cukup layak dan bersedia untuk dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan diklat. Kendala lain yang dihadapi adalah saat akan melaksanakan proses pelelangan umum, yakni kurangnya jumlah SDM BDK Denpasar yang memiliki kompetensi di bidang PBJ. Solusinya, kami mengupayakan tenaga tambahan dengan meminta bantuan tenaga PBJ dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Bali. Dari aspek tenaga pengajar, kami mendapatkan *support* yang tinggi dari unit teknis Departemen Keuangan di wilayah Denpasar (Kanwil DJP, Kanwil DJBC, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara) mengingat belum tersedianya tenaga widyaiswara di BDK Denpasar.

Program lain yang dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari program eksistensi adalah penyelenggaraan seminar perpajakan dengan judul “Dampak Kebijakan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan Serta BPHTB Dari Departemen Keuangan Ke Pemerintah Daerah”, yang dilaksanakan dalam 2 hari (tanggal 1 - 2 Desember 2009) sekaligus sebagai salah satu bentuk sosialisasi untuk mengenalkan keberadaan BDK Denpasar. Melalui seminar ini, kami mencoba untuk menjangking potensi diklat dari unit/satker non Departemen Keuangan melalui sebaran angket yang antara lain memuat kebutuhan diklat unit tersebut terhadap pengetahuan di bidang keuangan negara.

Yang cukup menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas awal BDK Denpasar adalah belum dimilikinya DIPA tahun 2009, sehingga untuk sementara dalam

kurun waktu tersebut pendanaan rutin digulirkan dari pusat. Walaupun bukan merupakan suatu hal yang serius, namun terkadang permasalahan teknis (misal: penyerahan dokumen kelengkapan SPJ, koreksi terhadap SPJ, penandatanganan, jeda waktu pencairan dll) turut mewarnai selama proses pengguliran dana.

Bagaikan putri bali yang sedang merias diri, perumpamaan ini layak untuk dilekatkan terhadap kondisi BDK Denpasar saat ini. Memasuki bulan ke-8 keberadaan BDK Denpasar, telah banyak kemajuan yang dapat dicatat. Sampai dengan saat ini, BDK Denpasar telah melengkapi diri dengan sarana transportasi (mobil), komputer/laptop, ruang kuliah ber AC + LCD, fasilitas *internet*, ATK, telepon internal *via* GKN I dan faksimile. Selain itu, BDK Denpasar telah dilengkapi dengan sumber daya manusia sebanyak 13 orang yang terdiri 4 orang pejabat, 2 orang koordinator kegiatan urusan/korlak dan 7 orang *staff* pelaksana. Untuk memenuhi sarana kantor/kelas yang lebih kondusif dalam waktu dekat akan dilakukan *renovasi* ruangan yang mencakup perbaikan ruang kantor, ruang kelas, dan memenuhi perlengkapan pendukung kantor yang lebih representatif. Dari sisi

perencanaan diklat, telah disusun program diklat 2010 yang mengacu pada hasil telaahan kebutuhan unit/satker baik yang berasal dari Departemen Keuangan maupun non Departemen Keuangan. Dari sisi perencanaan anggaran, telah dilakukan revisi terhadap DIPA tahun 2010 dengan berbasiskan pada kebutuhan riil BDK Denpasar. Dengan kesiapan tersebut, membuat kami berani untuk masuk tahapan ke program berikutnya yakni Aksi, yang antara lain akan diaktualisasikan melalui penyelenggaraan Diklat Bendahara Pengeluaran terhadap pegawai Kanwil DJP Nusa Tenggara. Selain itu dalam

jangka panjang telah disusun konsep *renstra* 2010 – 2014 yang antara lain mencakup rencana pengadaan tanah, pembangunan gedung asrama BDK Denpasar, dan pemenuhan kelengkapan asrama/kantor.

Kalau dikatakan pernah terjadi suatu masa duka, semua itu telah terlewati dalam periode awal kami melaksanakan tugas. Rasanya untuk kurun waktu ke depan, kami telah berhak menikmati masa suka-nya (ukr).

---

\*) Penulis adalah: Kepala Balai Diklat Keuangan Denpasar



Bagaikan putri bali yang sedang merias diri, perumpamaan ini layak untuk dilekatkan terhadap kondisi BDK Denpasar saat ini.



## MODEL BLENDED LEARNING:

# Diantara Transisi dan Solusi

OLEH: MILA MUMPUNI\*)

di Badan Pendidikan dan Pelatihan keuangan (BPPK) sebagai  
Model diklat Masa depan



### Antara Diklat Konvensional dan E-Learning

Berawal pada tahun 1975, BPPK dengan perubahan struktur organisasi yang dinamis telah menghasilkan berbagai program diklat di bidang Keuangan Negara. Sangat disadari bahwa diklat mempunyai fungsi strategis sebagai sarana untuk membangun sumberdaya manusia (SDM). Model diklat sebagaimana umumnya di lembaga diklat menggunakan pendekatan andragogi sebagai implementasi teori pembelajaran orang dewasa. Menurut Knowles (1990) dalam Noe (2002:116), teori pembelajaran orang dewasa sangat penting dikembangkan dalam program pelatihan karena peserta diklat (sebagai orang dewasa) mempunyai kecenderungan menghabiskan waktu tidak pada pendidikan formal. Desain diklat untuk orang dewasa didasarkan pada konsep diri, pengalaman, kompetensi, dan orientasi perspektif waktu terhadap pembelajaran. Oleh karena itu, BPPK selalu bersikap aktif dalam mengikuti perkembangan kebutuhan diklat dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan. Buku Program Diklat BPPK tahun 2007 menjelaskan bahwa Evaluasi dan penyempurnaan tersebut meliputi pedoman penyelenggaraan diklat, kurikulum, materi, bahan ajar, metode evaluasi, metode pembelajaran, peningkatan mutu sarana dan prasarana, pembiayaan, pengajar maupun SDM penyelenggara dik-

lat itu sendiri.

Kinerja pegawai yang diharapkan dapat terpenuhi setelah melewati proses diklat sehingga lulusan diklat mampu mengimplementasikan hasil pembelajaran. Oleh karena itu calon peserta diklat harus mengetahui alasan mereka mempelajari sesuatu yang diajarkan pada diklat. Noe (2002:123) mengemukakan bahwa peserta diklat akan mampu mempelajari dengan baik apabila mereka memahami tujuan dari diklat tersebut. Tujuan diklat akan mengacu pada dampak yang diharapkan pada kegiatan diklat. Secara garis besar tujuan sebuah diklat memiliki 3 komponen yaitu:

- a) kinerja yang diharapkan dari para pegawai,
- b) kriteria kualitas kinerja, dan
- c) kondisi yang diharapkan pada dampak pelatihan.

Demikian pula di BPPK, dalam mendesain setiap diklat selalu ditekankan pada kinerja yang diharapkan nantinya dapat diaplikasikan di instansi asal peserta diklat. Kinerja diklat teknis yang diselenggarakan oleh BPPK secara garis besar menitikberatkan pada pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara. Begitu juga menurut Sredl & Rothwell dalam buku yang ditulis oleh Noe mengemukakan bahwa setiap ranah akan menghasilkan kinerja tertentu. Sebagai contoh ranah pengetahuan akan meng-

hasilkan kinerja yang mampu mendefinisikan karakteristik pekerjaan, ranah keterampilan akan menghasilkan kinerja yang mampu mengoperasikan alat kerja, ataupun ranah menganalisis akan menghasilkan kinerja yang mampu menganalisis sampai dengan membandingkan.

Umumnya diklat yang sudah dilaksanakan oleh BPPK menggunakan model konvensional. Proses pembelajaran dilakukan melalui interaksi langsung antara pengajar dan peserta diklat. Keuntungan diklat konvensional adalah proses interaksi aktif dapat terjalin antara pengajar dan peserta diklat. Hal ini berarti kesulitan dalam penyampaian materi dapat diselesaikan dalam kelas. Konsentrasi peserta diklat akan berpengaruh karena waktu yang disediakan peserta diklat di luar tugas rutinnnya. Sedangkan kekurangannya adalah tuntutan yang berat dari sisi waktu, dengan waktu yang terbatas pada jadwal diklat maka peserta harus mampu memahami dan mempraktikkan materi ajar. Karena bagaimanapun diklat yang menghasilkan lulusan yang berke-terampilan harus tersimultan antara konsep kelas pembelajaran dan kelas ketika bekerja nantinya, seperti yang dijelaskan di dalam buku *Training in Organizations: Needs Assesment, Development, and Evaluation* karangan Goldstein & Ford. Tujuan diklat konvensional dapat terpenuhi dengan adanya waktu, biaya dan tempat yang signifikan. Dengan mening-

katnya kebutuhan kuantitas dan kualitas diklat maka diklat konvensional akan sulit berkembang.

Menanggapi kendala penggunaan model konvensional dalam dunia pendidikan, kehadiran teknologi informasi dapat menjadi salah satu alternatif pilihan untuk menyelenggarakan program pendidikan. Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan solusi baru bagi dunia pendidikan dalam bentuk *e-learning*. Sesuai dengan definisi pada kamus bahasa Inggris (*glossary*), adapun yang dimaksud dengan *e-learning* adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media Internet, jaringan komputer, maupun komputer. Kunci kesuksesan model *e-learning* adalah pada fungsi pada level tinggi interaksi antara para pengguna dan instruktur, seperti yang dijelaskan dalam buku berjudul *Training in Organizations: Needs Assessment, Development, and Evaluation*. Kegagalan implementasi *e-learning* bukan semata-mata pada masalah *tools*, *software* atau infrastruktur; melainkan kecenderungan karena beratnya perubahan budaya kerja dan karena tidak adanya motivasi untuk *knowledge sharing*. Model *e-learning* akan menjadi populer bersamaan dengan kebutuhan organisasi dalam pengembangan kualitas sumber daya manusianya. Karena model ini meminimalkan biaya pelatihan, berdampak pada penganggaran dan berakibat pada jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya meningkat pula. Penggunaan metode *e-learning* yang semakin digemari dunia pendidikan memberikan dampak positif seperti: metode ini lebih efektif dan efisien, menghemat waktu, biaya dan tenaga, mendorong peserta didik untuk memanfaatkan teknologi. Di sisi lain dampak negatif yang ditimbulkan adalah menjadikan peserta didik menjadi malas, semakin jauh dari buku, dan kurang mengetahui serta menghormati pengajar karena kurangnya komunikasi langsung. Oleh karena itu, penggunaan metode pembelajaran *e-learning* harus ditinjau ulang lagi apakah benar-benar bermanfaat bagi peserta didik atau tidak. Dublin (2003) dalam Romi SW (2007) mencatat bahwa dari sebuah studi yang dilakukan *Forrester Group* kepada 40 perusahaan besar menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja (lebih dari 68%)

menolak mengikuti pelatihan yang menggunakan konsep *e-learning*. Ketika *e-learning* itu diwajibkan kepada mereka, sebesar 30% menolak untuk mengikuti. Sedangkan menurut Delio dalam buku dengan judul yang sama mengindikasikan bahwa orang-orang yang mendaftar untuk mengajar *e-learning*, sebesar 50% - 80% tidak pernah menyelesaikan sampai akhir.

Demikian juga dengan program diklat instansi pemerintah khususnya di BPPK. *E-learning* menuntut perubahan budaya belajar dari ruang, materi, dan waktu yang terbatas ke arah pembelajaran yang serba tidak terbatas dan bergantung sepenuhnya pada motivasi peserta. Berbeda dengan model konvensional yang memberikan tanggung jawab sepenuhnya pada instruktur untuk menyampaikan materi kepada peserta diklat. Masa transisi perubahan dari model konvensional menuju model *e-learning* diperlukan satu model yang aplikatif dan cepat teradaptasi oleh peserta diklat. Model blended learning (MBL) yang diaplikasikan di beberapa negara tercatat sebagai proses transisi menuju proses *distance learning* seperti Korea dan Malaysia. Sedangkan di Jepang MBL sebagai model terbaik saat ini, namun tidak menutup kemungkinan adanya perubahan kebijakan beralih pada full *e-learning*. China pun memilih MBL sebagai solusi terbaik saat ini untuk menghasilkan kualitas pendidikan. Model *Blended Learning* pada negara-negara tersebut sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam buku berjudul *The Handbook of Blended Learning*.

Berbagai negara yang sudah menerapkan MBL sebagai transisi ataupun sebagai solusi dalam model pembelajarannya secara garis besar menitikberatkan kualitas model tersebut pada kurikulum, peranan organisasi, dukungan infrastruktur dan evaluasi instruksional. Berdasarkan contoh-contoh di berbagai negara maka BPPK perlu menguji MBL sebagai transisi atau solusi, dalam rangka efisiensi dan efektivitas waktu penyelenggaraan diklat. Dengan diterapkan MBL maka setidaknya-tidaknya di setiap awal tahun anggaran telah ditetapkan calon peserta diklat yang berkewajiban mempelajari teori melalui *e-book* maupun *e-learning*; sedangkan untuk pemaparan materi sekaligus praktik teknis ke-

terampilan dilakukan dengan pola *face to face (F2F) learning*. Hal ini mengingat diklat di BPPK sebagian besar merupakan diklat teknis yang memerlukan bagian praktik pembelajaran baik di laboratorium maupun lapangan kerja.

### Pokok Kajian

Buku karangan Shaw dan Inderi yang berjudul *Effectively implementing a blended approach: maximizing advantages and eliminating disadvantages* menjelaskan bahwa blended learning bukan suatu konsep hal yang baru karena sudah dikembangkan di Amerika sekitar tahun 1990an. Saat itu menjadi populer baik di perusahaan maupun perguruan tinggi. Bonk dan Graham mencatat bahwa pada awalnya blended learning system terdiri dari 3 (tiga) pengertian seperti dikutip dari penelitian Graham, Allen dan Ure (2003) yaitu:

- (1) kombinasi media instruktorsional,
- (2) kombinasi metode instruktorsional, dan
- (3) kombinasi online dan instruksi tatap muka.

Namun, pengertian yang pertama dan kedua menjadi perdebatan pada pengaruh media dan metode terhadap pembelajaran. Karena bagaimanapun baik metode maupun media tidak dapat ditinggalkan salah satunya dalam proses pembelajaran. Keduanya diperlukan, terlebih dalam pengembangan pembelajaran "*virtual*". Oleh karena itu pengertian yang ketiga lebih merefleksikan bagaimana konsep pembelajaran yang di "*blend*". Bonk dan Graham mendefinisikan *blended learning system* sebagai berikut: "*blended learning system combine face to face instruction with computer-mediated instruction*"

Salah satu artikel berjudul *Blended Learning*, *Educause Center for Applied Research* karangan Dziuban, C.D., Hartman, J.L., Moskal, P.D. mempertegas pengertian *blended learning* yaitu mengkombinasikan kelas F2F dengan pembelajaran secara *online* dan mengurangi jam pembelajaran di kelas. Dengan mengurangi jam belajar di kelas sudah membawa atau mengarahkan motivasi belajar siswa ke arah metode secara *online* yang menggunakan fasilitas *e-learning*. Motivasi lebih dititikberatkan pada siswa, tidak lagi pada pengajar atau instruktur. *Blended learning* yang diinginkan (Dziu-

ban dkk, 2004) lebih lanjut adalah adanya beberapa hal sebagai berikut:

- (a) perubahan *instructor-centered* ke *student-centered* yang menjadikan siswa ke dalam proses pembelajaran interaktif yang fleksibel; karena tidak dibatasi pada ruang dan waktu jam belajar di kelas,
- (b) peningkatan dalam interaksi siswa dengan instruktur, siswa dengan siswa maupun siswa dan instruktur dengan konten *e-learning*, dan
- (c) terdapat proses integrasi formatif dan mekanisme penilaian baik bagi siswa itu sendiri maupun instruktur (karena konten *e-learning* harus selalu di up date berdasarkan kebutuhan siswa dan instruktur).

Keuntungan dengan diterapkan *model blended learning* berpengaruh pada prestasi siswa maupun instruktur pada akhirnya (Dziuban dkk, 2004). Selain itu, juga berpengaruh pada organisasi karena efisiensi penggunaan ruang kelas. Pada diklat-diklat konvensional, penggunaan penggunaan ruang kelas sangat berpengaruh pada berbagai hal, seperti:

- (1) biaya sewa ruang,
- (2) biaya ganti transportasi pengajar dan peserta,
- (3) biaya akomodasi bagi pengajar dan peserta, dan
- (4) biaya penggandaan materi. Dengan pengurangan biaya di berbagai komponen tersebut berakibat efisiensi dana yang dialihkan untuk menambah jumlah peserta yang memperoleh kesempatan mengikuti diklat.

Lebih lanjut disebutkan bahwa *blended learning* seharusnya dipandang sebagai pendekatan pedagogis yang menerapkan berbagai pendekatan pembelajaran ketimbang dilihat dari seberapa besar sistem yang terbentuk antara *face to face* (F2F) dibandingkan dengan secara *online*. *Blended learning* seharusnya mengkombinasikan secara arif, relevan dan tepat antara potensi F2F dengan potensi teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat berkembang saat ini sehingga memungkinkan:

- (1) terjadinya pergeseran paradigma pembelajaran dari yang dulunya lebih berpusat pada guru menuju

- paradigma baru yang berpusat pada siswa (*student centered e-learning*),
- (2) terjadinya peningkatan interaksi atau interaktifitas antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa/guru dengan konten, siswa/guru dengan sumber belajar lainnya dan
- (3) terjadinya konvergensi antar berbagai metode, media sumber belajar serta lingkungan belajar lain yang relevan.

*Blended learning* didesain karena proses interaksi pada kelas konvensional tidak cukup bagi siswa maupun pengajar karena terbatas proses tersebut pada ruang kelas saja. Seperti halnya yang terjadi pada diklat-diklat yang ada di BPPK kondisi keterbatasan ruang dan waktu sangat menyulitkan bagi peserta diklat maupun instruktur. Kondisi peserta ada yang sedikit paham, kurang paham bahkan tidak paham mengenai teknis keterampilan pengelolaan keuangan “dipaksa” harus memahami sampai mampu mempraktikkan aplikasi-aplikasi yang ada setelah selesai diklat. Dari sisi instruktur pun memiliki tingkat kesulitan yang sama, yaitu bagaimana menyampaikan materi bagi peserta yang memiliki pemahaman awal yang berbeda-beda terhadap laporan keuangan, tetapi harus mampu setelah selesai mengikuti diklat.

Efektivitas *blended learning* dapat terwujud ketika instruktur atau pengajar memberikan *problem centered tasks* yang tepat sasaran, seperti misalnya: demonstrasi, aplikasi, dan integrasi yang digunakan. Sigh dan Reed (2001) menyatakan efektivitas pembelajaran melalui *blended learning* adalah karena instruktur atau pengajar tidak hanya mampu mempresentasikan kondisi masalah yang bersifat riil saja melainkan termasuk bagaimana memecahkannya dengan mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.

#### MBL sebagai pilihan

Perubahan budaya belajar dari *teacher-centered instruction* menuju *student-centered instruction* memerlukan pembenahan di berbagai sisi, diantaranya mengubah model pembelajaran *e-learning*. Dengan model tersebut, efisiensi dan efektivitas memang tercapai baik dari sisi biaya, tempat dan waktu. Namun, sangat disadari bahwa menuju tahap

tersebut memang berat dan sulit. Dari sisi infrastruktur, BPPK dihadapkan pada kemampuan dalam pembiayaan dan kondisi geografis yang belum dapat seluruhnya mampu memperoleh fasilitas infrastruktur tersebut. Tetapi dari sisi jumlah peserta diklat yang memerlukan pelatihan keterampilan pengelolaan keuangan negara mengharuskan ada satu perubahan model pembelajaran.

Untuk mengantisipasi masa transisi tersebut, di berbagai negara sudah menerapkan *Model Blended Learning* (MBL) yang mengkombinasikan *online system* dengan *face to face* (F2F) *learning*. Keuntungan MBL diperoleh baik dari sisi lembaga pendidikan maupun peserta didik itu sendiri. Dari sisi peserta, efisiensi waktu dalam menggali pengetahuan dan masih memungkinkan pemantapan materi melalui F2F *learning*. Dari sisi lembaga pendidikan didapatkan efisiensi biaya dalam mengerahkan sumber-sumber daya dalam proses pembelajaran tersebut berlangsung.

BPPK sebagai unit organisasi yang dipercaya sepenuhnya dalam melatih dan mendidik para pengelola keuangan negara dihadapkan pada pilihan dinamis terhadap kondisi riil di lapangan. Konsep *full e-learning* yang ramah teknologi dihadapkan pada kendala selain pembiayaan membangun sistem juga pengukuran kinerja hasil diklat maupun kinerja para instruktur atau pengajar. Konsep MBL yang masih dikategorikan ramah teknologi tidak dihadapkan kendala pengukuran yang kinerja karena tolok ukur kinerja MBL bukanlah tolok ukur baru, namun sebagai tindak lanjut dari pola diklat konvensional. Kedua model tersebut merupakan desain model diklat masa depan di berbagai negara, BPPK tinggal menyesuaikan dengan kondisi organisasi menjadikan MBL sebagai masa transisi atau solusi yang terbaik. Pilihan antara sebagai transisi atau sebagai solusi semua bergantung pada BPPK dalam menyikapi konsep lembaga diklat yang semakin mendekat kepada publik namun mampu berkompetisi dengan lembaga diklat lainnya. Negara-negara yang menjatuhkan pilihan MBL sebagai solusi tetap mampu menghasilkan kualitas pendidikan yang baik. BPPK, saatnya jatuhkan pilihan desain model diklat masa depanmu....

\* Penulis adalah Widyaiswara Muda pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta



# Mengenal (kembali) Kebijakan Fiskal

OLEH: **BAMBANG WIDJAJARSO\*)**

Dalam berbagai kesempatan interaksi dengan peserta diklat – dari pemerintah pusat maupun daerah, mahasiswa bahkan sesama karyawan Departemen Keuangan sekalipun, pertanyaan seputar apa dan mengapa anggaran kita (APBN) dirancang untuk defisit, sehingga pemerintah perlu hutang, mengapa tidak memberdayakan penerimaan pajak saja, dan mengapa struktur belanja pemerintah seperti hanya diarahkan kepada kelompok pengeluaran tertentu saja, hampir selalu muncul ke permukaan.

Suatu fenomena yang layak diamati di sebuah negara yang mulai menerapkan prinsip-prinsip demokrasi modern, seperti Indonesia, karena mulai timbulnya rasa tanggung jawab publik untuk memahami arah kebijakan pemerintah, khususnya di bidang keuangan dan kemudian berusaha untuk ikut serta dalam proses evaluasinya. Terpicu dari kondisi diatas, tulisan tentang aspek dasar kebijakan fiskal ini ditulis.

## Apakah Kebijakan Fiskal itu?

Kebijakan fiskal dapat dimengerti sebagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan penge-

luaran negara, serta pembiayaan anggaran negara. Definisi yang cukup sederhana, akan tetapi mencakup begitu banyak aspek yang perlu dipahami. Pertama, karena kebijakan fiskal tertuang dalam anggaran negara, kebijakan seperti itu merupakan kebijakan politik yakni berupa kesepakatan antara pemerintah sebagai eksekutif bersama DPR sebagai legislatif, sehingga kebijakan fiskal yang mengikat ini perlu dituangkan dalam peraturan perundangan. Kedua, kebijakan fiskal yang tercermin dalam anggaran negara dan diperankan oleh kementerian keuangan erat kaitannya dengan asumsi-asumsi makro, seperti misalnya tingkat inflasi dan

kurs yang diperankan oleh bank sentral suatu negara. Ketiga, kebijakan fiskal berkorelasi langsung terhadap kondisi ekonomi suatu negara, setidaknya bila kita melihat hubungan antara pendapatan nasional yang diakibatkan oleh konsumsi, investasi dan belanja pemerintah. Isu-isu utama dalam penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan akan diuraikan setelah kita melihat fungsi pemerintah di bidang ekonomi dibawah ini.

## Fungsi Pemerintah dalam bidang ekonomi.

Disadari bahwa peran pemerintah di bidang ekonomi menyangkut tiga hal

yakni alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah dibidang penyediaan barang dan jasa (publik), misalnya pertahanan dan keamanan, sarana dan prasarana infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa fungsi ini dilakukan oleh pemerintah, karena barang publik seperti itu tidak disediakan oleh swasta, dalam kapasitas tertentu, sehingga pemerintahlah yang mempunyai kewajiban untuk menyediakannya. Kemudian, fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah dalam pengalokasian dana untuk menjamin terjadinya efisiensi dan keadilan dalam alokasi sumber daya dan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan pendapatan antar warga masyarakat. Sedangkan fungsi stabilisasi menyangkut fungsi pemerintah dalam penggunaan kebijakan anggaran sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja, stabilitas ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi, dengan memperhitungkan akibat kebijakan pada perdagangan dan neraca pembayaran.

## Prinsip ekonomi menegaskan pentingnya perbandingan antara biaya dan hasil yang efisien

### Aspek penerimaan negara (*public revenues*).

Memang pemerintah menginginkan suatu kondisi adanya penerimaan negara yang optimal sehingga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Namun demikian, ini bukan berarti bahwa pemerintah harus serta merta langsung

menaikkan tarif pajak, misalnya. Isu utama dalam *public revenues* menyangkut beberapa prinsip perpajakan berikut: prinsip keadilan, kepastian, kenyamanan dan manfaat ekonomi.

Menurut Adam Smith, prinsip keadilan menekankan bahwa beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan relatif masyarakat. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah harus lebih kecil dibandingkan dengan pajak dari golongan masyarakat yang lebih tinggi. Pajak diharapkan dapat menjadi alat distribusi pendapatan secara lebih wajar, adil dan akan mengurangi kesenjangan pendapatan. Prinsip kepastian dimaksudkan agar tidak terjadi distorsi berupa kesalahan yang disengaja (penyelewengan) atau yang tidak disengaja sebagai akibat dari kekurangan-pahaman. Kebijakan perpajakan harus dibuat sesederhana mungkin dan diformulasikan menggunakan kata-kata yang meminimalkan adanya penafsiran ganda.

Prinsip kenyamanan menggarisbawahi pentingnya menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi wajib pajak agar dengan sukarela bersedia memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dengan kata lain, sebisa mungkin dihindarkan adanya unsur-unsur menekan atau kekerasan. Kenyamanan wajib pajak dapat diberikan dengan bentuk layanan prima. Prosedur pembayaran pajak harus dibuat semudah mungkin. Kepada mereka yang patuh harus diberikan penghargaan yang setimpal. Terakhir, prinsip ekonomi menegaskan pentingnya perbandingan antara biaya dan hasil yang efisien.

Prinsip di atas menekankan fokus kebijakan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi, sehingga dimasa mendatang menghasilkan penerimaan pajak lebih banyak dan berkesinambungan (*sustainable*), karena perilaku wajib pajak yang produktif akan selalu didorong. Kebijakan perpajakan juga dapat dijadikan alat pengatur (*regulatory*), misalnya apakah pemerintah akan mendorong pola konsumsi, dengan membebaskan pajak yang ringan pada kegiatan konsumsi, atau sebaliknya. Dan tidak lupa, kebijakan diperlukan untuk memperoleh suatu kondisi dimana terdapat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, penegakan peraturan perpajakan dan ketersediaan petugas fiskus yang mampu dan jujur.

### Aspek belanja pemerintah (*public expenditures*).

Isu sentral masalah belanja pemerintah mengacu pada dua tugas utama yang menjadi tanggung jawab negara seperti yang dikatakan oleh Adam Smith, yakni negara berkewajiban memberi rasa aman dari segala ancaman dalam bentuk apa pun bagi semua warganya, dan negara juga harus mendorong dan menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi semua warganya (*welfare state regime*). Diantara penjabaran kesejahteraan adalah kebijakan dibidang ketenagakerjaan (*employment*), pendidikan (*education*), kesehatan (*health service*), jaminan sosial (*social security*) dan perumahan (*housing*). Secara terencana, seluruh kebijakan pemerintah dalam bidang pengeluaran atau belanja mempunyai target akhir kesejahteraan masyarakat.

Pada titik ini, fungsi kementerian keuangan sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) dalam pengelolaan anggaran negara mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan fungsi kementerian teknis sebagai *Chief Operating Officer* (COO). COO inilah yang mengimplementasikan kebijakan fiskal di bidang belanja negara karena mereka yang bersentuhan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya dalam mencapai kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan seberapa optimal pelayanan yang diberikan oleh kementerian teknis dan seberapa kementerian teknis dapat di biayai dari dana yang dikumpulkan oleh kementerian keuangan. Karena sifatnya, belanja pemerintah selalu tumbuh dari waktu ke waktu, selain karena pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan harga relatif, juga karena pengeluaran pemerintah juga dapat difungsikan sebagai rangsangan (*stimulus*) bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

### Aspek pembiayaan (*public financing*).

Isu sentral dalam bidang pembiayaan pertama yang harus dipahami adalah alasan pemerintah melakukan pendekatan anggaran defisit, yakni sebuah konsep anggaran dimana anggaran belanjanya melebihi anggaran pendapatannya. Pertimbangan utama adalah bahwa pemerintah tidak ingin menunda pelayanan dan tidak ingin menunda meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Pemerintah  
menyadari  
bahwa  
subsidi  
memang  
diperlukan  
untuk  
mengurangi  
beban  
masyarakat

katnya, khususnya di bidang penyediaan infrastruktur, sehingga dalam proyek penyediaan sarana dan prasarana seringkali pemerintah memerlukan hutang atau bekerjasama dengan pihak swasta. Kebijakan ekspansif seperti ini diperlukan untuk menggerakkan ekonomi, terutama pada kondisi ekonomi yang sedang lesu. Untuk menutup defisit, pemerintah bisa menutupnya dari berbagai alternatif pembiayaan.

Hutang untuk investasi, misalnya, dipandang perlu jika pemerintah merencanakan melakukan pembangunan prasarana yang dibutuhkan oleh warganya, sementara pendapatan terbatas. Investasi tidak akan ditunda dengan harapan manfaat (ekonomi) bisa segera diperoleh masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, dan akhirnya bermuara juga pada tugas pemerintah menumbuhkembangkan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diperlukan agar terbuka kesempatan kerja yang lebih luas dan juga efek ganda lain di bidang konsumsi dan investasi.

Kerjasama dengan pihak swasta (*Public Private Partnership*) diperlukan jika kapasitas sumber daya pemerintah terbatas dan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat mendesak

dilakukan. Pemerintah bisa berbagi risiko dengan swasta. Meski perlu dibayar lebih mahal oleh pengguna infrastruktur, masyarakat tidak akan keberatan jika infrastruktur tersebut akan menggerakkan potensi ekonomi yang dapat ditangkap oleh mereka. Dalam jangka panjang, pemerintah bisa mengambil manfaat dari kegiatan ekonomi masyarakat yang merupakan titik-titik pajak yang sudah berkembang yang diakibatkan oleh penggunaan infrastruktur tersebut.

#### Isu sensitif kebijakan fiskal.

Kalau kita amati, masyarakat saat ini sudah sangat cerdas dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, apalagi kalau kebijakan tersebut langsung mengakibatkan beban bagi mereka. Beberapa contoh kebijakan dibawah ini mungkin bisa dijadikan bahasan.

Pertama, ketika pemerintah mengambil keputusan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), terjadi pertentangan yang luar biasa dari masyarakat. Kenapa bisa seperti itu? Ada dua kepentingan ekstrim yang bertemu: di satu pihak, masyarakat menginginkan harga BBM (dan juga komoditi lain) murah yang disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat dengan beberapa alasan dan

di lain pihak, pemerintah menginginkan sehatnya APBN. Pemerintah menyadari bahwa subsidi memang diperlukan untuk mengurangi beban masyarakat dan dengan demikian aspek kesejahteraan masyarakat akan mengalami peningkatan. Namun demikian, pemerintah tentunya punya pertimbangan bahwa jika subsidi BBM masih cukup besar, anggaran belanja akan tersedot banyak pada belanja subsidi BBM dan akan berakibat berkurangnya porsi belanja lainnya. Ditambah dengan pos subsidi lain, misal subsidi pupuk, kondisi beban belanja akan semakin berat. Jika hasil pendapatan pajak meningkat pesat, mungkin beban belanja akan banyak terbantu, tetapi apakah para pembayar pajak sudah secara sukarela memenuhi kewajibannya kepada negara dengan tepat waktu? Apa boleh buat, pengelola kebijakan fiskal, dengan persetujuan *legislative*, haruslah membuat skala prioritas, dan mungkin subsidi BBM dipandang perlu semakin hari semakin dikurangi untuk menyehatkan APBN. Perbedaan sudut pandang seperti ini yang sering terjadi. Sering para pengamat ekonomi memberikan analisis yang cukup tajam jika sudah menyangkut kepentingan rakyat banyak, namun harus dipahami bahwa

para pengamat ekonomi itu mungkin hanya melihat satu variable saja (*ceteris paribus*). Dalam kenyataannya, pengelola fiskal berhadapan dengan begitu banyak variable, yang masing-masing *variable* tersebut sangat dinamis, dan kemudian pengelola fiskal harus mengambil keputusan segera (untuk menghindarkan dari kerugian yang lebih besar). Akhirnya, resiko *trade off* seperti inilah yang harus ditanggung oleh pengelola fiskal.

Kedua, masyarakat sering protes atas kebijakan hutang (terutama dari luar negeri) karena merasa bahwa anak cucu mereka akan terbebani dengan beban pembayaran hutang yang dimiliki oleh pemerintah generasi mendatang. Salah satu LSM pernah memprediksi bahwa setiap bayi lahir di Indonesia harus terbebani dengan hutang senilai tiga juta rupiah. Apakah benar demikian? Pengamat ekonomi yang cerdas tentunya harus melihat kondisi hutang pemerintah dengan lebih proporsional dengan melihat peruntukan hutang tersebut. Jika hutang dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dan ini merupakan investasi bagi pemerintah, maka manfaat (ekonomi)

masyarakat sering protes atas kebijakan hutang (terutama dari luar negeri) karena merasa bahwa anak cucu mereka akan terbebani dengan beban pembayaran hutang yang dimiliki oleh pemerintah generasi mendatang



Jembatan suramadu, membuka potensi ekonomi kawasan Madura.

yang diperoleh oleh masyarakat tentunya harus dipertimbangkan dalam melakukan penilaian terhadap kebijakan fiskal di bidang pembiayaan ini. Artinya, penilaian atas kebijakan haruslah seimbang antara manfaat dan biaya. Manfaat atas dibangunnya jembatan Suramadu, misalnya, yang secara nyata memberikan nilai ekonomi luar biasa dapat dijadikan pertimbangan haruslah ditandingkan dengan biaya pokok dan bunga atas hutang di kemudian hari. Secara umum, jika *Gross Domestic Product* mengalami peningkatan yang diakibatkan dari manajemen hutang, beban hutang di masa yang akan datang harus dianggap sebagai disiplin anggaran, akibat telah diperolehnya manfaat di masa sebelumnya sampai dengan masa kini.

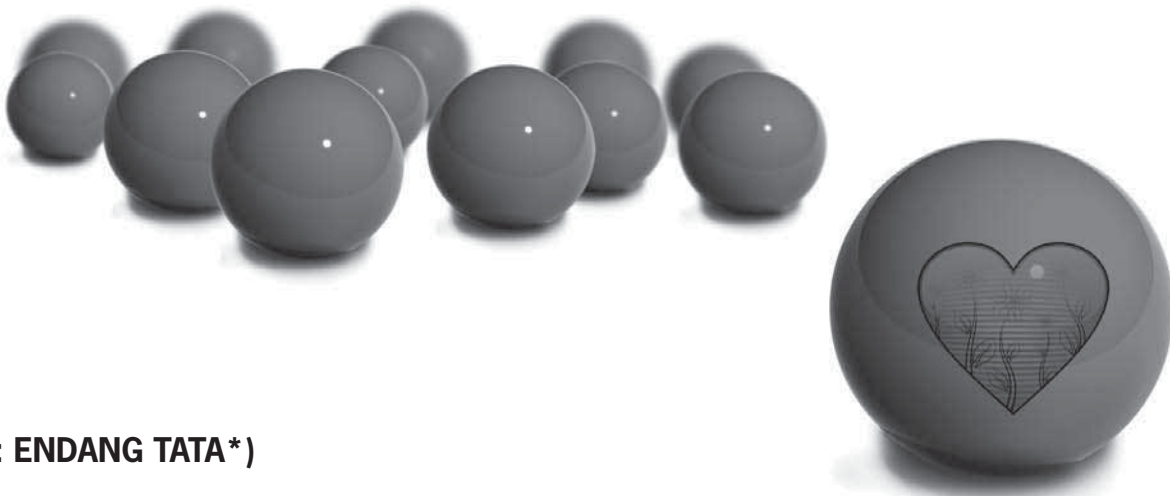
Penulis sering memberikan analogi, dalam pengelolaan hutang ini, dengan memberikan pilihan bagi sebuah keluarga untuk investasi rumah yang akan ditempati. Ada dua alternatif untuk membeli rumah; dengan menabung terlebih dahulu sampai dananya cukup untuk membeli rumah atau dengan mengambil kredit kepemilikan rumah (KPR) dari bank. Mayoritas keluarga mengatakan memilih alternatif kedua, karena mereka tahu bahwa harga rumah makin lama makin naik karena inflasi, tabungan setiap saat bisa habis jika tidak disiplin menabung, dan manfaat rumah bisa segera diperoleh, termasuk adanya *cost saving* jika suatu keluarga tidak perlu sewa rumah lagi. Kalau pun setelah itu, keluarga tersebut menyisihkan sebagian penghasilannya untuk mengangsur KPR, tindakan tersebut dianggap sebagai disiplin anggaran. Pertimbangan inilah yang juga digunakan oleh pemerintah sebagai pengelola fiskal,

yakni mempercepat perolehan manfaat dari sebuah pembangunan infrastruktur, meskipun pendanaannya berasal dari hutang.

Ketiga, ketika pemerintah daerah memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang menurun, protes seringkali disampaikan ke pemerintah pusat, karena pemerintah daerah merasa setelah membangun daerah dengan susah payah dan kemudian berhasil, mereka malah diberikan penalti. Apakah memang demikian? Ada pemahaman yang tidak pas bagi pimpinan daerah. *Block grant* seperti DAU seperti itu seharusnya dipahami bahwa, dalam suatu negara, terjadi ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah dan pemerintah pusat berkepentingan untuk menutup celah fiskal yang dimiliki oleh daerah, sehingga pertimbangan *transfer* untuk menyemibangkan kapasitas fiskal antar daerah (*horizontal equalization transfer*) dijadikan dasar pengambilan keputusan *transfer*. Sebetulnya pemerintah daerah tidak perlu khawatir terhadap kemampuan membiayai belanjanya, karena masih banyak tersedia alternatif *transfer* lain, misalnya *transfer* bagi hasil (*vertical equalization transfer*) ataupun *transfer* penyeimbang (*matching grant*) untuk menutup kekurangan pembiayaan jenis urusan tertentu bagi daerah.

Tentunya masih banyak contoh-contoh kebijakan lain yang dapat dibahas untuk lebih memahami kebijakan fiskal. Tulisan ini hanya sebagai pemicu untuk lebih memahami kebijakan fiskal secara utuh.

\*)Penulis adalah: Widyaiswara Madya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara



OLEH: ENDANG TATA\*)

# MEMIMPIN DENGAN HATI

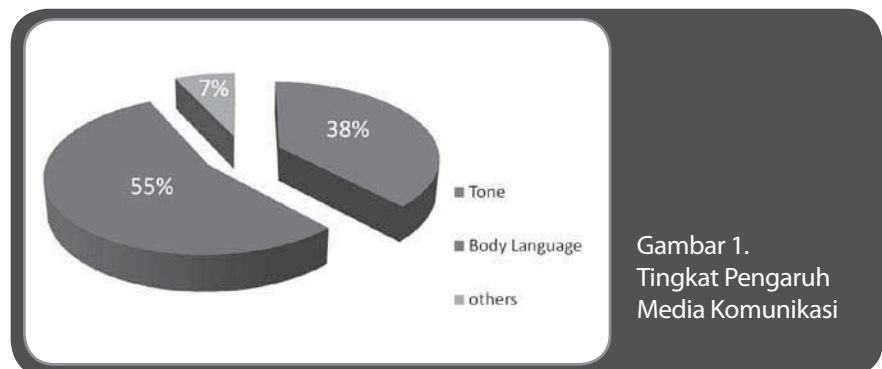
## Suri Tauladan

Ada permainan yang cukup menarik yang dapat memberikan pelajaran kepemimpinan kepada kita. Seorang instruktur berdiri di depan para peserta, lalu menginstruksikan agar para peserta mengikuti perintahnya. Saat berkata: “pegang dahi” peserta harus mengikuti instruksinya dengan memegang dahi. Ketika berkata: “pegang telinga”, maka peserta harus menindaklanjutinya dengan memegang telinga, begitu juga saat instruktur memerintahkan memegang dagu. Ternyata berbagai perintah tersebut tidak mudah untuk diikuti oleh para peserta. Misalnya, ketika instruktur berkata pegang dahi sambil mempraktekkan memegang dagunya, ternyata banyak peserta malah mengikuti instruksi apa yang dilihatnya yaitu memegang dagu mereka yang seharusnya memegang dahi sesuai yang dikatakan instruktur. Begitu pun bila dilakukan secara berulang-ulang, selalu saja ada peserta yang salah mengikuti instruksi.

Dari permainan yang sederhana tersebut, dapat kita peroleh pelajaran yang cukup bermakna mengenai bentuk kepemimpinan. Ternyata secara

praktis seorang bawahan akan lebih mudah meniru pada apa yang dilihat daripada meniru apa yang dikatakan oleh pemimpinnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dalam ilmu komunikasi yang menyatakan bahwa *body language* memberikan tingkat pengaruh terhadap orang lain yang paling besar (55%), lebih besar dibandingkan melalui *tone* atau intonasi suara (38%) dan isyarat lain (7%).

Cara yang paling efektif dalam penyampaian pesan atau dalam mempengaruhi bawahan adalah memberikan contoh atau suri tauladan terbaik (*ushwatun hasanah*). Inilah salah satu rahasia keberhasilan *leadership* dan manajemen Nabi Muhammad SAW. Tidak berlebihan kiranya bahwa pada saat ini terdapat krisis yang lebih penting dan lebih dahsyat dibandingkan dengan krisis keuangan, ekonomi, krisis energi,



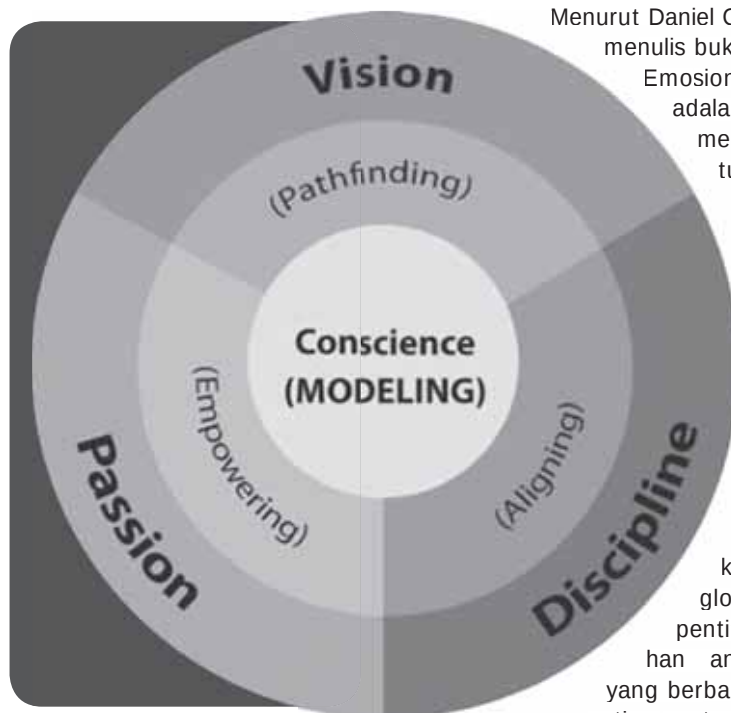
Berdasarkan kondisi tersebut, seorang pemimpin harus menguasai seni atau cara untuk mempengaruhi orang lain agar pesan-pesan yang akan disampaikan dapat direspon dengan baik.

krisis lingkungan, krisis pangan, krisis kesehatan yaitu krisis keteladanan. Menurut Lamartine, *Histoire De La Turquie*, Paris :

*“Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, conqueror of ideas, res-*

*torer of rational dogmas, of a cult without images, the founder of twenty terrestrial empires and of one spiritual empire, that is Muhammad. As regards all the standards by which Human Greatness may be measured, we may well ask, Is There Any Man Greater Than He?"*

Situasi ini sesuai dengan model empat fungsi kepemimpinan (*the 4 roles of leaderships*) yang diungkapkan oleh Steven Covey yaitu: perintis (*path-finding*), penyelaras (*aligning*), pemberdaya (*empowering*), dan panutan (*modeling*). Sebagaimana digambarkan dalam gambar berikut :



Fungsi Kepemimpinan Stephen Covey

Fungsi Panutan (*modeling*) mengungkap bagaimana agar pemimpin dapat menjadi panutan bagi para pegawainya. Bagaimana dia bertanggung jawab atas tutur kata, sikap, perilaku, dan keputusan-keputusan yang diambilnya. Sejauh mana dia melakukan apa yang dikatakannya. Muhammad SAW juga merupakan seseorang yang melaksanakan apa yang beliau katakan. Beliau sangat membenci orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakan apa yang dikatakannya itu.

Muhammad SAW menjadi panutan dalam melaksanakan nasihatnya sebelum beliau menyampaikan saran-sarannya pada para sahabat. Sebelum mengatakan kepada para sahabatnya "Tangan diatas lebih mulia dari tangan dibawah", Beliau adalah seorang yang sudah sangat darmawan kepada siapapun yang datang dan meminta pertolongan.

#### Empati Pimpinan

Salah satu contoh bentuk panutan seorang pemimpin adalah berinteraksi dengan empati terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Apa sih empati?

Menurut Daniel Goleman yang menulis buku Kecerdasan

Emosional, empati adalah kemampuan memahami dan

turut merasakan perasaan orang lain. Apa ini penting?

Ya, sangat penting.

Adanya peningkatan kebutuhan terhadap kelompok kerja, kecepatan arus globalisasi, dan pentingnya menahan anggota *team*

yang berbakat, membuat empati sangat penting dalam

situasi sekarang. Banyak sekali penyelesaian masalah di tempat kerja melalui interaksi yang berempati dari seorang atasan kepada pegawainya yang bermasalah, seperti contoh berikut ini:

Di suatu kantor pemerintahan, ada seorang pegawai yang sudah sangat senior dan berpengalaman, namanya Budiman. Setelah 15 tahun bekerja sebagai pengelola keuangan, dia benar-benar lihai di bidangnya dari A sampai Z. Sangat cekatan dan telaten. Sayangnya dengan tingkat pendidikan yang terbatas, Budiman relatif sulit dipromosikan memperoleh jabatan tertentu pada kantor tersebut atau sulit

mendapatkan kenaikan penghasilan. Kemudian tibalah saatnya dia jenuh. Budiman tidak mau bekerja lagi secara penuh. Pada jam-jam tertentu, dia mengerjakan pekerjaan pribadinya sebagai penghasilan tambahan, di dalam maupun di luar jam kantor.

Tentu saja hal ini tak boleh dibiarkan terjadi di kantor tersebut karena tindakan Budiman tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran disiplin. Sebagai atasan yang baik, Pak Eko harus segera memikirkan cara terbaik untuk mengatasi kondisi ini karena bagaimanapun Budiman merupakan tenaga trampil yang masih dibutuhkan kantor tersebut. Ini kasus menarik. Budiman melanggar tata tertib kerja, namun kantor tidak mau kehilangan dia. Sebagai atasannya, apa yang akan dilakukan Pak Eko?

Budiman dipanggil atasannya, "Saudara Budiman, saya sangat menghargai ketrampilan Anda dengan masa kerja yang baik selama 15 tahun di kantor ini. Sekarang saya mengharapkan bantuan Anda, bagaimana caranya agar kejenuhan Anda dalam bekerja sebagai pengelola keuangan dapat kita atasi, sekaligus ketrampilan Anda dapat berguna kepada pegawai lainnya?"

"Saya senang dengan pertanyaan Bapak, tetapi bagi saya terserah Bapak maunya apa."

"Tentu Anda juga punya pemikiran bagaimana mengatasinya karena Anda sendiri yang paling merasakannya. Jadi menurut Anda, bagaimana baiknya mengatasi masalah Anda itu?"

"Saya tidak keberatan, Pak, kalau saya harus mengajar pengelola keuangan yang baru-baru itu."

"Baiklah Pak Budiman, saya senang mendengar pernyataan Anda itu. Apakah anda setuju jika pihak kantor mengeluarkan surat keputusan yang menunjuk Anda menjadi *on the job trainer*, maksudnya pada jam-jam tertentu, Anda 'mengajari' pegawai pengelola keuangan yang belum mampu mencapai standar kerja atau target kerja. Dengan demikian, wibawa Anda akan dihargai mereka, dan pasti mereka berterima kasih sekali atas pelatihan yang Anda berikan langsung di tempat kerja mereka."

"Wah, saya senang sekali mendengarnya. Nggak kira Bapak baik betul sama saya."

Kasus tersebut adalah salah satu kasus yang sering terjadi di dunia kerja, termasuk di instansi pemerintah, yang dapat diselesaikan dengan keterlibatan empati dari seorang atasan kepada seorang bawahannya yang sedang mengalami suatu masalah. Dengan adanya interaksi yang berempati dari seorang atasan kepada bawahan maka akan dapat diperoleh *win-win solution* dengan mudah. Pihak kantor mendapatkan manfaat, para pegawai mendapatkan seorang pembimbing yang *expert*, dan Budiman tidak perlu lagi melanggar disiplin, bahkan kini hati Budiman berbunga-bunga menyongsong hari esok dengan semangat baru.

Bagaimana wujud empati seorang pemimpin terhadap orang yang dipimpinnya? Menurut Raja Bambang Sutikno dalam bukunya *The Power of Emphaty in Leardership*, terdapat tiga pilar interaksi dalam berempati seorang pemimpin pada orang yang mereka pimpin yaitu menghormati harga diri pegawai dan menjaga rasa percaya dirinya, mendengar dan merespons bahasa *verbal* dan *non verbal*, serta membangun sinergi dalam menyelesaikan masalah.

### **Menghormati Harga Diri pegawai dan Menjaga Rasa Percaya Dirinya**

Setiap orang akan merasa dirinya penting dan terhormat serta merasa ingin dihargai di hadapan orang lain. Jika pegawai yang merasa kemampuannya melakukan pekerjaan diperhatikan dengan baik, dia akan cenderung memiliki motivasi, produktifitas, dan kerja sama lebih baik lagi. Sebagai pemimpin, Anda dapat menjaga harga diri serta perasaan percaya diri pegawai dengan memperlakukannya sebagai individu yang kompeten, tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang merendahkan kemampuan, kompetensi, atau integritasnya. Selain itu, Anda dapat mempertinggi rasa percaya diri pegawai dengan mengakui pemikirannya yang bagus, mengungkapkan keyakinan Anda terhadap kemampuannya, mengenali kelebihan mereka, dan me-

ngakui (memuji) tindakannya yang memuaskan atau di atas rata-rata.

### **Mendengar dan Merespons Bahasa Verbal dan Nonverbal**

Salah satu pekerjaan paling berat dan menuntut kesabaran paling tinggi bagi sebagian besar pemimpin adalah mendengar. Banyak sekali pemimpin yang tidak menerapkan kiat mendengar dengan baik. Ketika anak buah berbicara, melapor, atau menjawab, sering dipotong atau diinterupsi pemimpin. Padahal tanpa disadarinya si pemimpin akan sedang mempertontonkan, kalau bukan sedang menyombongkan, kehebatan menduga apa yang selanjutnya akan diungkapkan si anak buah. Pemimpin langsung merespons tanpa menunggu anak buahnya selesai bicara. Padahal bagi si anak buah, itu contoh keangkuhan si pemimpin. Sikap menyepelekan anak buah.

Terserah apakah jawaban pemimpin itu tepat atau keliru, yang jelas terungkap bahwa anak buah itu merasa kurang didengar, kurang dimengerti, kurang dipentingkan, pokoknya kurang dihargai perasaan atau jalan pikirannya. Anak buah merasa pemimpinnya lebih suka didengar saja, tetapi tidak suka mendengar. Lebih suka dimengerti, kurang sensitif untuk dimengerti. Apakah Anda sendiri tidak merasa dilecehkan atasan jika kalimat Anda sering diinterupsi?

### **Membangun Sinergi Dalam Menyelesaikan Masalah**

*Synergi* (sinergi) merupakan gabungan dari dua kata: *synchronize* (sinkron) dan *energy* (energi), yaitu berarti menyelaraskan dua atau lebih energi menjadi suatu kekuatan yang lebih baik, lebih kuat, lebih berdaya guna, dan lebih berhasil guna. Permintaan atau ajakan kerja sama seorang pemimpin dapat menjadi alat yang efektif untuk memperoleh komitmen dari pegawai. Penelitian menunjukkan bahwa komitmen yang kuat diperoleh dengan 'menggajak', bukan menyuruh. Artinya, dengan meminta pengertian serta kesediaannya, Anda akan mendapatkan kerja sama yang lebih baik daripada Anda menyuruh apa yang harus dia lakukan.

Ketika seorang bawahan Anda mempunyai masalah, Anda dapat meminta kerja samanya untuk mengatasi masalahnya itu. Hal itu tidak hanya membantu Anda menemukan solusi yang baik, yang sekaligus didukung bawahan, tetapi juga memperlihatkan bahwa Anda menghargai idenya. Pada gilirannya, cara ini juga menjaga rasa percaya diri dan menjunjung tinggi harga diri bawahan Anda, sehingga menjadi mudah membangun sinergi.

Dengan demikian, apabila kita menjadi seorang pemimpin, anggaplah teman-teman yang kita pimpin sebagai kawan, bukan sebagai anak buah apalagi jongos. Hormati mereka dan berikan mereka tugas menurut kemampuan mereka. Itulah empati seorang pemimpin pada orang yang mereka pimpin. Dengan berempati dalam kepemimpinan yang memunculkan interaksi yang baik di lingkungan kerja, keberhasilan pengembangan Sumber Daya Manusia tidak hanya dilihat dari jumlah surat keputusan penjurusan sanksi yang dikeluarkan, namun seharusnya juga diukur dari seberapa besar upaya yang dilakukan dalam memberdayakan pegawainya yang 'bermasalah.'

*\*)Penulis adalah: Kapusdiklat Bea dan Cukai*

## **Sumber**

Antonio, Syafii. 2007. Muhammad SAW The Super Leader Super Manager. Jakarta: ProLM Centre.

Covey, Stephen R. The 8th Habit From Effectiveness to Greatness. London. Simon & Schuster UK Ltd.

Sutikno, Raja Bambang: 2007. The Power of Empathy in Leadership. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, PT.



Seoul Tower,  
"Monas-nya"  
Korea

# Belajar di Negeri Orang

Meski di negeri orang semua terlihat berkilauan, namun hati ini tetap rindu kampung halaman.

OLEH: RIDO P. PANJAITAN \*)

## Berburu Bea siswa

Berburu bea siswa itu gampang-gampang susah. Kalau otak pas-pasan, tak menonjol dalam prestasi, ditambah tak pandai pula mencari koneksi, atau dengan kata lain tak ada hal masuk akal yang rasa-rasanya bisa membuat mendapatkan bea siswa maka saya ucapkan "Selamat", karena saya pun begitu. Namun prinsip yang saya anut sederhana saja: Buatlah Tuhan sampai menangis dengan doa dan usaha kita! Saya sepenuhnya sadar jika kemampuan saya tidaklah bagus, maka yang saya lakukan adalah bersikap seperti orang gila. Gila ke sana-ke mari mencari informasi, minta rekomendasi, mengumpulkan segala jenis persyaran, tanya-tanya orang, belajar sendiri, dan minta tips dan trik dari para senior. Mungkin orang-orang yang saya tanya-tanya dulu sampai muak ka-

rena saya selalu bertanya. Haha.. tapi mudah-mudahan tidak. Berdasarkan pengalaman, ada beberapa pelajaran yang saya ambil: Tawaran bea siswa itu tak ubahnya seperti Jelangkung, datang tak dijemput pulang tak diantar. Datang perginya selalu tiba-tiba dan belum lagi tenggat waktunya yang kelewat sempit. Maka dari situ saya pun belajar bahwa menyiapkan berkas jauh hari sebelumnya, bahkan ketika tawaran bea siswa itu belum ada, adalah sangat membantu. Adapun berkas yang perlu dan hampir selalu diminta oleh pemberi bea siswa luar negeri:

- CV pelamar, ituah iklan tentang diri saya.
- Essay. Namun demikian, ada beberapa bea siswa sudah menyertakan format essay yang harus diisi jadi tidak perlu lagi membuat essay dengan format sendiri. Misalnya, bea

siswa ADS (Australia).

- TOEFL/IELTS. Berdasarkan pengalaman, beberapa bea siswa hanya perlu score 500 seperti untuk ADS (Australia) namun untuk Eropa biasanya meminta di atas 570 atau sekitar 6.5 untuk score IELTS. Untuk Korea dibutuhkan score TOEFL 550.
- Paspor.

## Kampus dan Asrama di Seoul

Akhirnya saya diterima bea siswa di Sungkyunkwan University di Seoul, Korea Selatan pada program Master of *Public Administration* (MPA) spesialisasi *e-government*. Universitas ini adalah universitas tertua di Korea, sudah ada sejak 1398, dan memiliki sejarah yang panjang karena peranannya dahulu dalam mendidik dan melatih pegawai kerajaan (kira-kira seperti BPPK). Lalu universitas tersebut dibeli oleh peru-

sahaan Samsung yang ternyata adalah perusahaan raksasa di Korea. Efeknya, saya sangat dimanjakan di dalamnya. Mengambil contoh yang langsung dirasakan adalah fasilitas asrama yang sangat memadai. Di dalam satu apartemen ada 3 kamar dan diberi fasilitas dapur, kompor listrik, *microwave*, dispenser digital, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, *vacuum cleaner*, penjaga apartemen 24 jam, dan sebagainya.

Di kampus, mahasiswa Korea benar-benar sangat ekstrim dalam belajar. Tak jarang mereka sampai menginap di ruang belajar kampus yang hanya disediakan meja dan kursi. Dan di saat masa-masa ujian, jika kita berjalan-jalan ke kampus pada jam 3 pagi maka akan bertemu dengan banyak mahasiswa yang masih berseliweran, terutama di dalam perpustakaan.



*Motor ditinggal di trotoar bersama dengan kuncinya pada suatu larut malam.*

## Seoul

Kota Seoul sendiri sangatlah aman. Perlu diketahui, tidak semua negara maju itu aman. Kalau tak percaya, cobalah berjalan sendirian di beberapa daerah di Amerika sana seperti Camden atau Detroit pada malam hari, berbahaya. Bahkan sahabatku di sini, yang sudah pergi ke berbagai negara maju seperti Amerika dan Inggris, tetap menggeleng-geleng kagum akan amannya Korea. Suatu larut malam, aku berjalan-jalan dan menemukan sebuah motor vespa, yang menurut saya cukup mahal, ditinggal di trotoar begitu saja lengkap dengan kuncinya dan esoknya saya masih menemukan

motor itu (foto motor itu sempat saya ambil). Ada sahabat yang pernah ketinggalan laptop di trotoar jalan, lalu ia kembali berjam-jam kemudian, ia masih menemukannya. Temannya temanku kehilangan dompet, besoknya ia ditelepon polisi mengatakan dompetnya ditemukan tepat di depan kantor polisi. Anehnya, ia tak pernah melewati kantor polisi itu. Isi dompet masih tetap utuh.

## Budaya Korea

Orang Korea, meskipun berdekatan dengan China dan Jepang namun memiliki karakter yang berbeda dengan kedua sepupunya itu. Berdasarkan salah satu penulis ternama, Won-bok Rhie, China sangat menonjolkan prinsip kebersamaan dan persatuan (*united/One*). Jepang terkenal akan prinsip keharmonisannya, sehingga orang Jepang selalu berusaha menghindari konflik dengan sesama dan juga terkenal kreatif. Sedangkan orang Korea adalah orang dengan prinsip "ekstrim". Jika mereka mengerjakan sesuatu maka mereka melakukannya bukan hanya sampai 100%, tapi jika mungkin 200%! Itulah sebabnya Korea dapat bangkit hanya dalam 40 tahunan (sejak 1945 sampai 1990an). Sebelum tahun 1945, Korea tidak ada apa-apanya. Ini berbeda dengan Jepang yang sebelum 1945 mereka sudah sangat maju, jadi walaupun pada tahun 1945 Jepang mengalami kemunduran karena kalah perang, namun tidaklah sulit bagi Jepang untuk bangkit kembali karena mereka sudah memiliki sumber daya manusia yang memadai sebelumnya, sedangkan Korea pada tahun itu tidak punya apa-apa sama sekali. Korea benar-benar memulai dari nol, tak ubahnya seperti Indonesia. Satu lagi, Korea sangat terkenal dengan budaya "*Palli*" yang artinya "buruan" atau "segera". Tak

jarang jika kita terlalu lambat berjalan atau melakukan sesuatu, maka si orang Korea akan berucap "*Palli Palli...*"

Di sisi lain, terpaksa kami, para *foreigners*, mengernyitkan dahi melihat tingkah para anak muda Korea. Sungguh *trend* metroseksual bagi para pria Korea sudah melewati ambang toleransi kami. Bagaimana tidak, para pria di sini berdandan melebihi akal sehat kami, dan mereka kemana-mana membawa tas seperti tas wanita, ser-



*Gedung-gedung Kampus Modern dan Zaman Kerajaan yang Masih Tetap Berdiri*

ta tak jarang melihat pria-pria yang berhenti sejenak ketika berjalan karena ia menemukan sesuatu untuk berkaca (entah itu kaca mobil, *etalase* toko, bahkan kaca cembung untuk pertigaan lalu lintas) lalu mereka membetulkan rambutnya sambil mengubah-ubah mimik wajahnya di depan kaca. Mungkin ini salah satu akibat lain dari budaya ekstrim mereka, sehingga *tren fashion* mereka terlalu cepat bergerak,

tak sebanding dengan pergerakan di negara lain. Namun pertama kali saya melihat tren metroseksual itu membuat perut ini menjadi mual, seperti gejala masuk angin. Ah, mungkin karena saya termasuk orang yang masih terlalu lambat proses evolusinya sehingga sulit beradaptasi.



*Penulis sedang bersama teman-teman kuliah (penulis berbaju biru)*

### Beroleh Teman dari Berbagai Negara

Kuliah di negeri asing itu menyenangkan, terlebih lagi kuliah di program *international*. Maka setiap harinya saya bertemu orang dari berbagai negara, seperti Ghana, Nigeria, Uzbekistan, Columbia, China, Guatemala, Cambodia, Vietnam, dan lain sebagainya. Yang mengejutkan, ketika mereka mendengar kata Indonesia maka yang terpikir oleh mereka adalah "Tsunami" dan "Terorisme". Jika saya memperkenalkan diri dari Indonesia maka ada 2 pertanyaan yang selalu berulang, "*is it safe now?*" atau "*Jakarta? Is it far away from tsunami?*". Untuk hal ini, tampaknya kita harus berterimakasih kepada media internasional.

Lucu rasanya melihat perbedaan mencolok di antara kami. Mereka yang dari kawasan Afrika umumnya mereka berpenampilan nyentrik, contohnya salah satu pria selalu berpakaian jas bahkan saat pergi ke kampus sehari-hari dan yang wanita bergonta-ganti model rambut. Mereka dari kawasan Barat cenderung santai: ke acara resmi memakai *jeans* (namun bisa menyesuaikan pakaiannya), di kelas mengangkat kaki. Namun kedua dari Afrika dan Barat punya satu kesamaan, mereka sangat aktif berpendapat di kelas. Sedangkan kita yang dari Asia, terlihat beda sendiri. Berpakaian se-

maunya sendiri (tak berkelas sama sekali), bersifat tertutup, dan jika di kelas selalu diam dan tak pernah berkomentar kecuali kalau ditanya komentarnya. Namun yang dari Asia umumnya lebih matang dalam urusan ilmu eksakta, pelajaran yang berurusan dengan hitung-hitungannya.

Di Korea, ketika bertemu salju senangnya bukan main, walaupun setelah itu mengutuk-mengutuk sendiri karena udara yang sangat dingin. Walau begitu, bertemu orang Indonesia di Korea rasanya jauh lebih gembira, membuat terbayang-bayang suasana Indonesia. Tak beda seperti bertemu keluarga sendiri. Lebih dari semua itu, bertemu makanan Indonesia rasanya seperti bertemu kekasih hati yang terpisah bertahun-tahun lamanya, membuat diri ini serasa melayang-layang tak mau pulang meski perut sudah kenyang. Mungkin benar juga kata orang: meski di negeri orang semua terlihat berkilauan, namun hati ini tetap rindu kampung halaman.

*\*)Penulis adalah: Pelaksana Pusklat PSDM*



*Suatu senja di Daehangno, salah satu tempat gaul anak muda Korea. Sangat ramai setiap malamnya.*

*"Warung Rokok"-nya Korea, bersih dan rapi*



*Di jalan kecil, tetap masih ada penjual sayur dan buah secara tradisional namun ditata rapi dan bersih*

## DTSD Kepabeanan dan Cukai

1 Februari - 30 April 2010



DTSD Kepabeanan dan Cukai Khusus Lulusan Prodip I Kepabeanan dan Cukai T.A. 2009  
26 Oktober - 20 November 2009

## Diklat Pejabat Lelang Kelas II

2-17 Februari 2010 - Wisma Bidakara



Peserta Diklat Angkatan 1 berfoto bersama



Suasana Pembukaan Angkatan 2

# ZONA BPPK

Layangkan pertanyaan anda seputar tugas pokok dan fungsi serta program diklat BPPK ke Menu "Hubungi Kami" pada portal [www.bppk.depkeu.go.id](http://www.bppk.depkeu.go.id) atau kirimkan via alamat [tikbppk@live.com](mailto:tikbppk@live.com).

To: [tikbppk@live.com](mailto:tikbppk@live.com)

From: Achmad Supriyanto

Subject: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Penerbitan Artikel

## Tanya

Mohon informasi, apakah Departemen ini masih memerlukan artikel untuk diterbitkan dalam bentuk jurnal?  
Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

## Jawab

Yth. Saudara Achmad Supriyanto

Sehubungan dengan email Saudara yang menanyakan tentang kelangsungan jurnal-jurnal yang dikelola oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dapat kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Pertama-tama kami mengucapkan terimakasih atas perhatian Saudara terhadap jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh BPPK
2. Pada Tahun Anggaran 2010, BPPK merencanakan menerbitkan kembali jurnal-jurnal yang dikelola oleh BPPK yaitu Jurnal Keuangan Publik (ISSN 1693-4741), Jurnal Akuntansi Pemerintah (ISSN 0216-8642) dan Jurnal BPPK (ISSN 2085-3785). Jurnal Akuntansi Pemerintah memuat hasil penelitian yang terkait dengan akuntansi pemerintah dan Jurnal Keuangan Publik memuat hasil penelitian yang terkait dengan keuangan sector publik. Sedangkan Jurnal BPPK merupakan jurnal baru yang akan memuat hasil-hasil penelitian yang bersifat lebih umum seperti penelitian di bidang SDM, organisasi, ekonomi serta kajian-kajian peraturan.
3. Setiap penerbitan jurnal akan didahului dengan pemberitahuan permintaan artikel untuk penerbitan jurnal yang akan disampaikan kepada unit-unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia, BUMN dan Universitas-universitas di Indonesia, baik melalui surat edaran permintaan artikel, maupun website BPPK.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.

Untuk kritik dan saran untuk peningkatan mutu jurnal-jurnal BPPK dapat disampaikan kepada:

Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat BPPK,

Jalan Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Telp. 012 7244666 ext. 253 atau 255 | Fax 021 7244328 | Email: [bagian.otl.bppk@gmail.com](mailto:bagian.otl.bppk@gmail.com)

Hormat kami

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

# PROGRAM DIKLAT PUSDIKLAT DAN BALAI DIKLAT KEUANGAN

APRIL - JUNI 2010

| Nama Diklat                                                                                     | Jenis Diklat                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| I. Pusdiklat Pengembangan SDM                                                                   | Ujian Dinas Tk. 1                                    |
|                                                                                                 | UPKP V                                               |
|                                                                                                 | UPKP II                                              |
|                                                                                                 | UPKP IV                                              |
|                                                                                                 | UPKP VI                                              |
|                                                                                                 | Diklat Prajabatan Gol. II Periode I                  |
|                                                                                                 | Diklat Prajabatan Gol. II Periode II                 |
|                                                                                                 | Diklat Prajabatan Gol. II Periode III                |
|                                                                                                 | Diklat Pim IV Angkatan III                           |
|                                                                                                 | Diklat Pim IV Angkatan IV                            |
|                                                                                                 | Diklat Pim IV Angkatan V                             |
|                                                                                                 | Diklat Pim III Angkatan VI                           |
|                                                                                                 | Diklat Pim III Angkatan VII                          |
| <a href="http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai">http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai</a>   |                                                      |
| II. Pusdiklat Anggaran Dan Perbendaharaan                                                       | Penyegaran Kuasa Pengguna Anggaran Angkatan II       |
|                                                                                                 | Bendahara Pengeluaran Angkatan I & II                |
|                                                                                                 | Penngelolaan APBN Angkatan I                         |
|                                                                                                 | Penguji Tagihan Angkatan I & II                      |
|                                                                                                 | Persiapan Pelaksanaan Anggaran I & II                |
|                                                                                                 | Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan I                  |
|                                                                                                 | Pengadaan Barang/Jasa Angkatan V & VI                |
|                                                                                                 | Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Angkatan I & II |
|                                                                                                 | Pelaksanaan Kuasa BUN Angkatan I & II                |
|                                                                                                 | Pengelolaan APBN Angkatan II                         |
|                                                                                                 | Bendahara Pengeluaran Angkatan III & IV              |
|                                                                                                 |                                                      |
| <a href="http://www.bppk.depkeu.go.id/webanggaran">http://www.bppk.depkeu.go.id/webanggaran</a> |                                                      |

| Nama Diklat                                                                               | Jenis Diklat                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| III. Pusdiklat Pajak                                                                      | DTSD Pajak I Angkatan I (eks STAN)                                            |
|                                                                                           | DTSS Operator Console Pajak Angk. II & III                                    |
|                                                                                           | Diklat TNA Komunikator Angkatan III                                           |
|                                                                                           | Jurusita Pajak Angkatan III                                                   |
|                                                                                           | Penilai PBB Angkatan I                                                        |
|                                                                                           | Penilai PBB Angkatan II                                                       |
|                                                                                           | Diklat Penyegaran Pem. Pajak Angk. IV                                         |
|                                                                                           | DTSS Operator console Pajak Angk. IV                                          |
|                                                                                           | Pajak Bumi dan Bangunan                                                       |
|                                                                                           | KUP Tingkat Dasar                                                             |
|                                                                                           | KUP Tingkat Menengah                                                          |
|                                                                                           | Manajemen Keberatan dan Banding                                               |
| IV. Pusdiklat Bea Cukai                                                                   | DTSS Operator Console Pajak Angk. V                                           |
|                                                                                           | Jurusita Pajak Angkatan V                                                     |
|                                                                                           | Jurusita Pajak Angkatan VI                                                    |
|                                                                                           | PPN Tingkat Menengah                                                          |
|                                                                                           | PPN Tingkat Tinggi                                                            |
|                                                                                           | KUP Tingkat Tinggi                                                            |
|                                                                                           | PPh Tingkat Menengah                                                          |
|                                                                                           | PPh Tingkat Tinggi                                                            |
|                                                                                           | Account Representative Angkatan I                                             |
|                                                                                           | Pemeriksa Menengah Angkatan I                                                 |
|                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                           |                                                                               |
| <a href="http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak">http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak</a> |                                                                               |
| IV. Pusdiklat Bea Cukai                                                                   | DTSD Kepabeanan dan Cukai                                                     |
|                                                                                           | DTU Kesamaptan                                                                |
|                                                                                           | DTSD Kepabeanan dan Cukai Lanjutan Khusus Lulusan DTSD T.A. 2006-2007 Angk. I |
|                                                                                           | DTSS Pemeriksaan Sarana Pengangkut                                            |
|                                                                                           | DTSD Kepabeanan dan Cukai Khusus Lulusan Prodi I                              |
|                                                                                           | DTSD Kepabeanan & Cukai Lanjutan Khusus Lulusan DTSD T.A. 2006-2007 Angk. II  |
|                                                                                           | DTSS Post Clearance Audit                                                     |
|                                                                                           | DTSS Intelijen Taksis                                                         |
|                                                                                           | DTSS Client Coordinator                                                       |
|                                                                                           | DTSS Kepatuhan Internal                                                       |
|                                                                                           | Diklat Fungsional Pejabat Fungsional Pemeriksa dokumen                        |
|                                                                                           |                                                                               |
| <a href="http://www.bppk.depkeu.go.id/webbc">http://www.bppk.depkeu.go.id/webbc</a>       |                                                                               |

| Nama Diklat                                                                         | Jenis Diklat                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| V. Pusdiklat Keuangan Umum                                                          | DFP Pranata Komputer Ahli                                        |
|                                                                                     | DTSS Penyusunan dan Validasi Soal                                |
|                                                                                     | DTSS Psikologi Audit                                             |
|                                                                                     | DTU Pelayanan Prima                                              |
|                                                                                     | DTU Kearsipan Elektronik                                         |
|                                                                                     | DTU Microsoft Office (Advanced)                                  |
|                                                                                     | DTU Manajemen Resiko                                             |
|                                                                                     | DTU Tata Naskah Dinas                                            |
|                                                                                     | DTSS Teknik Audit Berbantuan Komputer Menggunakan ACL (Menengah) |
|                                                                                     | Workshop Pengelolaan Diklat Melalui LMS                          |
|                                                                                     | DTU Menulis Ilmiah Populer                                       |
|                                                                                     | DTU Manajemen Resiko                                             |
|                                                                                     | DTU Legal Drafting                                               |
|                                                                                     | DTSS TNA Desain Diktat                                           |
|                                                                                     | DTU TOEFL Preparation (Asrama)                                   |
|                                                                                     | DTSS Teknik Intelijen (Tk. Dasar)                                |
|                                                                                     | DTU Desain Pengelola Database                                    |
|                                                                                     | DTSS Teknik Audit Berbantuan Komputer menggunakan ACL (Lanjutan) |
|                                                                                     | DTSS Negotiation Skill (Loan Negotiation)                        |
|                                                                                     | DTU Manajemen Resiko (Sertifikasi)                               |
|                                                                                     | Seminar Perpajakan Pasar Modal                                   |
| V. Pusdiklat Keuangan Umum                                                          | DTU Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum                     |
|                                                                                     | DTU Kepegawaian                                                  |
|                                                                                     | DTU Analisis Jabatan                                             |
|                                                                                     | DTU TOEFL Preparation (Non Asrama)                               |
|                                                                                     | Workshop Persiapan Purna Bhakti                                  |
|                                                                                     | DTU Kearsipan (Konvensional)                                     |
|                                                                                     | DTSS Risk Base Audit                                             |
| <a href="http://www.bppk.depkeu.go.id/webku">http://www.bppk.depkeu.go.id/webku</a> |                                                                  |

| Nama Diklat                                                                                           | Jenis Diklat                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| VI. Pusdiklat Kekayaan Negara Dan Perimbangan Keuangan                                                | DTSS Pengelolaan Kekayaan Negara         |
|                                                                                                       | DTSS Pengelolaan Transfer Dana ke daerah |
|                                                                                                       | Pengelolaan Kekayaan Negara              |
|                                                                                                       | DTSS Penilaian Properti Dasar (1)        |
|                                                                                                       | DTSS Juru Sita Piutang Negara            |
|                                                                                                       | DTSS Pejabat Lelang (1)                  |
|                                                                                                       | DTSS Pejabat Lelang (2)                  |
|                                                                                                       | DTSS Penilaian Usaha Dasar               |
|                                                                                                       | DTSS Penilaian Properti Dasar (2)        |
|                                                                                                       | Penilaian Properti Lanjutan (1)          |
| <a href="http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn">http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn</a>                 |                                          |
| I. Balai Diklat Keuangan Medan                                                                        | Diklat Ujian Dinas Tk. I Periode I       |
|                                                                                                       | UPKP V Periode I                         |
|                                                                                                       | UPKP II Periode I (Baru)                 |
|                                                                                                       | UPKP IV Periode I (Baru)                 |
|                                                                                                       | DTSD Bea dan Cukai Lulus DTSD 2006-2007  |
|                                                                                                       | DTSS Account Representative              |
|                                                                                                       | Diklat Prajabatan Gol. II Periode I      |
|                                                                                                       | Diklat Prajabatan Gol. II Periode II     |
|                                                                                                       |                                          |
| <a href="http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/medan">http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/medan</a>           |                                          |
| II. Balai Diklat Keuangan Palembang                                                                   | DTSS Penguji Tagihan                     |
|                                                                                                       | DF Bendahara Pengeluaran                 |
|                                                                                                       | DTSD I Bea dan Cukai                     |
| <a href="http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/palembang">http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/palembang</a>   |                                          |
| III. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta                                                                 | Penguji Tagihan                          |
|                                                                                                       | Ujian Dinas Periode I                    |
|                                                                                                       | PBJ dan Sertifikasi                      |
|                                                                                                       | Account Representative                   |
|                                                                                                       | Pengelolaan BMN                          |
|                                                                                                       | UPKP V Periode I                         |
|                                                                                                       | Kesempatan                               |
|                                                                                                       | UPKP II                                  |
|                                                                                                       | UPKP IV                                  |
|                                                                                                       | Account Representative                   |
|                                                                                                       | MS Power Point dan MS Excel              |
|                                                                                                       | Pelayanan Terpadu                        |
|                                                                                                       | Prajabatan Gol. II Periode I             |
|                                                                                                       | Tata Naskah Dinas                        |
|                                                                                                       | Prajabatan Gol. II Periode II            |
| <a href="http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/yogyakarta">http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/yogyakarta</a> |                                          |
| IV. Balai Diklat Keuangan Malang                                                                      | DUD Tk. I Periode I                      |
|                                                                                                       | Diklat Pelayanan Terpadu AK. I           |
|                                                                                                       | Diklat Account Representative Ak. II     |
|                                                                                                       | UPKP V                                   |
|                                                                                                       | UPKP IV                                  |
|                                                                                                       | Diklat Pelayanan Terpadu Ak. II          |
|                                                                                                       | DTSD Kepabeanaan dan Cukai               |
|                                                                                                       | Diklat Pengenalan Internet Angk. I       |
|                                                                                                       | DTSS Bendahara Pengeluaran Angk. I       |
|                                                                                                       | DTSS Bendahara Pengeluaran Angk. II      |
|                                                                                                       | DTSS Pengelolaan BMN                     |
|                                                                                                       | DTSS Pengelolaan Belanja Pegawai         |
|                                                                                                       | DTSS Bendahara Penerimaan                |
| <a href="http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/malang">http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/malang</a>         |                                          |

|                                                                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| V. Balai Diklat Keuangan Balikpapan                                                                   | DTSS Pengadaan Barang/Jasa Angk. I            |
|                                                                                                       | DUD Tk. I Periode I                           |
|                                                                                                       | DTSS Account Representatif Angk. II           |
|                                                                                                       | UPKP V (dgn tutorial) Periode I               |
|                                                                                                       | Workshop Pengembangan Personal Gol.III        |
|                                                                                                       | DTSS Pengelolaan Kekayaan Negara              |
|                                                                                                       | DTSS Pengadaan Barang/Jasa Angk. II           |
|                                                                                                       | Diklat Prajabatan Gol. II Periode II          |
|                                                                                                       | Diklat Prajabatan Gol. II Periode III         |
|                                                                                                       |                                               |
| <a href="http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/balikpapan">http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/balikpapan</a> |                                               |
| VI. Balai Diklat Keuangan Makassar                                                                    | Diklat Fungsional Bendahara Pengeluaran       |
|                                                                                                       | Ujian Dinas Tk. I Periode I                   |
|                                                                                                       | DTSD Kepabeanaan dan Cukai                    |
|                                                                                                       | UPKP V Periode I                              |
|                                                                                                       | UPKP II Periode I                             |
|                                                                                                       | UPKP IV Periode I                             |
|                                                                                                       | DTSS Account Representative Angk. I           |
|                                                                                                       | DTSS Account Representative Angk. II          |
|                                                                                                       | LPJ Golongan II Periode I                     |
|                                                                                                       | LPJ Golongan II Periode II                    |
| <a href="http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/makassar">http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/makassar</a>     |                                               |
| VII. Balai Diklat Keuangan Cimahi                                                                     | Bea Cukai Prodip I                            |
|                                                                                                       | Ujian Dinas Tingkat I Periode I               |
|                                                                                                       | Kesamapatan Bea Cukai                         |
|                                                                                                       | UPKP V Periode I                              |
|                                                                                                       | UPKP II Periode I                             |
|                                                                                                       | UPKP IV Periode I                             |
|                                                                                                       | Bendahara Pengeluaran Periode I               |
|                                                                                                       | Bendahara Pengeluaran Periode II              |
|                                                                                                       | Account Representative Periode I              |
|                                                                                                       | Juru Sita Pajak Periode II                    |
|                                                                                                       | Pengadaan Barang/Jasa Periode II              |
|                                                                                                       | Prajabatan Gol. II Periode I                  |
|                                                                                                       | Prajabatan Gol. II Periode II                 |
|                                                                                                       |                                               |
| <a href="http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/cimahi">http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/cimahi</a>         |                                               |
| VIII. Balai Diklat Keuangan Manado                                                                    | DTSS Bendahara Pengeluaran Angk. I            |
|                                                                                                       | Diklat Ujian Dinas Tingkat I                  |
|                                                                                                       | Diklat Penyegaran Account Representative (AR) |
|                                                                                                       | DTSS Pengelolaan Belanja Pegawai Angk. I      |
|                                                                                                       | Diklat Pelayanan Terpadu (Angk. I)            |
|                                                                                                       | Diklat Pelayanan Terpadu (Angk. II)           |
|                                                                                                       | Diklat Penyegaran Pengadaan Barang dan Jasa   |
|                                                                                                       |                                               |
| <a href="http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/manado">http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/manado</a>         |                                               |

|                                                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| IX. Balai Diklat Keuangan Denpasar                                                                  | Ujian Dinas Tk. I Periode I                        |
|                                                                                                     | Diklat Dasar PBB dan BPHTB untuk Pemda             |
|                                                                                                     | UPKP V (dengan Tutorial) Periode I                 |
|                                                                                                     | UPKP IV Periode I                                  |
|                                                                                                     | Prajabatan Gol. II Periode I                       |
| <a href="http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/denpasar">http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/denpasar</a>   |                                                    |
| X. Balai Diklat Keuangan Pekanbaru                                                                  | DTSS Bendaharawan Pengeluaran Angkatan I           |
|                                                                                                     | UPKP V Periode I                                   |
|                                                                                                     | UPKP IV Periode I                                  |
|                                                                                                     | Juru Sita Pajak                                    |
|                                                                                                     | Bendaharawan Pengeluaran Angk. II                  |
|                                                                                                     | Prajabatan Gol. II Periode I                       |
|                                                                                                     | Pengadaan Barang dan Jasa Angk. I                  |
|                                                                                                     |                                                    |
| <a href="http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/pekanbaru">http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/pekanbaru</a> |                                                    |
| XI. Balai Diklat Keuangan Pontianak                                                                 | DUD Tk.I Periode I                                 |
|                                                                                                     | Diklat Prajabatan Gol.II Periode I                 |
|                                                                                                     | Diklat Ujian Dinas Tingkat I (mengulang) Periode I |
|                                                                                                     | UPKP V                                             |
|                                                                                                     | Pengadaan Barang/Jasa                              |
|                                                                                                     | UPKP IV                                            |
|                                                                                                     | Account Representative Tingkat Dasar Angk.I        |
|                                                                                                     | Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Periode I  |
|                                                                                                     | Account Representative Tingkat Dasar Angk.II       |
|                                                                                                     | Account Representative Tingkat Dasar Angk.III      |
|                                                                                                     | Bendahara Penerimaan                               |
|                                                                                                     |                                                    |
| <a href="http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/pontianak">http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/pontianak</a> |                                                    |

## INFORMASI LEBIH LANJUT

mengenai jadwal diklat dapat dilihat pada menu Kalender Diklat di Portal **www.bppk.depkeu.go.id** atau silahkan hubungi Pusdiklat dan BDK terkait.

## SEKRETARIAT BPPK

## PHONE

+62 21 7394666, 7204131

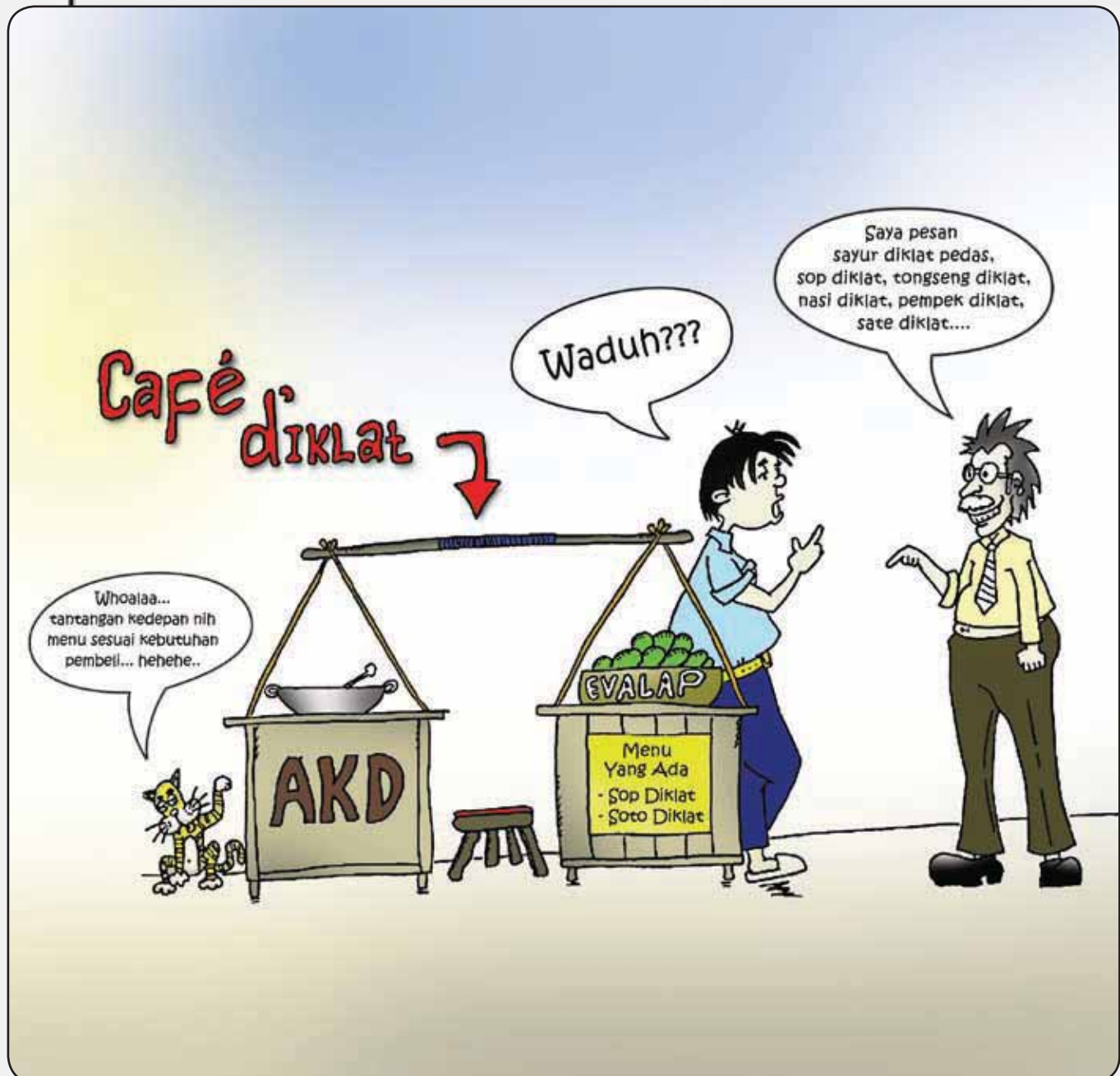
## FAX

+62 21 7261775

# Karikatur

Karikatur

Oleh : Inwan 2010



## Peresmian Gedung dan Fasilitas Pusdiklat



Peresmian Gedung Pusdiklat Keuangan Umum  
2 Februari 2010



Peresmian Gedung dan Fasilitas Baru  
Pusdiklat Pajak – 8 Januari 2010



Peresmian Gedung Anggrek – Pusdiklat Anggaran  
dan Perbendaharaan – 15 Januari 2010

## Serah Terima Jabatan Kepala BPPK



Serah Terima Jabatan Kepala BPPK dari Bapak I Made Gde Erata  
selaku pejabat lama kepada Bapak Mardiasmo selaku pengganti  
sementara (Pgs) Kepala BPPK – 19 Februari 2010

## Rapat Kerja BPPK 2010 – 3-5 Maret 2010 – Anyer, Banten.



Suasana Raker BPPK 2010



Peserta Raker Berfoto Bersama



# **SUDAHKAH ANDA LAPOR GRATIFIKASI KE KPK?**

Pegawal Negeri menerima  
sesuatu karena jabatannya  
dan tidak melaporkan ke KPK  
dalam waktu 30 hari kerja  
adalah korupsi

Pasal 12B dan Pasal 12C UU No. 31/1999 jo.  
UU No. 20/2001

**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi

Untuk pelaporan Gratifikasi,  
hubungi **Direktorat Gratifikasi KPK**:  
tel.: (021) 2557 8440  
faks.: (021) 5289 2448  
[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)

Untuk informasi seputar KPK  
dan pemberantasan korupsi,  
hubungi **Biro Humas KPK**:  
tel.: (021) 2557 8498  
faks.: (021) 5290 5592  
e-mail: [informasi@kpk.go.id](mailto:informasi@kpk.go.id)



# EDUKASI

K E U A N G A N

EDISI 3/2010

Jl. Purnawarman 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Telp: +62 21 7394666, 7244873

Fax: +62 21 7261775

<http://www.bppk.depkeu.go.id>

